

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMBERDAYAKAN  
MASYARAKAT DESA**

**(Studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana

Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**ITA ULUMIYAH**

**NIM. 0910310071**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK**

**MALANG**

**2013**

### MOTTO

*“Tidak boleh dengki dan iri hati kecuali dalam 2 hal: iri hati terhadap orang yang dikaruniai harta dan dia selalu menginfakkannya pada malam hari dan siang hari. Juga iri hati kepada yang diberi kepandaian membaca Al-Qur’an, dan dia membacanya setiap malam dan siang hari.” (H.R Bukhari dan Muslim)*

*Orang sukses adalah orang yang menggunakan waktu dengan optimal dan ia melakukan sesuatu yang tidak diminati oleh orang yang gagal. Orang malang, yaitu orang yang hari-harinya diisi dengan kekecewaan dan selalu memulai sesuatu pada keesokan harinya.  
(Aa Gym)*

*Kita berdoa kalau kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mestinya kita juga berdoa dalam kegembiraan besar dan saat rezeki melimpah.  
- Kahlil Gibran*

*Keberhasilan bukan ditentukan oleh besarnya otak seseorang, melainkan oleh besarnya cara berpikir seseorang. (David J. Schwartz)*

## *Halaman Persembahan*

Alhamdulillahirrobbil'alamin.....akhirnya aku bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik, inilah puncak dari perjuangan dan kerja kerasku dalam menyelesaikan pendidikanku, banyak pelajaran dan pengalaman yang aku dapat dari aku kuliah sampai aku bisa menyelesaikan kuliah ini. Aku tahu ini bukan merupakan akhir dari perjuanganku tapi awal dari perjuangan yang harus aku lalui. Dengan penuh cinta dan kasih kupersembahkan skripsi ini untuk :

- Dengan rasa syukur kepada ALLah SWT yang telah memberiku kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang berguna dan memberiku kemudahan dan kekuatan dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Kedua orang tua ku yang telah memberiku dukungan yang tak terbatas dan doa yang tak henti. Ibu dan Ayah terima kasih atas cinta dan kasih sayang yang telah kalian berikan selama ini, dengan pengorbanan kalianlah yang tak terhitung yang membuat aku dapat menyelesaikan skripsi ini.

- Keluarga besarku yang ada di Pasuruan dan Malang terima kasih atas doa yang selama ini kalian berikan pada ku, terima kasih banyak.
- Mas Aan qu makasih banyak atas semuanya yang diberikan selama ini, perhatian, pengertian, kesetiaan, curahan kasih sayang, nasehatnya dan selalu memberiku semangat untuk menyelesaikan skripsi ini,
- Buat sahabatku Lailiyul Anshoria, Desy Dwi Ratnasari, Benita Merry Nathalia, dan Cytya Putri yang telah bersedia membantu dan memberi dukungan sehingga aq bisa menyelesaikan skripsi ini
- Buat anak2 kos Remujung 31 (linda, ike, rena, icha) yang telah memberikan dukungan dan motivasi
- Buat Almamaterku tercinta.

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul : Peran Pemerintah Desa dalam Memberdayakan Masyarakat  
Desa. (Studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis  
Kabupaten Malang)

Disusun Oleh : Ita Ulumiyah

NIM : 0910310071

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Kosentrasi : Administrasi Pembangunan

Malang, 01 Mei 2013

**Komisi Pembimbing****Ketua****Anggota**

**Prof. Abdul Juli Andi Gani, MS**  
NIP. 195407041981031003



**Dra. Lely Indah Mindarti, M.Si**  
NIP. 196905242002122002

**TANDA PENGESAHAN**

Telah dipertahankan didepan Majelis Penguji Skripsi, Fakultas ilmu  
Admistrasi Universitas Brawijaya, Pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 30 Mei 2013

Jam : 08.00 - 09.00

Skripsi atas nama : Ita Ulumiyah

Judul : Peran Pemerintah Desa dalam Memberdayakan Masyarakat  
Desa.

dan dinyatakan lulus

**MAJELIS PENGUJI**

Ketua



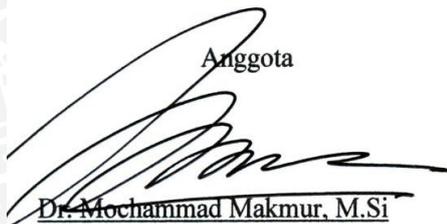
Prof. Dr. Abdul Juli Andi Gani, M.S  
NIP. 19540704 198103 1 003

Anggota



Dra. Lely Indah Mindarti, M.Si  
NIP. 19690524 200212 2 002

Anggota



Dr. Mochammad Makmur, M.Si  
NIP. 19511028 198003 1 002

Anggota



Drs. Siswidiyanto, M.S  
NIP. 19600717 198601 1 002

### PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia naskah jurnal ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 01 Mei 2013



Nama : Ita Ulumiyah

NIM : 0910310071

## RINGKASAN

Ulumiyah, Ita, 2013, Peran Pemerintah Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang), Prof. Abdul Andi Juli Gani, MS, Dra. Lely Indah Mindarti, M.Si 152Hal+xviii

---

Pembangunan pedesaan seharusnya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama dalam membentuk dan merubah perilaku masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan taraf hidup yang lebih berkualitas dengan demikian peneliti merasa tertarik dalam melakukan penelitian tentang pemberdayaan masyarakat Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang karena berdasarkan kenyataan yang ada desa Sumberpasir merupakan desa yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian petani serta tingkat pendidikan masyarakat yang usia produktif cenderung masih rendah. berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang peran dari pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa, mengetahui upaya-upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat peran pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa khususnya di Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa Sumberpasir, Ketua LPMD, Perangkat Desa, Anggotanya LPMD, Ketua RT, Ketua UPK, Ketua PKK, Kelompok Gapoktan, Tokoh Masyarakat, Pengusaha Bordir dan Masyarakat. untuk mempermudah peneliti dalam melaksanakan penelitian dilapangan, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, pengamatan dan dokumentasi sebagai pendukung dari kegiatan penelitian. untuk menganalisa data peneliti menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Sumberpasir telah mampu memberdayakan masyarakat melalui beberapa program-program pemberdayaan yaitu: pertama pengaktifan kelembagaan, kedua peningkatan peran serta masyarakat dengan kegiatan pelaksanaan kerja bakti, perlombaan desa, musrenbang desa serta pembangunan Fisik, ketiga peningkatan ekonomi produktif dengan kegiatan pemberian pelatihan pande besi dan pelatihan bordir. akan tetapi dalam melaksanakan upaya Pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa Sumberpasir mengalami kendala-kendala diantaranya partisipasi masyarakat yang kurang, budaya malas serta kurangnya fasilitas yang tersedia dalam mendukung kegiatan pemberdayaan.

Oleh karena itu, diharapkan kepada masyarakat desa Sumberpasir untuk turut aktif dalam setiap kegiatan pemberdayaan baik dalam menentukan dan membuat program pemberdayaan masyarakat. selain itu pemerintah desa

Sumberpasis sebaiknya lebih mengoptimalkan program-program pemberdayaan agar program tersebut bisa terealisasi dengan baik serta menyediakan kontak saran untuk menampung aspirasi dan keluhan-keluhan masyarakat yang tidak mau menyampaikan pendapatnya secara langsung yang diletakkan di kantor desa.



## SUMMARY

Ulumiyah, Ita, 2013, Role of Village Government in Empowering Villagers ( Study on Sumberpasir Village Pakis Subdistrict Malang District ), Prof. Abdul Andi Juli Gani, MS,Dra. Lely Indah Mindarti, M.Si 146 Hal+xviii

---

Rural development should leads to increase in welfare of villagers through the empowerment of villagers. The empowerment try to increase the quality of human resources especially in form and change their attitude to reach a better life and a higher standart of living, that's way the researcher is interested to research about empowerment of villagers in Sumberpasir Village Pakis Subdistrict Malang District because based on the fact, most of livelihood's Sumberpasir Villagers is farm and level of public educationin the productive agetends to below. Based on that problem, researcher is intersted in studying about role of village goverment in empowering villagers, know the efforts made by the governmentin empowering rural villager sand to determine the supporting factorsand inhibiting factors the government's rolein empowering villagers especially in the rural village of Sumberpasir Pakis Subdistrict Malang District.

Inthis study the authorsuse descriptive research with a qualitative approach. Informantsin this study isthe village chief of Sumberpasir, Chairman LPMD, The Villagers, LPMD Member, Chairman of RT, UPK Chairman, Chairman of the PKK, Gapoktan Group, Community Leaders, Entrepreneursof Embroidery and the rural village. To facilitate researchers in conducting field research, there searchers used a technique of collecting data throughinter views, observation and documentation as support of research activities. To analyze the data researcher use a data collection, data reduction, data display and conclusion.

Based on the research that has been done can be concluded that the village government of Sumberpasir can empower people through several development programs are: The first is activation of the institution,the second is increasing public participation in the implementation of communal worka ctivities, the race village, the villag musrenbangdes and physical development,The third is increase in productive economic with activity training of black smiths and embroidery. But, in the implementation of an empowerment society, village government Sumberpasir had some constrains such as lack of community participation, lazy culture and the lack of facilities available to support development activities.

Therefore, expected to Sumberpasir villagers to participate in every development activities in determining and making community empowerment program. Be side that,the government should optimize empowerment of Sumberpasir village programs so the program can berealized and providing a suggestion boxto accommodate the Villagers aspirations and complaints who don't want to give his opinion directly placed on the village office

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Peran Pemerintah Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang". Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih belum mencapai kesempurnaan baik dalam segi penyampaian materi maupun penuturan bahasa. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Ayah dan Ibu yang selalu memberikan doa siang dan malam untuk kesuksesan putrinya.
2. Prof. Dr. Sumartono, M.S. selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
3. Dr. M.R. Khoirul Muluk, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
4. Prof. Dr. Abdul Andi Juli Gani, M.S selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penyusunan tesis ini.

5. Dra. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penyusunan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Publik yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama duduk di bangku kuliah.
7. Bapak Muhdlor selaku Kepala Desa Sumberpasir, Aparat Pemerintah Desa Sumberpasir beserta Masyarakat Desa Sumberpasir yang telah banyak membantu dan memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan data untuk penyusunan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada seluruh teman-teman Fia Publik angkatan 2009 beserta sahabat-sahabatku yang telah banyak memberikan dukungan dan membantu selama menjalani studi.

Demi kesempurnaan skripsi ini, segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan sebagai masukan yang sangat berharga. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Malang, Mei 2013

Penulis

## DAFTAR ISI

MOTTO	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	
LEMBAR PENGESAHAN	
PERNYATAAN ORSINALITAS SKRIPSI	
RINGKASAN .....	viii
SUMMARY .....	x
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI .....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xvi
DAFTAR GAMBAR .....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kontribusi Penelitian .....	7
E. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Administrasi	
1. Pengertian Administrasi .....	11
2. Pengertian Administrasi Pembangunan .....	12
3. Pengertian Pembangunan .....	13
4. Program Pembangunan .....	15
B. Desa	
1. Pengertian Desa .....	16
2. Pembentukan Desa .....	17
3. Kewenangan Desa .....	20
4. Pembangunan Desa .....	22
C. Pemerintahan Desa	
1. Pengertian Pemerintahan Desa .....	24
2. Tugas Pemerintahan Desa .....	26
D. Pemberdayaan	
1. Pengertian Pemberdayaan .....	29
2. Konsep Pemberdayaan .....	31
3. Prinsip dan Dasar Pemberdayaan .....	34

4. Proses dan Upaya Pemberdayaan .....	35
5. Teknik dan Pola Pendekatan Pemberdayaan .....	38
6. Tahap Pemberdayaan .....	40
7. Aktor dalam Pemberdayaan .....	42
8. Elemen Pemberdayaan .....	44
E. Kerangka Konsep .....	48

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	52
B. Fokus Penelitian .....	53
C. Lokasi dan Situs Penelitian .....	55
D. Sumber dan Jenis Data .....	56
E. Teknik Pengumpulan Data .....	57
F. Instrument Penelitian .....	58
G. Analisis Data .....	59

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian	
1. Gambaran Umum Desa Sumberpasir .....	62
2. Visi dan Misi Desa Sumberpasir .....	71
3. Keadaan Pemerintahan Desa Sumberpasir .....	72
4. Unsur-unsur Pemerintahan Desa Sumberpasir .....	74
B. Penyajian Data Fokus Penelitian	
1. Peran Pemerintah Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Desa	
a. Peran Pemerintah Desa Sebagai Pembuat Kebijakan .....	86
b. Peran Pemerintah Desa Sebagai Pembuat Program .....	88
c. Peran Pemerintah Desa Sebagai Pembina .....	90
2. Upaya Pemerintah desa dalam Memberdayakan Masyarakat Desa	
a. Pengaktifan Kelembagaan UPK .....	99
b. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan .....	100
c. Peningkatan Ekonomi Produktif .....	105
3. Tahap-tahap Pemberdayaan .....	109
4. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemerintah Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Desa	
a. Faktor Pendukung .....	113
b. Faktor Penghambat .....	116
C. Analisis Data Fokus Penelitian	
1. Peran Pemerintah Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Desa	
a. Peran Pemerintah Desa Sebagai Pembuat Kebijakan .....	120
b. Peran Pemerintah Desa Sebagai Pembuat Program .....	121

c. Peran Pemerintah Desa Sebagai Pembina.....	125
2. Upaya Pemerintah Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Desa	
a. Pengaktifan Kelembagaan UPK.....	130
b. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan .....	132
c. Peningkatan Ekonomi Produktif .....	137
3. Tahap-tahap Pemberdayaan.....	140
4. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Memberdayakan Masyarakat Desa	
a. Faktor Pendukung .....	143
b. Faktor Penghambat .....	146

**BAB V PENUTUP**

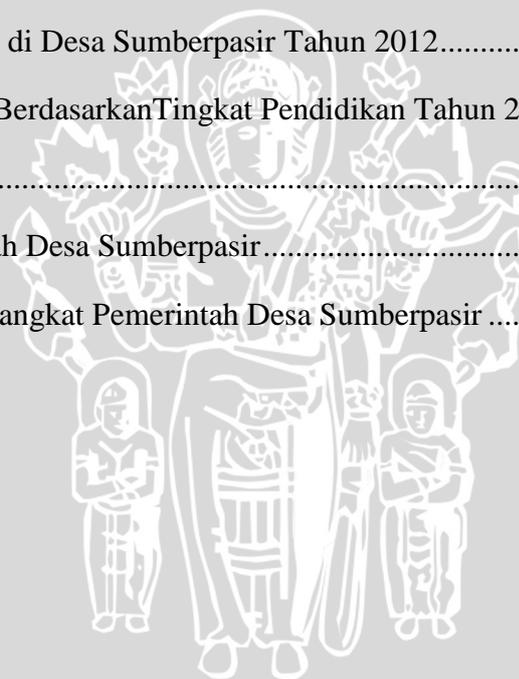
A. Kesimpulan.....	149
B. Saran .....	151

DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN



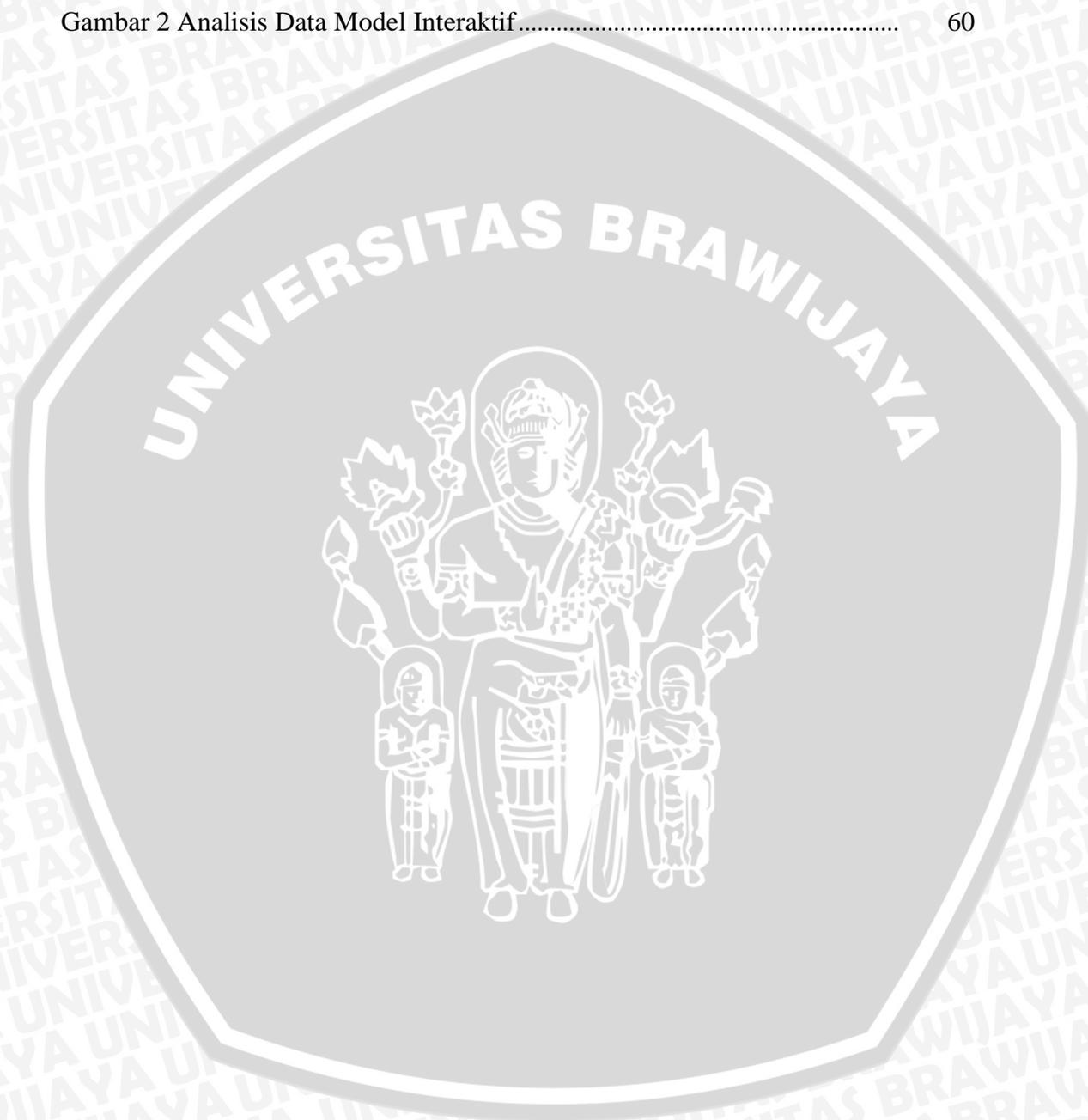
## DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Tahapan Tingkat Keberdayaan Masyarakat.....	41
2. Peran Tiga Aktor dalam Pemberdayaan Masyarakat.....	43
3. Batas Wilayah Desa Sumberpasir.....	63
4. Orbitasi Desa Sumberpasir.....	64
5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	65
6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Mata Pencaharian Tahun 2012.....	66
7. Penggunaan Tanah di Desa Sumberpasir Tahun 2012.....	67
8. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2012.....	70
9. Sarana Pendidikan.....	71
10. Susunan Pemerintah Desa Sumberpasir.....	73
11. Susunan Nama Perangkat Pemerintah Desa Sumberpasir.....	84



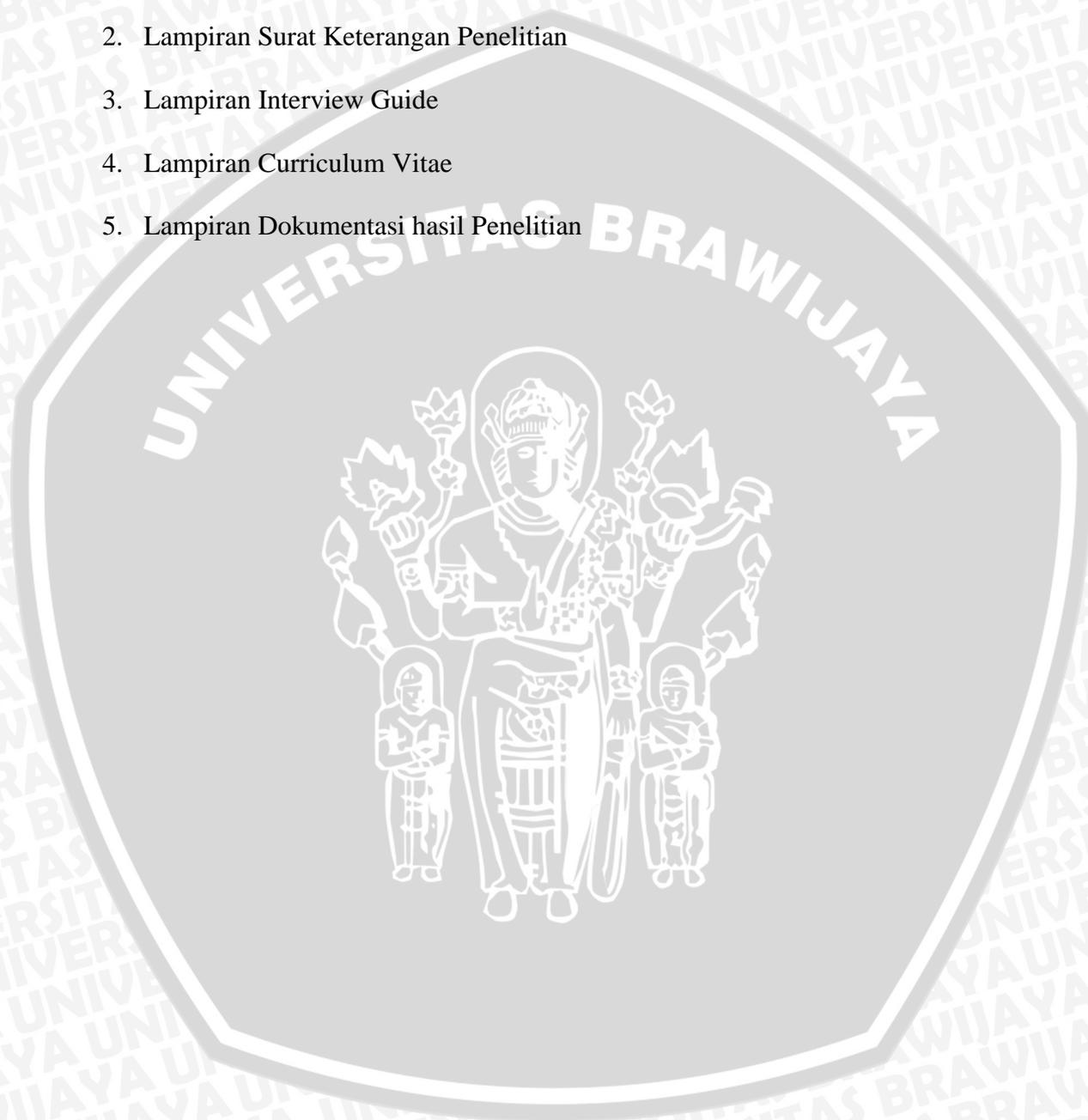
### DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Kerangka Konseptual .....	49
Gambar 2 Analisis Data Model Interaktif.....	60



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran Surat Izin Penelitian
2. Lampiran Surat Keterangan Penelitian
3. Lampiran Interview Guide
4. Lampiran Curriculum Vitae
5. Lampiran Dokumentasi hasil Penelitian



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dengan adanya desentralisasi akan memberikan kesempatan, dan kewenangan yang luas kepada daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Lahirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka semakin menguatkan posisi daerah dalam meningkatkan kemampuan di segala bidang, karena semua yang menyangkut kemajuan daerah diserahkan pengelolaan sepenuhnya kepada daerah.

Pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, peran serta masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, dengan adanya otonomi maka daerah diharapkan untuk meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dalam kerangka otonomi daerah, salah satu komponen yang perlu dikembangkan adalah wilayah pedesaan. Hal ini dikarenakan desa merupakan tempat berdirinya sebagian besar masyarakat Indonesia. Kedudukan desa dan masyarakat desa merupakan dasar landasan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Didalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang desa, memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus

rumah tangganya sendiri, dengan persyaratan yang diamanatkan yakni dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat harus dilakukan perubahan-perubahan yang berkesinambungan kearah kemajuan yang lebih baik. Perubahan tersebut dapat dilakukan dengan cara pembangunan yang berkesinambungan, meliputi semua aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang bertujuan untuk tercapainya perbaikan kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan masyarakat, sehingga kemiskinan dan lingkungan hidup masyarakat mengalami perubahan. Menurut Bintoro Tjokroamidjojo (2001:113) pembangunan merupakan suatu proses pembaharuan yang kontinue dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang lebih baik.

Pembangunan pedesaan seharusnya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui pemberdayaan masyarakat desa. Menurut Korten (dalam Sukmaniar, 2007: 42) pemberdayaan adalah peningkatan kemandirian rakyat berdasarkan kapasitas dan kekuatan internal rakyat atas SDM baik material maupun non-material melalui redistribusi modal. Selanjutnya menurut Parsons,et,al.,1994 (dalam Suharto, 2010:58-59)

“Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagai pengontrolan ataa, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya”.

Dalam mewujudkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat perlu didukung oleh pengelolaan pembangunan yang partisipatif, maka dari itu pemerintah desa diharapkan dapat melaksanakan pemerintah sesuai

dengan yang diharapkan oleh pemerintah dalam UU No. 32 tahun 2004, yakni pemerintah desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing demi kesejahteraan rakyat yang berimbas pada terwujudnya pembangunan nasional. Selain itu, pada tatanan pemerintahan diperlukan perilaku yang jujur, terbuka, bertanggung jawab, dan demokrasi terhadap masyarakat desa, sedangkan masyarakat selaku obyek dari pemberdayaan masyarakat diharapkan harus ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama.

Pemberdayaan masyarakat berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) terutama dalam membentuk dan merubah perilaku masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan taraf hidup yang lebih berkualitas. Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah strategi yang dilakukan untuk melakukan kemandirian sosial ekonomi masyarakat dalam jangka panjang. Sasaran yang dituju dalam memberdayakan adalah masyarakat miskin yang tidak memiliki keberdayaan secara ekonomi, sosial, budaya dan politik.

Pemberdayaan masyarakat tidak lepas dari peran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (lokal), dengan adanya otonomi daerah peran pemerintah lokal lebih dominan dibandingkan pemerintah pusat. hal ini dikarenakan pemerintah pusat hanya sebagai pengawas sedangkan pemerintah daerah (lokal) sebagai aktor (pelaksana).

Salah satu fenomena yang menarik untuk dikaji berkaitan dengan topik ini adalah Peran Pemerintah Desa Sumberpasir. Desa Sumberpasir merupakan Desa yang terletak di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, secara geografis Desa

Sumberpasir terletak di wilayah timur, yang memiliki potensi cukup strategis dengan luas wilayah 320,772 ha dengan mata pencaharian sebagian besar penduduknya bermata pencaharian petani sebanyak 145 dan jumlah buruh tani berjumlah 358. Hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah penggunaan tanahnya yang berjumlah 232 ha digunakan untuk lahan pertanian.

Selain itu ketidakmampuan sarana dan infrastruktur ekonomi dalam menampung para lulusan lembaga pendidikan yang ada di desa berakibat pada timbulnya pengangguran. Berdasarkan data potensi desa tahun 2012 menunjukkan masyarakat yang berusia produktif yang tidak memiliki pekerjaan tetap sebanyak 672 orang sehingga jumlah keluarga pra sejahtera yang ada di desa Sumberpasir sebanyak 620 keluarga. melihat banyaknya pengangguran di desa tsb, maka peran Pemerintah Desa Sumberpasir untuk meminimalisir dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka dilakukan program pemberdayaan salah satunya melalui program peningkatan ekonomi produktif yang melibatkan masyarakat desa Sumberpasir.

Sebagai pembinaan dan pengkoordinasi jalannya roda pemerintahan ,maka Pemerintah Desa Sumberpasir melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengaktifan kelembagaan Unit Pengelola Keuangan (UPK), peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, peningkatan ekonomi produktif masyarakat. Program peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan meliputi : pelaksanaan kerja bakti, perlombaan desa, musrenbang desa serta pembangunan Fisik, sedangkan dalam program peningkatan ekonomi produktif melalui

pemberian pelatihan keterampilan bordir serta pelatihan pembuatan pande besi. Selain itu pemerintah desa Sumberpasir melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui sosialisasi serta MUSBANGDES terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan, dengan adanya hal tersebut maka pemerintah desa Sumberpasir dapat menetapkan kebijakan, program-program dan kegiatan yang sesuai dengan situasi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. sehingga dengan adanya peran Pemerintah Desa tersebut pada tahun 2011 desa Sumberpasir masuk dalam seleksi lokasi desa mandiri oleh Bidang PKP Bapemas Provinsi Jawa Timur ([bapemas.jatimprov.go.id](http://bapemas.jatimprov.go.id))

Akan tetapi, dalam melakukan upaya untuk memberdayakan masyarakat desa, Pemerintah Desa Sumberpasir banyak mengalami kendala-kendala salah satunya kurang partisipasi dan budaya malas yang ada dalam diri masyarakat desa Sumberpasir. dalam kenyataannya dalam bentuk kegiatan pemberdayaan seperti pemberian pelatihan-pelatihan wirausaha maupun pelatihan membordir yang dilakukan oleh Pemerintah desa Sumberpasir dengan pihak disperindag, masyarakat mengikuiti akan tetapi hasil pelatihan yang diberikan tidak dilaksanakan dengan baik. dan segala bentuk rencana kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah desa Sumberpasir, masyarakat sering merespon akan tetapi masyarakat masih merasa malu dan tidak berani dalam menyampaikan pendapatnya melalui kegiatan resmi seperti musyawarah baik ditingkat dusun maupun ditingkat desa, hal ini menunjukkan bahwa Keadaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa masih tergolong rendah dan belum merata.

Dari Latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan peneliti terhadap pemerintah desa di desa Sumberpasir, karena sesuai dengan tema yang diambil yaitu pemberdayaan masyarakat desa dalam pembangunan, maka peneliti mengambil judul tentang **“Peran Pemerintah Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Peran Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat di Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang?
2. Apa saja upaya yang dilakukan Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat di Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang?
3. Apa saja tahap-tahap pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat di Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang?
4. Faktor pendukung dan penghambat Peran Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat khususnya di Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Aktivitas yang dilakukan oleh peneliti mempunyai tujuan yang hendak dicapai yaitu untuk dijadikan standart agar apa yang diharapkan dapat sesuai

dengan kenyataan yang dihadapi. Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Peran Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat di Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat desa di Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang.
3. Untuk mengetahui tahap-tahap apa saja yang dilakukan Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat desa khususnya di Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang
4. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Peran Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat desa khususnya di Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang

#### **E. Kontribusi Penelitian.**

Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan diatas, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan dan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis
  - a. Dapat digunakan sebagai sumber informasi yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang berhubungan dengan bidang kajian administrasi publik, khususnya pengembangan Teori Pemberdayaan Masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- b. Dapat digunakan sebagai sumbangan bahan referensi bagi calon peneliti berikutnya yang mempelajari fenomena yang sama.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi pemerintah desa dalam mengevaluasi keberhasilan serta kendala-kendala yang dihadapi untuk pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat di masa-masa mendatang, khususnya desa Sumberpasir.

## 3. Manfaat Peneliti

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dalam menerapkan teori yang telah diterima selama menempuh pendidikan dengan kenyataan yang terjadi dalam dunia kerja.

## **F. Sistematika Penulisan.**

Untuk mempermudah pembahasan, penulis menyusun sistematika penelitian agar pembaca mampu dengan mudah memahami isi dan makna yang terkandung serta memahami maksud dan tujuan dari penyusunan skripsi ini serta pada akhirnya nampak secara garis besar isi dan pemikiran dari tulisan ini. Dalam penelitian ini mencakup beberapa Bab yaitu :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Merupakan Bab yang akan memberikan penjelasan tentang subbab-subbab Pendahuluan yang memuat latar belakang,

perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, serta sistematika penelitian.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan Bab Tinjauan Pustaka yang mengurai tentang beberapa konsep-konsep, teori, karya ilmiah dan pendapat dari para ahli yang mendukung serta mempermudah pembahasan terhadap permasalahan yang timbul serta pemecahan terhadap permasalahan yang ada yaitu : Pemerintahan Desa, pengertian Desa, Kepala Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Merupakan Bab Metode Penelitian yang menerangkan mengenai Jenis Penelitian, Fokus Penelitian, Lokasi Penelitian dan Situs Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Instrumen Penelitian.

## **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menyajikan pengolahan dan analisa data yang telah diperoleh selama penelitian serta penjelasan hasil analisis tersebut. Bab ini meliputi gambaran umum desa, penyajian data, analisis dan interpretasi data yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan yang diambil berdasarkan uraian dan hasil analisis pada bab sebelumnya serta berisi saran yang

diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Kepala Desa agar  
Dapat Memberdayakan Masyarakat Desa dalam Pelaksanaan  
Pembangunan Pedesaan



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Administrasi

##### 1. Pengertian Administrasi

Istilah administrasi berasal dari bahasa latin yaitu “*Ad*” dan “*ministrare*” yang artinya pemberian jasa atau bantuan, yang dalam bahasa Inggris disebut “*Administration*” artinya “*To Serve*”, yaitu melayani dengan sebaik-baiknya.

Pendapat lain mengenai administrasi dikemukakan oleh Sondang P. Siagian (1994:3) mengemukakan “Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara 2 orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya

Selain itu menurut Simon sebagaimana dikutip Handyaningrat (1996:2) mengemukakan “*administration is the activities of groups cooperating to accomplish common goals*” (Administrasi sebagai kegiatan daripada kelompok yang mengadakan kerjasama untuk menyelesaikan tujuan bersama). Berdasarkan definisi administrasi sebagaimana dikemukakan di atas Handyaningrat (1996:3) mengemukakan bahwa administrasi mengandung ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Adanya kelompok manusia, yaitu kelompok yang terdiri atas 2 orang atau lebih
- b) Adanya kerjasama dari kelompok tersebut
- c) Adanya kegiatan/proses/usaha
- d) Adanya bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan
- e) Adanya tujuan

## 2. Pengertian Administrasi Pembangunan

Menurut pendapat Siagian (2007: 4) administrasi pembangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

“Administrasi pembangunan mencakup dua pengertian yaitu administrasi dan pembangunan. Yang dimaksud dengan administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan pembangunan adalah usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa”

Dari penjelasan diatas maka administrasi pembangunan dapat di definisikan sebagai “seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara, bangsa untuk tumbuh, berkembang dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara, bangsa yang bersangkutan dalam pencapaian tujuan akhirnya” (Siagian, 2007:5)

Menurut Tjokroamidjojo (1974:9-10) menyimpulkan ciri-ciri dari administrasi pembangunan diantaranya:

- a. Lebih memberikan perhatian terhadap lingkungan masyarakat yang berbeda-beda terutama bagi lingkungan masyarakat negara-negara berkembang.
- b. Administrasi pembangunan mempunyai peran aktif dan berkepentingan terhadap tujuan-tujuan pembangunan baik dalam perumusan kebijakannya maupun pelaksanaannya yang efektif.
- c. Berorientasi kepada usaha-usaha yang mendorong perubahan-perubahan ke arah keadaan yang dianggap lebih baik untuk suatu masyarakat di masa yang akan datang.

- d. Lebih berorientasi kepada pelaksanaan tugas-tugas pembangunan dari pemerintah.
- e. Administrasi pembangunan harus mengaitkan diri dengan substansi perumusan kebijakan dan pelaksanaan tujuan-tujuan pembangunan di berbagai bidang.
- f. Dalam administrasi pembangunan, administrator dalam aparatur pemerintah juga bisa merupakan penggerak perubahan.
- g. Lebih berpendekatan lingkungan, berorientasi pada kegiatan dan bersifat pemecahan masalah.

Berdasarkan ciri-ciri di atas, ruang lingkup administrasi pembangunan mempunyai dua fungsi utama yaitu: sebagai penyusun kebijaksanaan penyempurnaan administrasi negara (*the development of administration*) serta perumusan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-program pembangunan di berbagai bidang serta pelaksanaannya secara efektif (*the administration of development*). Sedangkan administrasi untuk pembangunan di bagi dalam dua sub fungsi yaitu perumusan kebijaksanaan pembangunan dan yang kedua adalah pelaksanaan daripada kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut secara efektif. (Tjokroamidjojo, 1994:14).

### 3. Pengertian Pembangunan

Pembangunan pada dasarnya merupakan suatu usaha perubahan untuk mengembangkan diri pada suatu keadaan dan sifat tradisional menuju kearah yang lebih baik, hal ini umumnya dikenal di negara-negara berkembang sebagai suatu proses perubahan sosial yang besar.

Menurut S.P. Siagian (2000:2) mengartikan pembangunan ialah sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha atau pertumbuhan dan perubahan yang sederhana yang dilakukan secara sadar oleh suatu Bangsa, Negara, dan Pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan Bangsa. Sedangkan menurut Bintoro Tjokroamidjojo (2001:113) bahwa pembangunan merupakan suatu proses pembaharuan yang kontinue dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang lebih baik.

Sedangkan menurut Coralie Bryant dan Louise White (1982:14) pembangunan ialah upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depannya. Ada lima implikasi utama definisi tersebut.

1. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia, baik individu maupun kelompok (*capacity*)
2. Pembangunan berarti mendorong tubuhnya kebersamaan dan pemerataan nilai dan kesejahteraan (*equity*)
3. Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih, dan kekuasaan untuk memutuskan (*empoworment*)
4. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri (*sustainability*)
5. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan negara yang satu dengan negara lain dan menciptakan hubungan saling menguntungkan dan saling menghormati (*interdependence*).

#### 4. Program Pembangunan

Program pembangunan merupakan suatu rencana operasional tahunan yang akan memuat program-program sektoral tertentu yang dimaksud untuk mendukung pencapaian tujuan rencana. Suatu program yang dianggap baik seringkali mempunyai unsur inovatif (pembaharuan), adanya suatu inisiatif baru, pendekatan eksperimental dan aplikasi-aplikasi gagasan baru. Program-program juga dipergunakan untuk memecahkan masalah. Keadaan-keadaan yang merupakan hambatan-hambatan atau kelemahan-kelemahan dalam masyarakat, sering ditanggulangi dengan suatu program. Memulai suatu program, dapat menarik perhatian dan dukungan dari masyarakat kemudian mengembangkan motivasi dan inisiatif (Tjokroamidjojo, 1971:195-196).

Selain itu menurut Tjokroamidjojo suatu program yang baik harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Tujuan yang dirumuskan cukup jelas.
2. Penentuan peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut.
3. Suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten dan atau proyek-proyek yang saling berkaitan untuk mencapai program seefektif mungkin.
4. Pengukuran dengan ongkos-ongkos yang diperkirakan dan keuntungan-keuntungan yang diharapkan akan dihasilkan program tersebut.
5. Hubungan dengan kegiatan-kegiatan lain dalam usaha pembangunan dan program pembangunan lainnya. Suatu program pembangunan tidak berdiri.

6. Berbagai upaya dibidang manajemen, termasuk penyediaan tenaga, pembiayaan, dan lain-lain untuk melaksanakan program tersebut (Tjokroamidjojo, 1974:195-196).

## **B. Desa**

### **1. Pengertian Desa**

Dapat kita ketahui bahwa Bangsa Indonesia memiliki sifat yang beranekaragam, hal ini menyebabkan terdapat bermacam-macam sebutan untuk pengertian yang sama di masing-masing wilayah, termasuk di dalamnya terdapat bermacam-macam istilah untuk pengertian Desa. Pengertian tentang Desa menurut Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat 5, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya menurut Bouman (dalam Beratha, 1982:26) mengemukakan bahwa:

“Desa adalah sebagai salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal; kebanyakan yang termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan dan sebagainya, usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan pada tradisi dan kaidah-kaidah sosial”.

Sedangkan pengertian desa ditinjau dari segi politik dan segi hukum adalah suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politis mempunyai wewenang tertentu dalam struktur pemerintahan Negara.

Dengan sudut pandang ini maka desa dapat dipilah dalam beberapa unsur penting yaitu :

- a. Adanya orang-orang atau sekelompok orang.
- b. Adanya pihak-pihak yang menjadi “penguasa” atau “pemimpin” (pengambil keputusan).
- c. Adanya organisasi (badan penyelenggara kekuasaan).
- d. Adanya mekanisme, tata aturan dan nilai, yang menjadi landasan dalam proses pengambilan keputusan. (Tim lappera, 2003:5)

Dari beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa desa merupakan sebagai kesatuan dari masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten. Dengan karakteristiknya yang terdiri dari kondisi alam yang potensial untuk kawasan pertanian serta susunan fungsi sebagai tempat tinggal pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi berdasarkan tipologi masing-masing desa.

## **2. Pembentukan Desa**

Pembentukan desa adalah pengabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih. Pembentukan desa bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuannya (Adisasmita, 2006:122). dengan adanya otonomi daerah memberikan kesempatan

luas terhadap pemerintahan ditingkat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahan serta mengelolah sumber daya yang dimiliki.

Pembentukan Desa terjadi disamping melalui prakarsa masyarakat juga memperhatikan 2 (dua) hal penting.

a. Asal-usul Desa.

Dapat dipahami sebagai asal mula desa berstatus yang menjadi wilayah suatu Desa, kemudian statusnya meningkat menjadi suatu Desa. Atau dapat dikatakan wilayah baru yang didiami sejumlah penduduk yang baru ditransmigrasikan secara keseluruhan kepada Desa tersebut. Syarat pembentukan desa dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005, diantaranya :

1. Jumlah penduduk;
2. Luas wilayah;
3. Bagian wilayah Kerja;
4. Perangkat; dan
5. Sarana dan prasarana pemerintahan dan perangkat.

Pembentukan desa dapat berupa :

1. Penggabungan beberapa desa;
2. Penggabungan bagian desa yang bersandingan;
3. Pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih;
4. Pembentukan desa di luar desa di luar desa yang sudah ada.

b. Kondisi sosial budaya masyarakat setempat

Desa yang kondisi masyarakatnya dan wilayahnya tidak memenuhi persyaratan dapat dihapus. Dalam PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 2 ayat (5) menyatakan desa yang kondisi masyarakatnya dan wilayahnya tidak memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung sesuai dengan potensi dan kondisi desa. Apabila terjadi suatu Desa dihapus, kemudian digabungkan dengan desa yang lain (desa tetangga), bersama-sama membentuk suatu Desa yang baru dengan nama yang baru pula.

Motif mengapa suatu Desa digabung dengan Desa lain, tidak begitu urgen selama itu tidak menurunkan efisiensi pemerintahan. Artinya bahwa penghapusan dan penggabungan Desa tidak di dasarkan atas pertimbangan-pertimbangan subjektif tapi dilakukan atas dasar objektivitas fakta lapangan seperti kepadatan penduduk dan pelayanan, pengembangan Desa dan ekonomi desa atau perencanaan tata ruang wilayah pemerintah kabupaten umumnya.

Pembentukan kawasan desa swasembada sebagai dukungan terhadap perkembangan desa agar lebih modern, harus memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

1. Mulai ada pengaruh pembaharuan
2. Adat istiadat tidak terlalu mengikat
3. Teknologi baru dalam lapangan pertanian benar-benar sudah dimanfaatkan, sehingga hasil produksinya tinggi
4. Taraf pendidikan sudah tinggi
5. Pemerintahan dan lembaga desa sudah berfungsi dengan baik

6. Prasarana desa sudah baik, sehingga perhubungan dengan kota menjadi lancar (C.S.T. Kansil,1984:83)

### 3. Kewenangan Desa

Kewenangan desa dapat dibagi menjadi dua yaitu kewenangan delegatif dan kewenangan atributif . kewenangan delegatif adalah kewenangan yang merupakan pengakuan, jadi otonomi desa secara pengakuan merupakan otonomi yang mandiri, sedangkan kewenangan atributif adalah kewenangan pemberian yang artinya otonomi desa diberikan kewenangan sesuai dengan kemampuan desa tersebut.

Menurut Pasal 206 UU No.32 tahun 2004 menyatakan bahwa urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup :

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa.
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa.

PP No. 72 Tahun 2005 tentang desa, pasal 7 kewenangan desa, urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa, mencakup :

- a. Urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;

Yang dimaksud dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul desa adalah hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan seperti subak, jogoboyo, jogotiro, sasi, mapalus, kaolotan, kajaroan, dan lain-lain. Pemerintah daerah mengidentifikasikan jenis kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan mengembalikan kewenangan tersebut, yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kota.

- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.

Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan identifikasi, pembahasan dan penetapan jenis-jenis kewenangan yang diserahkan pengaturannya kepada desa, seperti kewenangan di bidang pertanian, pertambangan dan energi, kehutanan dan perkebunan, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan, sosial, pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup, perikanan, politik dalam negeri dan administrasi publik, otonomi desa, perimbangan keuangan, tugas pembantuan, pariwisata, pertanahan, kependudukan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, perencanaan, penerangan/informasi dan komunikasi.

- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Yang wajib disertai dengan dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia, dan berpedoman pada peraturan per Undang-Undangan Desa berhak menolak melaksanakan tugas pembantuan yang

tidak disertai dengan pembiayaan, prasarana dan sarana, serta sumber daya manusia.

- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan per Undang-Undangan diserahkan kepada desa.

#### 4. Pembangunan Desa

Pembangunan pada dasarnya adalah dari, oleh, dan untuk seluruh rakyat, oleh karena itu keterlibatan masyarakat mampu menentukan visi (wawasan) pembangunan masa depan yang akan diwujudkan. Pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, merupakan usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan pada potensi dan kemampuan pedesaan. Dalam pelaksanaannya, pembangunan pedesaan seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat yang maju, sejahtera dan makmur.

Menurut R.Bintoro (2003:25)

“Pembangunan Desa adalah pembangunan yang dilaksanakan di Wilayah Pemerintahan yang terendah, yaitu Desa dan Kelurahan, ciri utama pembangunan Desa yang terpenting adalah keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan di Desa itu atau Kelurahan baik melaksanakan langsung dalam bentuk swadaya mandiri atau gotong royong. Sasaran utamanya adalah menjadikan Desa-desanya diseluruh Indonesia memiliki tingkat perkembangan Desa dengan klasifikasi Desa swasembada yaitu Desa yang maju, dan berkembang dimana masyarakat memiliki taraf hidup dan kesejahteraan yang terus meningkat”.

Menurut Irawan dan M. Suparmoko (2002:201) menyatakan bahwa:

“Pembangunan masyarakat Desa adalah suatu proses dimana orang-orang disitu bersama-sama dengan pejabat-pejabat Pemerintahan berusaha untuk memperbaiki keadaan perekonomian sosial dan kebudayaan dalam

masyarakat yang bersangkutan mengintegrasikan masyarakat ini dalam kehidupan Bangsa dan Negara". Pembangunan masyarakat Desa meliputi dua unsur, yaitu ikut serta penduduk sendiri dalam usaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan dengan inisiatif mereka sendiri dibarengi dengan bantuan-bantuan teknik serta lain-lain bantuan sedemikian rupa sehingga memajukan inisiatif mereka sendiri dan saling membantu.

Talaziduhu Ndraha (2002:9) mengatakan bahwa:

"Pembangunan Desa adalah proses dengan mana usaha-usaha masyarakat Desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah, untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengintegrasikan kehidupan masyarakat Desa ke dalam kehidupan bangsa yang memungkinkan mereka untuk memberikan sumbangan sepenuhnya kepada pembangunan nasional".

#### Tiga Prinsip Pokok Pembangunan Desa

1. Kebijakan dan langkah-langkah pembangunan di setiap desa mengacu kepada pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan trilogi pembangunan,

Ketiga unsur Trilogi Pembangunan tersebut adalah:

- a. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.
  - b. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi .
  - c. Stabilitas yang sehat dan dinamis diterapkan di setiap sektor dan antar sektor di setiap daerah termasuk desa dan kota, di setiap wilayah dan antar wilayah saling terkait, serta dikembangkan secara selaras dan terpadu.
2. Pembangunan desa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan mensyaratkan setiap daerah lebih mengandalkan sumber-sumber alam yang terbaharui sebagai sumber pertumbuhan. Disamping itu setiap desa

perlu memanfaatkan sumber daya manusia secara luas, memanfaatkan modal fisik, prasarana mesin-mesin dan menggunakan peralatan seefisien mungkin.

3. Meningkatkan efisiensi masyarakat melalui kebijakan deregulasi, demokratisasi dan desentralisasi dengan sebaik-baiknya (Adisasmita,2006:h.3 dan h.20).

## C. Pemerintahan Desa

### 1. Pengertian Pemerintah Desa

Pemerintahan Desa menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan desa adalah “kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa dan Pemerintah Kelurahan”(A.W. Widjaja: 1983.19).

Pemerintah Desa mempunyai tugas membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, mengajukan rancangan peraturan desa dan menetapkannya sebagai peraturan desa bersama dengan BPD.

Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dinyatakan bahwa, Pemerintah Desa terdiri dari:

- a. Kepala Desa
- b. Perangkat Desa

Perangkat Desa tersebut terdiri dari:

1. Unsur staf, yaitu unsur pelayanan seperti sekretaris desa dan perangkat tata usaha

2. Unsur pelaksana, yaitu pelaksana teknis lapangan seperti urusan pamong tani desa dan urusan keamanan
3. Unsur wilayah, yaitu unsur pembantu kepala desa di wilayah bagian desa seperti kepala dusun. (A.W. Widjaja, 2003:47)

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pengaturannya berdasarkan pemikiran keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Untuk itu desa dibentuk suatu sistem Pemerintahan Desa dan Badan Perwakilan Desa atau sebutan lain yang merupakan mitra pemerintahan desa

Landasan pemikiran dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

1. *Keanekaragaman*, memiliki makna bahwa istilah Desa disesuaikan dengan asal-asal dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, sehingga dimungkinkan terjadi perubahan status desa dengan sebutan lain, seperti Nagari, Kampung Pekun, Hutan, Marga. Hal ini berarti pola penyelenggaraan pemerintahan desa akan menghormati system nilai masyarakat setempat, namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. *Partisipasi*, memiliki makna bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat merasa memiliki dan turut bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan terutama sebagai warga desa.
3. *Otonomi asli*, memiliki makna bahwa kewenangan Pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat, namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan modern.
4. *Demokratisasi*, memiliki makna bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasikan dan diagregasi melalui Badan Perwakilan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa.
5. *Pemberdayaan masyarakat*, memiliki makna bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa diartikan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan situasi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

## 2. Tugas Pemerintahan Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang terdapat pada Bab III mengenai Tugas Dan Kewenangan Desa sesuai Pasal 7 yakni mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, kemudian urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, dimana tugas pembantuan dari Pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Selain dari pada itu, Tugas dan Wewenang, Kewajiban serta Hak Kepala Desa Pasal 14 selaku Kepala Pemerintah desa yaitu (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- e. Membina kehidupan masyarakat desa;
- f. Membina perekonomian desa;
- g. Mengkoordinasikan pembangunan secara partisipatif;
- h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan.

Sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan di desa, mempunyai kewajiban memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, serta melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu, pemerintah desa juga memiliki tugas dan wewenang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, melaksanakan kehidupan demokrasi, melaksanakan prinsip tata pemerintah desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintah desa, menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.

Kemudian pemerintah desa menyelenggarakan administrasi pemerintah desa yang baik, melaksanakan dan bertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa, melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa, membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat; memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa dan mengembangkan potensi sumber daya alam serta melestarikan lingkungan hidup.

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan

pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada masyarakat. Laporan penyelenggaraan pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun. Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.

Selanjutnya Kepala Desa Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati/Walikota sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintah desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut. Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan kepada BPD.

#### **D. Pemberdayaan**

##### **1. Pengertian Pemberdayaan**

Pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari Bahasa Inggris, *power* diartikan sebagai kekuasaan atau kekuatan. Menurut Paul (1987) pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil (*equitable sharing of power*) sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan. Menurut Parsons,*et.al.* 1994 (dalam Suharto, 1997:210-224), pemberdayaan

adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

Sementara Hulme dan Turner (1990:214-215) berpendapat bahwa pemberdayaan mendorong terjadinya suatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yang tidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secara lokal maupun nasional. Oleh karena itu pemberdayaan sifatnya individual dan kolektif. Pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang menyangkut hubungan kekuasaan kekuatan yang berubah antar individu, kelompok dan lembaga.

Menurut Talcot Parsons (dalam Prijono, 1996:64-65) kekuatan merupakan sirkulasi dalam subsistem suatu masyarakat, sedangkan kekuatan dalam pemberdayaan adalah daya, sehingga pemberdayaan dimaksudkan sebagai kekuatan yang berasal dari bawah. Pemberdayaan ini memiliki tujuan dua arah, yaitu melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan dan memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur kekuasaan. Keduanya harus ditempuh dan menjadi sasaran dari upaya pemberdayaan. Sehingga perlu dikembangkan pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan masyarakat.

Pemberdayaan lebih mudah dijelaskan pada saat manusia dalam keadaan *powerlessness* (baik dalam keadaan aktual atau sekedar perasaan), tidak berdaya,

tidak mampu menolong diri sendiri, kehilangan kemampuan untuk mengendalikan kehidupan sendiri (Priyono, 1996:54). Selain itu pemberdayaan adalah sebuah proses dimana orang menjadi cukup kuat untuk, berpartisipasi dalam berbagi pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya.

## 2. Konsep Pemberdayaan

Konsep pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Pearson et al, 1994 :106). Pemberdayaan mempunyai tiga dimensi yang saling berpotongan dan berhubungan, sebagaimana yang disimpulkan oleh Kieffer (1984:65) dari penelitiannya, yaitu:

1. Perkembangan konsep diri yang lebih positif;
2. Kondisi pemahaman yang lebih kritis dan analitis mengenai lingkungan sosial dan politis; dan
3. Sumber daya individu dan kelompok untuk aksi-aksi sosial maupun kelompok.

Menurut Friedmann (1992:126) konsep pemberdayaan diartikan sebagai alternatif pembangunan yang menekankan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat yang berlandaskan pada sumber daya pribadi, baik melalui partisipasi, demokrasi maupun pembelajaran sosial. Dimana dalam pemberdayaan yang menjadi titik fokusnya adalah lokalitas, sebab “*civil society*” akan merasa siap diberdayakan melalui isu-isu lokal, tetapi hal ini tidak akan

menjadi tidak realistis apabila kekuatan-kekuatan ekonomi dan struktur-struktur diluar *civil society* diabaikan.

Grand Theories dari konsep pemberdayaan ini mengacu pada pengaruh Marx mengenai ada yang berkuasa dan ada juga dikuasai ada perbedaan kelas semisal majikan dan buruh, distribusi pendapatan yang tidak merata sampai kekuatan ekonomi yang merupakan dasar dari pemberdayaan (Priyono, 1996:54-55).

Konsep Pemberdayaan, tidak dapat dipisahkan dengan konsep sentral, yaitu konsep power (daya). Menurut Suriadi (2005:54-55) pengertian pemberdayaan terkait dengan konsep power dapat ditelusuri dari 4 sudut pandang/perspektif yaitu *pluralis, elitis, strukturalis, dan post strukturalis*.

1. *Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari pespektif pluralis*, adalah suatu proses untuk menolong kelompok-kelompok masyarakat dan individu yang kurang beruntung untuk bersaing secara lebih efektif dengan kepentingan-kepentingan lain dengan jalan menolong mereka untuk belajar, menggunakan keahlian dalam melobi, menggunakan media yang berhubungan dengan tindakan politik, memahami bagaimana bekerjanya sistem (aturan main), dan sebagainya. Oleh karenanya, diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat untuk bersaing sehingga tidak ada yang menang atau kalah. Dengan kata lain pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk mengerjakan kelompok atau individu bagaimana bersaing di dalam peraturan.

2. *Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif elitis* adalah suatu upaya untuk bergabung dan mempengaruhi para elitis, membentuk aliansi dengan elitis, melakukan konfrontasi dan mencari perubahan pada elitis, masyarakat menjadi tak berdaya karena adanya power dan kontrol yang besar sekali dari para elitis terhadap media, pendidikan, para politik, kebijakan publik, birokrasi, parlemen dan sebagainya.
3. *Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif struktualis* adalah suatu agenda yang lebih menantang dan dapat dicapai apabila bentuk-bentuk ketimpangan struktural dieliminir. Masyarakat tak berdaya suatu bentuk struktur dominan yang menindas masyarakat, seperti masalah kelas, gender, ras atau etnik. Dengan kata lain pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pembebasan, perubahan struktural secara fundamental, menantang penindasan struktural
4. *Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif post struktural* adalah suatu proses yang menantang dan mengubah diskursus. Pemberdayaan lebih ditekankan pertama-tama pada aspek intelektualitas ketimbang aktifitas aksi, atau pemberdayaan masyarakat adalah upaya pengembangan pengertian terhadap pengembangan pemikiran baru, analitis, dan pendidikan dari pada suatu aksi.

Sementara menurut Suprpto (2000: 79), konsep pemberdayaan apabila dikaji lebih mendalam terdapat muatan dasar yang terdiri dari:

1. *Growth Strategy*, dimana dalam pelaksanaan pembangunan lebih dirasakan pada strategi pembangunan dengan perhitungan GNP dalam menilai keberhasilan suatu negara.
2. *Employment Program*, yang lebih banyak melihat pada analisis tenaga kerja.
3. *Basic Need Strategy*, yang lebih mengarah pada pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat.

### 3. Prinsip dan Dasar Pemberdayaan

Prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat menurut Drijver dan Sajise (dalam Sutrisno, 2005:18) ada lima macam, yaitu:

1. Pendekatan dari bawah (*bottom up approach*): pada kondisi ini pengelolaan dan para *stakeholder* setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.
2. Partisipasi (*participation*): dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan.
3. Konsep keberlanjutan: merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapat diterima secara sosial dan ekonomi.
4. Keterpaduan: yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal, regional dan nasional.
5. Keuntungan sosial dan ekonomi: merupakan bagian dari program pengelolaan.

Sedangkan dasar-dasar pemberdayaan masyarakat adalah: mengembangkan masyarakat khususnya kaum miskin, kaum lemah dan kelompok terpinggirkan, menciptakan hubungan kerjasama antara masyarakat dan lembaga-lembaga pengembangan, memobilisasi dan optimalisasi penggunaan sumber daya secara keberlanjutan, mengurangi ketergantungan, membagi kekuasaan dan tanggung jawab, dan meningkatkan tingkat keberlanjutan Delivery (dalam Sutrisno, 2005:17).

#### **4. Proses dan Upaya Pemberdayaan**

Menurut Suharto (2006:59) pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, terutama individu-individu yang mengalami kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator sebuah keberhasilan pemberdayaan.

Proses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun kolektif (kelompok). Proses ini merupakan wujud perubahan sosial yang menyangkut relasi atau hubungan antara lapisan sosial yang dicirikan dengan adanya polarisasi

ekonomi, maka kemampuan individu “senasib” untuk saling berkumpul dalam suatu kelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif (Friedman, 1993). Hal tersebut dapat dicapai melalui proses dialog dan diskusi di dalam kelompoknya masing-masing, yaitu individu dalam kelompok belajar untuk mendeskripsikan suatu situasi, mengekspresikan opini dan emosi mereka atau dengan kata lain mereka belajar untuk mendefinisikan masalah, menganalisis, kemudian mencari solusinya.

Proses pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan secara bertahap melalui tiga fase (Pranarka dan Pujiono, 1996:2) yaitu:

1. *Fase inisiasi* adalah bahwa semua proses pemberdayaan berawal dari pemerintah diperuntukkan bagi masyarakat. masyarakat hanya melaksanakan apa yang direncanakan dan diinginkan oleh pemerintah dan tetap bergantung pada pemerintah.
2. *fase partisipatoris* adalah bahwa proses pemberdayaan berasal dari pemerintah bersama masyarakat, oleh pemerintah dan masyarakat. pada fase ini masyarakat sudah dilibatkan secara aktif dalam kegiatan pembangunan untuk menuju kemandirian.
3. *Fase emansipatoris* adalah bahwa proses pemberdayaan berasal dari rakyat dan untuk rakyat dengan di dukung oleh pemerintah bersama masyarakat. pada fase emansipatoris ini masyarakat sudah dapat menemukan kekuatan dirinya sendiri sehingga dapat dilakukan dalam mengaktualisasikan dirinya.

Menurut Kartasasmita (1995:19), upaya memberdayakan rakyat harus dilakukan melalui tiga cara:

1. Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Disini titik tolaknya bahwa manusia dan masyarakat memiliki potensi (daya) yang dapat dikembangkan, sehingga pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memberikan motivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
2. Memperkuat potensi yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan sarana dan prasarana baik fisik (irigasi, jalan dan listrik) maupun sosial (sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses masyarakat lapisan bawah. Terbukanya akses pada berbagai peluang akan membuat rakyat makin berdaya, seperti tersedianya lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di pedesaan.
3. Melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah atau makin terpinggirkan menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam pemberdayaan masyarakat. Melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah.

## 5. Teknik dan Pola Pendekatan Pemberdayaan

Teknik pemberdayaan masyarakat saat ini sangat diperlukan semua pihak, karena banyak proyek-proyek pembangunan yang berasal dari pemerintah atau dari luar komunitas masyarakat setempat mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut biasanya karena tidak pernah mengikut sertakan partisipasi masyarakat (*top down*), sehingga si pemberi proyek tidak mengetahui secara pasti kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya. Oleh sebab itu sudah saatnya potensi masyarakat didaya gunakan yaitu bukan hanya dijadikan obyek tetapi subyek atau dengan kata lain memanusiakan masyarakat sebagai pelaku pembangunan yang aktif.

Menurut Adimihardja dan Harry (2001:15) konsep gerakan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan adalah mengutamakan inisiatif dan kreasi masyarakat dengan strategi pokok memberi kekuatan kepada masyarakat (dari, oleh, dan untuk masyarakat). dan salah satu cara yang dipakai dalam teknik pemberdayaan ialah: *Participatory Rural Appraisal (PRA)*. Lebih lanjut Harry menyatakan bahwa untuk memasyarakatkan gerakan pemberdayaan ada beberapa aspek dan tingkatan yang perlu diperhatikan, seperti: (1) Perumusan konsep, (2) Penyusunan model, (3) Proses perencanaan, (4) Pemantauan dan penilaian hasil pelaksanaan dan (5) Pengembangan pelestarian gerakan pemberdayaan.

Menurut Wahab dkk. (2002: 81-82) ada 3 (tiga) pendekatan yang dapat dilakukan dalam *empowerment*, yaitu:

1. *The welfare approach*, pendekatan ini mengarahkan pada pendekatan manusia dan bukan memperdaya masyarakat dalam menghadapi proses politik dan kemiskinan rakyat, tetapi justru untuk memperkuat

keberdayaan masyarakat dalam pendekatan *centrum of power* yang dilatarbelakangi kekuatan potensi lokal masyarakat.

2. *The development approach*, pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan proyek pembangunan untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian dan keberdayaan masyarakat.
3. *The empowerment approach*, pendekatan yang melihat bahwa kemiskinan sebagai akibat dari proses politik dan berusaha memberdayakan atau melatih rakyat untuk mengatasi ketidak berdayaan.

Sedangkan menurut Suharto (1997:218-219), pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat dapat dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang disingkat menjadi 5P, yaitu:

1. Pemungkinan; menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
2. Penguatan; memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian.
3. Perlindungan; melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok yang kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang antara yang kuat dan yang

lemah dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.

4. Penyokongan; memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
5. Pemeliharaan; memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

#### **6. Tahap Pemberdayaan**

Sulistiyani (2004:83-84) menyatakan bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui meliputi :

1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan pemberian keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.

3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan untuk mengantarkan pada kemandirian.

Selanjutnya dikemukakan serangkaian tahapan yang harus ditempuh melalui pemberdayaan tersebut, dalam table di bawah ini :

**Tabel 1**  
**Tahapan Tingkat Keberdayaan Masyarakat**

TAHAPAN AFEKTIF	TAHAPAN KOGNITIF	TAHAPAN PSIKOMOTORIK	TAHAPAN KONATIF
Belum merasa sadar dan peduli	Belum memiliki wawasan pengetahuan	Belum memiliki ketrampilan dasar	Tidak berperilaku Membangun
Tumbuh rasa kesadaran dan kepedulian	Menguasai pengetahuan dasar	Menguasai ketrampilan dasar	Bersedia terlibat dalam pembangunan
Memupuk semangat kesadaran dan kepedulian	Mengembangkan pengetahuan dasar	Mengembangkan ketrampilan dasar	Berinisiatif untuk mengambil peran dalam pembangunan
Merasa membutuhkan Kemandirian	Mendalami pengetahuan pada tingkat lebih tinggi	Memperkaya variasi Ketrampilan	Berposisi secara mandiri untuk membangun diri dan lingkungan

Sumber: Sulistiyani, 2004

Sedangkan menurut Tim Delivery (2004) menawarkan tahapan-tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dimulai dari proses seleksi lokasi sampai dengan pemandirian masyarakat. Secara rinci masing-masing tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tahap 1. Seleksi lokasi
2. Tahap 2. Sosialisasi pemberdayaan masyarakat
3. Tahap 3. Proses pemberdayaan masyarakat
  - a. Kajian keadaan pedesaan partisipatif
  - b. Pengembangan kelompok
  - c. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan
  - d. Monitoring dan evaluasi partisipatif
4. Tahap 4. Pemandirian masyarakat

### **7. Aktor dalam Pemberdayaan Masyarakat**

Peran pemerintah pada umumnya berada pada posisi fasilitasi terhadap jalannya proses pemberdayaan masyarakat dengan baik. Fasilitas tersebut dapat berupa kebijakan politik, kebijakan umum, kebijakan sektoral/ departemantal, maupun batas-batas normatif lain. Disamping peran pemerintah, hendaknya swasta juga dilibatkan. Peran swasta biasanya pada segi operasional atau implementasi kebijakan, kontribusi tenaga ahli, tenaga terampil maupun sumbangan dana, alat atau teknologi. Sedangkan peran masyarakat pada umumnya disampaikan dalam bentuk partisipasi non mobilisasi. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat dirancang kontribusi masing-masing aktor, yaitu: pemerintah, swasta dan masyarakat sehingga terbentuk model kemitraan yang

diharapkan (Sulistiyani, 2004). Rancangan peran ketiga aktor tersebut tampak pada tabel berikut:

**Tabel 2**  
**Peran Tiga Aktor Dalam Pemberdayaan Masyarakat**

Aktor	Peran dalam Pemberdayaan	Bentuk Output Peran	Fasilitasi
Pemerintah	Formulasi dan penetapan kebijakan, implementasi, <i>monitoring</i> dan evaluasi mediasi.	Kebijakan: politik, umum, khusus/departemen/sektoral penganggaran, juknis dan juklak, penetapan indikator keberhasilan peraturan hukum, penyelesaian sengketa.	Dana, jaminan, alat, teknologi network, sistem manajemen informasi, edukasi.
Swasta	Kontribusi pada formulasi, implementasi, <i>monitoring</i> dan evaluasi.	Konsultasi dan rekomendasi kebijakan, tindakan dan langkah/kebijakan aksi implementasi, donatur, <i>private investment</i> pemeliharaan.	Dana, alat, teknologi, tenaga ahli dan dan sangat terampil.
Masyarakat	Partisipasi dalam formulasi, implementasi, <i>monitoring</i> dan evaluasi.	Saran, input, kritik, rekomendasi, keberatan, dukungan dalam formulasi kebijakan, dana swadaya, menjadi objek, partisipan, pelaku utama/ subjek, menghidupkan fungsi sosial kontrol.	Tenaga terdidik, tenaga terlatih, setengah terdidik dan setengah terlatih.

## 8. Elemen Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Bartle (2002), ada 16 (enam belas) elemen kekuatan atau pemberdayaan masyarakat yang dapat digunakan untuk menilai proses pemberdayaan masyarakat, yaitu:

1. Mendahulukan kepentingan umum, yaitu porsi dan tingkat kesiapan individu mengorbankan kepentingan mereka sendiri untuk kepentingan seluruh masyarakat (yang terlihat dari tingkat kedermawanan, kemanusiaan, individu, pengorbanan personal, kebanggaan masyarakat, saling mendukung, setia, peduli, persahabatan, persaudaraan).
2. Kesamaan nilai, yaitu tingkatan dimana anggota masyarakat membagi nilai, khususnya ide yang berasal dari anggota masyarakat yang menggantikan kepentingan anggota dalam masyarakat.
3. Layanan masyarakat, yaitu fasilitas dan layanan (seperti jalan, pasar, air minum, jalur pendidikan, layanan kesehatan), yang dipelihara secara berkelanjutan dan tingkat akses semua anggota masyarakat pada semua fasilitas dan layanan.
4. Komunikasi dalam masyarakat, dan diantara masyarakat dengan pihak luar. Komunikasi termasuk jalan, metode elektronika (seperti telpon, radio, TV, internet), media cetak (koran, majalah, buku), jaringan kerja, bahasa yang dapat saling dimengerti, kemampuan tulis baca serta kemampuan berkomunikasi secara umum.
5. Percaya diri, meskipun percaya diri diekspresikan secara individual, namun seberapa banyak rasa percaya diri itu dibagikan diantara semua

masyarakat? misalnya suatu kesepakatan dimana masyarakat dapat memperoleh harapan, sikap positif, keinginan, motivasi diri, antusiasme, optimisme, mandiri, keinginan untuk memperjuangkan haknya, menghindari sikap masa bodoh dan pasrah, dan memiliki tujuan terhadap sesuatu yang mungkin dicapai.

6. Keterkaitan (politis dan administrative), suatu lingkungan yang mendukung penguatan yang bersifat politis (termasuk nilai dan sikap pemimpin nasional, hukum dan legislatif) dan elemen administratif (sikap dari pegawai dan teknisi sipil, sebaik peraturan dan prosedur pemerintah), dan lingkungan hukum.
7. Informasi, kemampuan untuk mengolah dan menganalisa informasi, tingkat kepedulian, pengetahuan dan kebijaksanaan yang ditemukan diantara individu dan dalam kelompok secara keseluruhan terhadap informasi lebih efektif dan berguna, tidak sekedar volume dan besaran.
8. Rintangan, pengembangan dan efektivitas pergerakan (perpindahan, pelatihan manajemen, munculnya kepedulian, rangsangan) apakah ditujukan pada perkuatan masyarakat? Apakah sumber dana dari dalam dan luar meningkatkan tingkat kebergantungan dan kelemahan masyarakat, atau menantang masyarakat untuk bertindak menjadi lebih kuat? Dan apakah rintangan itu bersifat berkelanjutan atau bergantung pada sepanjang pengambilan keputusan oleh pendonor dari luar yang memiliki sasaran dan agenda yang berbeda dari masyarakat itu sendiri.

9. Kepemimpinan, pemimpin-pemimpin memiliki kekuatan, pengaruh, dan kemampuan untuk mengerakkan masyarakat. Pemimpin yang paling efektif dan berkelanjutan adalah salah satu yang menyerap aspirasi masyarakat, memiliki kedudukan dan penentu kebijakan. Pemimpin harus memiliki keahlian, kemauan, kejujuran dan beberapa kharisma.
10. Jaringan kerja, tidak hanya apa masyarakat ketahui tapi juga siapa diketahui. Apakah anggota masyarakat atau khususnya pemimpin mereka mengetahui orang-orang (dan badan atau organisasi mereka) yang dapat menyediakan sumber yang bermanfaat yang akan memperkuat masyarakat secara keseluruhan? Serta memanfaatkan hubungan, potensi dan kebenaran, dalam masyarakat dan dengan yang lainnya di luar masyarakat.
11. Organisasi, adalah kondisi bukan sebatas perkumpulan individu, melainkan hingga integritas organisasi, struktur, prosedur, pengambilan keputusan, proses, efektifitas, divisi tenaga kerja dan kelengkapan peran dan fungsi.
12. Kekuatan politik, tingkatan dimana masyarakat dapat berperan dalam pengambilan keputusan daerah dan nasional. Namun sebagai individu yang memiliki kekuatan yang beragam dalam suatu masyarakat, sehingga masyarakat memiliki kekuatan dan pengaruh yang beragam dalam daerah dan nasional.
13. Keahlian, kemampuan (kemampuan teknis, kemampuan manajemen, kemampuan berorganisasi, kemampuan mengarahkan) yang ditunjukkan

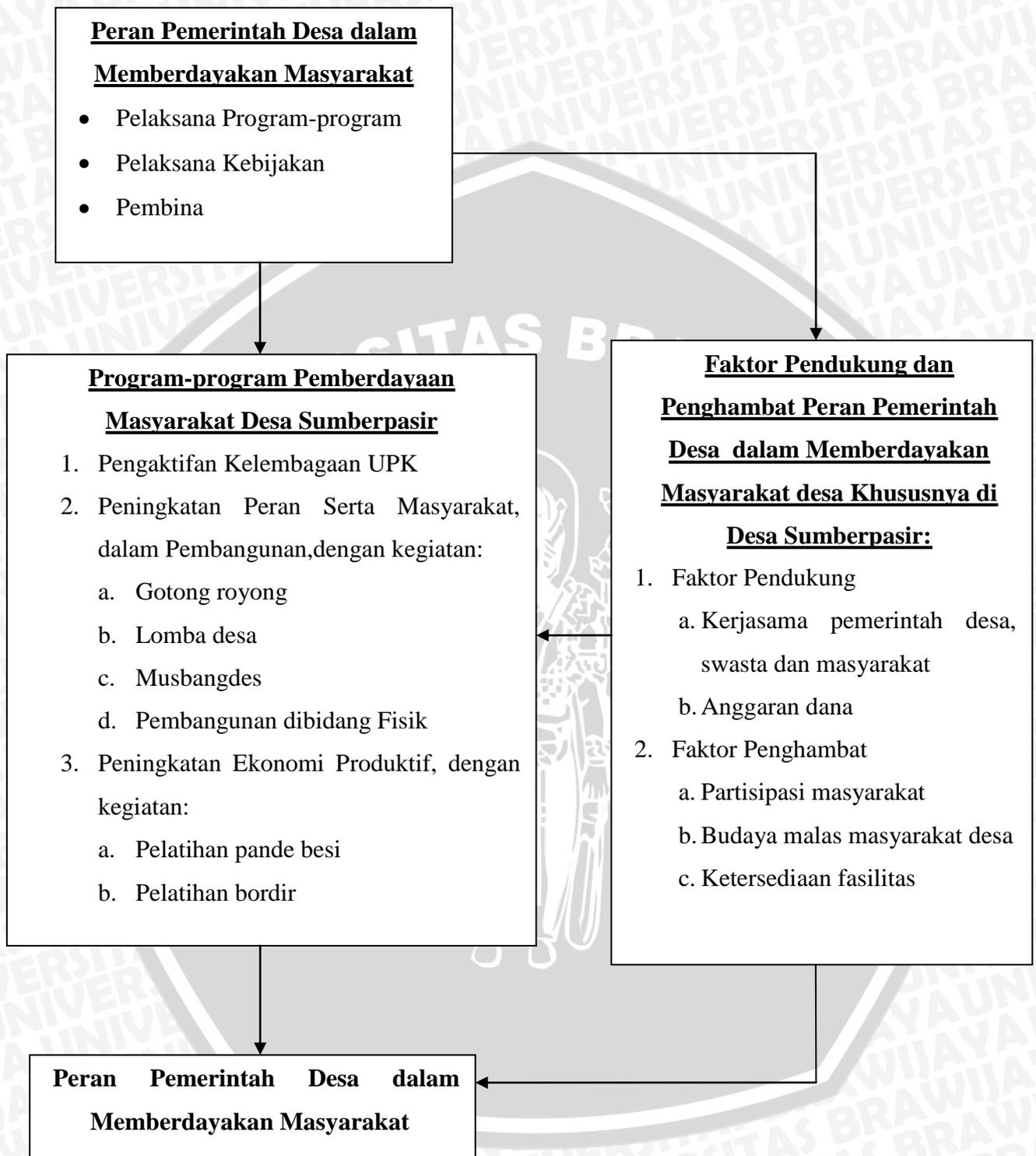
oleh individu yang akan berkontribusi bagi organisasi masyarakat sehingga mereka mampu menyelesaikan apa yang mereka ingin selesaikan.

14. Kepercayaan, tingkat kepercayaan dari masing-masing anggota masyarakat terhadap sesamanya, khususnya pemimpin dan abdi masyarakat, yang merupakan pantulan dari tingkat integritas (kejujuran, ketergantungan, keterbukaan, transparansi, azas kepercayaan) dalam masyarakat.
15. Keselarasan, pembagian rasa kepemilikan pada kelompok yang menyusun masyarakat, meskipun setiap masyarakat memiliki divisi atau perbedaan (agama, kelas, status, penghasilan, usia, jenis kelamin, adat, suku), tingkat toleransi anggota masyarakat yang berbeda dan bervariasi antara satu dan lainnya dan keinginan untuk bekerjasama dan bekerja bersama-sama, suatu rasa kesamaan tujuan atau visi, perataan nilai.
16. Kekayaan, tingkat pengendalian masyarakat secara keseluruhan (berbeda pada individu dalam masyarakat) terhadap semua sumber daya potensial dan sumber daya aktual, dan produksi dan penyaluran barang dan jasa yang jarang dan bermanfaat, keuangan dan non keuangan (termasuk sumbangan tenaga kerja, tanah, peralatan, persediaan, pengetahuan, keahlian).

### E. Kerangka Konseptual

Pemerintah desa khususnya kepala desa mempunyai peranan dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta memberdayakan masyarakat desa. Untuk mencapai tujuan pemerintah desa dalam hal pemberdayaan masyarakat maka diharapkan peran aktif dari masyarakat desa untuk terlibat secara langsung dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Hal ini dikarenakan dalam proses pemberdayaan masyarakat, masyarakat desa ditempatkan sebagai subyek dan obyek pemberdayaan masyarakat. Sebagai subyek pemberdayaan masyarakat, masyarakat desa mempunyai tanggung jawab dalam memberikan partisipasi dan kontribusinya dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat. Sedangkan sebagai obyek program pemberdayaan, masyarakat desa mempunyai hak untuk mendapatkan manfaat dari hasil dan kemajuan yang dicapai dari proses pemberdayaan masyarakat.

Untuk lebih jelasnya Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1

Kerangka Konseptual

Berdasarkan gambar 1 kerangka konseptual dapat dijelaskan bahwa peran dari pemerintah desa Sumberpasir yaitu sebagai pelakasa program-program, pelaksana kebijakan serta selaku pembina masyarakat diberbagai bidang. dalam menjalankan tugasnya pemerintah desa Sumberpasir melakukan beberapa upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta mengembangkan peran serta masyarakat dengan menetapkan beberapa program-program pemberdayaan yaitu: pengaktifan kelembagaan UPK, meningkatkan peran serta dalam pembangunan serta meningkatkan ekonomi produktif. dalam menjalankan program-program pemberdayaan terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi Pemerintah Desa Sumberpasir dalam memberdayakan masyarakat desa Sumberpasir yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Untuk mencapai tujuan pemerintah desa dalam hal pemberdayaan masyarakat maka peran aktif dari masyarakat sangat dibutuhkan untuk terlibat secara langsung dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Penelitian pada dasarnya mempunyai tujuan-tujuan dengan menggunakan cara-cara tertentu untuk memahami suatu fenomena yang ada. Uraian yang jelas dan sistematis atas data yang dikumpulkan diharapkan dapat memberikan hasil yang maksimal sehingga dapat dikategorikan sebagai tulisan yang mempunyai nilai ilmiah.

Metode penelitian adalah bagian yang sangat penting dalam suatu kegiatan penelitian agar penelitiannya dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana maka harus menggunakan metode penelitian yang tepat. Dengan metode penelitian maka peneliti dapat menentukan arah penelitian yang dilakukan sehingga dapat tercapai tujuan penelitian yang diinginkan. Yang dimaksud dengan metode adalah suatu cara atau prosedur untuk mengetahui sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis. sedangkan penelitian menurut Singarimbun dan Effendi (1989:8) diartikan sebagai berikut :

“Penelitian merupakan suatu proses yang panjang, penelitian berawal dari minat untuk mengetahui fenomena tertentu dan selanjutnya berkembang menjadi gagasan, teori, konseptualisasi, pemilihan metode penelitian yang sesuai dan seterusnya. Hasil akhirnya, melahirkan gagasan dan teori baru pula, juga merupakan proses yang tiada hentinya”.

Dengan demikian metode penelitian adalah cara untuk melakukan penelitian dengan menggunakan berbagai disiplin ilmu pengetahuan guna memecahkan, menemukan, mengembangkan dan menguji masalah yang diteliti, agar memperoleh hasil dan pembahasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

### A. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti status manusia, suatu objek, suatu situasi atau kondisi sistem pemikiran, ataupun suatu luas pemikiran pada masa sekarang. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Nazir (1988:63) bahwa “ metode deskriptif adalah suatu metodologi dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek ,suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu luas pemikiran pada masa sekarang.

Dengan demikian tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun kelas pemikiran pada masa sekarang dengan tujuan untuk mendeskripsikan, menggambarkan atau melukiskan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki (Nazir, 2005:54).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Seperti yang dikatakan Koentjaraningrat (1990:29) bahwa penelitian yang bersifat kualitatif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu dan atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala dalam masyarakat.

Sedangkan menurut Kurt dan Miller seperti yang dikutip oleh Moleong (2003:3), penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam

kawasannya sendiri dan berhubungan dengan ruang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu melakukan pembacaan, menggambarkan, menguraikan, menginterpretasikan dan diambil suatu kesimpulan dalam bentuk tulisan yang sistematis. Oleh sebab itu dalam memilih dan menghadapi objek penelitian ini sangat perlu mengetahui beberapa permasalahan dari objek tersebut guna menentukan waktu atau periode dari permasalahan. Mengingat dalam pengkajian ini berupaya untuk menentukan hasil dari penelitian lapangan berdasarkan sumber-sumber tertulis yang ada di Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang.

## **B. Fokus Penelitian**

Faktor penting dalam suatu penelitian yaitu menentukan fokus penelitian. Fokus penelitian mengungkapkan tentang penetapan masalah yang menjadi pusat perhatian dalam suatu penelitian agar penelitian bisa lebih terarah dan lebih terinci serta tidak menyimpang dari rumusan masalah yang telah ditetapkan. Menurut Moeloeng (dalam Suryono dan Sutinah, 2005:22) fokus penelitian memiliki dua maksud :

1. Penetapan fokus dapat membatasi studi, jadi dalam hal ini fokus akan membatasi bidang itu tersendiri. Fokus merupakan batas yang berguna untuk mencegah terjadinya pembiasan dalam mempersepsikan data maupun melakukan pembahasan nantinya..

2. Penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-inklusi atau masukan-mengeluarkan (inclusia-exclusia-kriteria). Suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan. Dengan bimbingan dan arahan suatu fokus, seorang peneliti akan tahu persis data mana yang perlu dikumpulkan dan data mana yang tidak perlu walaupun mungkin menarik, karena tidak relevan jadi tidak perlu dimasukkan kedalam sejumlah data yang dikumpulkan. Jadi dengan penetapan fokus yang jelas dan mantap, seorang peneliti dapat membuat keputusan tentang data mana yang perlu dikumpulkan dan data mana yang tidak perlu dikumpulkan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Peran Pemerintah Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Desa , meliputi:
  - a. Pelaksana Kebijakan
  - b. Pelaksana Program-program dan
  - c. Pembina
2. Upaya Pemerintah Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Desa , melalui:
  - a. Pengaktifan Kelembagaan UPK
  - b. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan, dengan Kegiatan:
    1. Pelaksanaan Gotong Royong
    2. Perlombaan Desa
    3. Musrenbangdes

4. Pembangunan Fisik
  - c. Peningkatan Ekonomi Produktif, dengan Kegiatan :
    1. Pelatihan Pande Besi
    2. Pelatihan Bordir
  3. Tahap Pemberdayaan Masyarakat Desa Sumberpasir
  4. Faktor Pendukung Dan Penghambat Peran Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat desa khususnya di Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang meliputi:
    - a. Pendukung
    - b. Penghambat

### **C. Lokasi dan Situs Penelitian**

Lokasi penelitian yang dimaksud adalah lokasi dimana penelitian akan dilaksanakan untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam menentukan lokasi penelitian perlu dipertimbangkan apakah lokasi tersebut sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya dan tenaga perlu dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Situs penelitian ini adalah tempat dimana sebenarnya peneliti menangkap fenomena dari objek yang diteliti untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan. Maka dalam penelitian ini peneliti mengambil data di:

1. Pemerintahan Desa Sumberpasir

2. Masyarakat Desa Sumberpasir
3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMD)

Pemilihan lokasi dan situs penelitian didasarkan pada beberapa aspek berikut:

1. Adanya permasalahan yang berkaitan dengan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pembangunan
2. Adanya kemudahan dalam akses informasi.
3. Ketersediaan dari Pemerintahan Desa.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Kriteria data dalam penelitian kualitatif adalah data yang pasti, data yang pasti adalah data yang sebenarnya terjadi sebagaimana adanya, bukan data yang sekedar terlihat, terucap, tetapi data yang mengandung makna dibalik yang terlihat dan terucap tersebut (Sugiyono, 2007:2). Adapun penelitian ini menggunakan dua jenis data yang terdiri dari:

1. Data Primer

Adalah data yang langsung dari objek penelitian. Dalam penelitian ini sumber data yang peneliti peroleh berasal dari Kepala Desa, Perangkat Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Kepala Dusun, RT/RW, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang.

## 2. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari data-data yang diolah oleh pihak-pihak atau institusi-institusi. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi Data sekunder meliputi : dokumen-dokumen, arsip-arsip, catatan-catatan dan laporan resmi yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder diambil dari rekaman kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu akan dilakukan kroscek dengan jenis data lain seperti rekaman media massa, jurnal-jurnal atau sumber lain.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah langkah sangat penting dalam metode ilmiah, karena data yang dihasilkan ini diinginkan untuk memecahkan suatu masalah. Oleh karena itu data tersebut harus valid, yaitu dengan menggunakan metode penelitian lapangan. Adapun Untuk memperoleh data-data sebagai bahan untuk disajikan dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan beberapa metode atau cara pengumpulan data antara lain:

#### 1. Interview (wawancara)

Suatu teknik pengumpulan data dengan cara wawancara. Wawancara adalah pengumpulan data dimana peneliti secara langsung mengajukan pertanyaan terhadap nara sumber untuk memperoleh data atau informasi yang berkaitan dengan penelitian.

#### 2. Observasi (pengamatan)

Suatu teknik pengumpulan data dimana dalam kegiatan ini, peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap

fenomena dari objek penelitian guna memperoleh data mengenai bentuk pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan oleh pemerintahan desa khususnya di Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang secara aktual dari sumber data.

### 3. Dokumentasi

Suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan-bahan dokumen yang berkaitan dengan penelitian, dimana bahan dokumen tersebut berupa arsip-arsip yang ada di Kantor Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang serta dokumen-dokumen resmi lainnya.

## F. Instrumen Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan instrumen penelitian, dimana instrumen penelitian adalah alat bantu atau fasilitas yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih muda dan hasilnya lebih baik dalam arti lebih cermat dan lebih lengkap serta sistematis sehingga lebih muda diolah (Arikunto, 1992:150). Jenis instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

### 1. Peneliti sendiri

Peneliti adalah instrumen utama dalam sebuah penelitian kualitatif karena seorang peneliti merupakan sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsiran data dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya.

## 2. Pedoman wawancara (interview guide)

Dalam hal ini peneliti menggunakan petunjuk umum wawancara dengan membuat kerangka dan garis-garis besar pokok-pokok yang ditanyakan dalam proses wawancara.

## 3. Dokumentasi

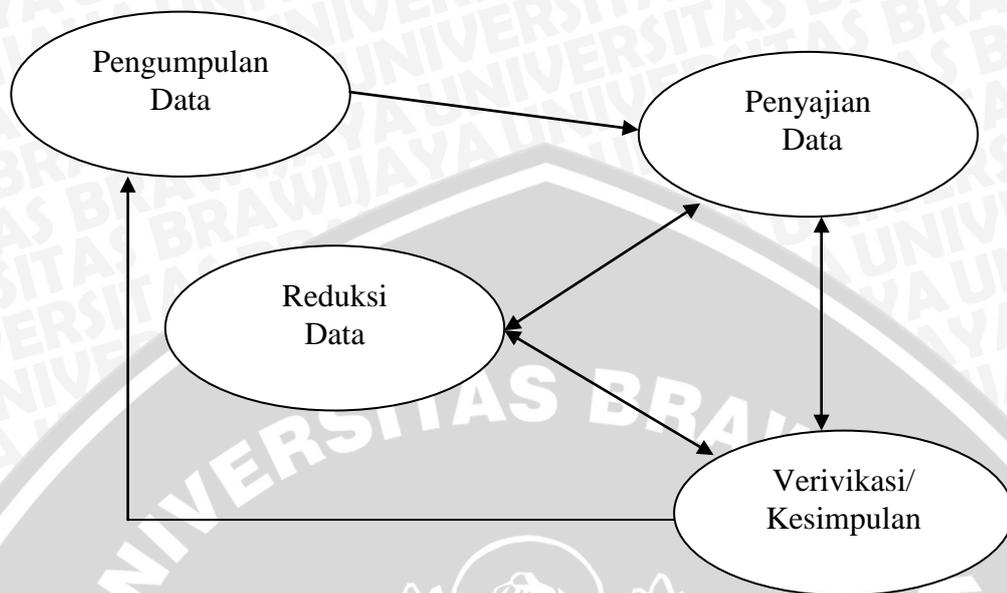
Peneliti memperoleh data dari buku catatan, kamara, recorder serta arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang mendukung dalam penelitian ini.

### **G. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dan memerlukan ketelitian serta kekritisan dari peneliti. Setelah data terkumpul dari hasil penelitian yang dilakukan, maka data-data tersebut selanjutnya perlu dolah. Pengolahan data ini seringkali disebut dengan analisa data, yaitu proses sederhana data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan di interprestasikan.

Analisa data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian (Nazir, 1999:405). Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaan, pengelompokkan, sistematika, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.

Dalam pengembangan penelitian ini metode analisis yang digunakan ada:ah metode analisis interaktif (Miles dan Huberman, 1992,h.16-19) yang terdiri dari:



Gambar 2

## Analisis Data Model Interaktif

Sumber: Miles dan Huberman (1992)

### 1. Pengumpulan Data

Kegiatan yang dilakukan oleh seseorang peneliti untuk memperoleh data yang valid. pengumpulan data ini dilakukan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini, observasi ke lapangan dan dokumentasi.

### 2. Reduksi Data

Kegiatan yang bertujuan untuk menajamkan, menggolongkan, membuang data yang dianggap tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara yang sedemikian rupa sehingga dapat dilakukan proses penarikan kesimpulan atau verifikasi.

### 3. Penyajian Data

Berisi sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dengan melihat penyajian data, kita dapat memahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan

### 4. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi

Kegiatan akhir dari kegiatan analisis. penelitian berusaha untuk menggambarkan dari data yang dikumpulkan yang dituangkan dalam kesimpulan yang masih bersifat tentatuf. Akan tetapi, dengan bertambah data melalui proses verifikasi secara terus-menerus akan dapat ditarik kesimpulan.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Desa Sumberpasir

###### a. Asal Usul Nama Desa Sumberpasir

Berdasarkan cerita masyarakat pada masyarakat terdahulu nama desa sumberpasir berasal dari kondisi lahan desa yang sepanjang sungainya banyak mengandung pasir, sehingga menjadi sumber penghasilan masyarakat dengan cara menggali pasir disepanjang sungai

###### b. Sejarah Tokoh/Pemimpin Desa Sumberpasir

Desa Sumberpasir dipimpin oleh seorang petinggi atau Kepala Desa yang dipilih oleh masyarakat, secara berurutan sebagai berikut:

- a. Bapak Atmo Suparto : tahun 19.. s/d 1970
- b. Bapak Jatmiko : tahun 1970 s/d 1972
- c. Bapak H. Machrus : tahun 1972 s/d 1984
- d. Bapak H. Machfud : tahun 1984 s/d 1998
- e. Bapak Muhdlor : tahun 1998 s/d sekarang

###### c. Keadaan Geografis

##### 1. Letak dan Luas Wilayah

Berdasarkan data monografi Desa Sumberpasir tahun 2012, Desa Sumberpasir adalah desa yang secara administratif terletak diwilayah Kecamatan

Pakis Kabupaten Malang. Adapun batas-batas wilayah Desa Sumberpasir yakni sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Batas Wilayah Desa Sumberpasir**

Letak	Desa
Sebelah Utara	Desa Sukolilo
Sebelah Selatan	Desa Pucangsongo
Sebelah Barat	Desa Pakis Kembar
Sebelah Timur	Desa Sukoanyar

Sumber : Monografi Desa Sumberpasir 2012

Berdasarkan data monografi Desa Sumberpasir pada tahun 2012, maka luas wilayah Desa Sumberpasir adalah 320,724 hektar. Desa Sumberpasir terdiri dari dusun yakni:

1. Dusun Krajan
2. Dusun Ngerangin
3. Dusun Gagakasinan
4. Dusun Botoputih

Desa Sumberpasir berada di tengah-tengah pusat pemerintahan Kecamatan Pakis dan pusat pemerintahan Kabupaten Malang. Adapun Orbitrasi atau jarak antara Desa Sumberpasir dengan pusat pemerintahan kecamatan, kabupaten, dan provinsi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4**  
**Orbitasi Desa Sumberpasir**

No.	Uraian	Keterangan
1.	Jarak ke ibu kota Kecamatan	3 km
2.	Jarak ke ibu kota Kabupaten	15 km
3.	Jarak ke ibu kota Provinsi	100 km
4.	Lama tempat ke ibu kota Kabupaten	6 menit
5.	Lama tempuh ke ibu kota Kecamatan	15 menit
6.	Lama tempuh ke ibu kota Provinsi	2,5 jam

Sumber : Monografi Desa Sumberpair 2012

## 2. Keadaan Iklim

Keadaan iklim Desa Sumberpasir umumnya sama dengan daerah-daerah lain disekitarnya yaitu beriklim tropis dengan suhu terendah berkisar 20°C sampai dengan suhu tertinggi berkisar 28°C. Curah hujan berkisar 2,71 mm dan minimum yang pernah terjadi 2,31 mm dengan mempunyai dua musim, yaitu musim penghujan dan musin kemarau. Musim penghujan biasanya berkisar 8 bulan dan sisanya musim kemarau. Tinggi tempat dari permukaan yaitu laut 55,9 mdl.

## d. Keadaan Demografis

### 1. Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang pelaksanaan pembangunan di desa. Jumlah penduduk Desa Sumberpasir berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pemerintahan Desa Sumberpasir pada tahun 2012, menunjukkan bahwa jumlah keseluruhan penduduk Desa

Sumberpasir berjumlah 6.879 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 1.966 KK.

Pembagian penduduk di Desa Sumberpasir dapat disajikan sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk laki-laki : 3.467
2. Jumlah penduduk perempuan : 3.412
3. Jumlah Kepala Keluarga : 1.966

Adapun jumlah penduduk Desa Sumberpasir pada tahun 2012 berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 5**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia**

No.	Usia	Jumlah	Persentase (%)
1	0-12 bulan	146	2,1%
2	1-12 tahun	1456	21,2%
3	13-17 tahun	593	8,6%
4	18-58 tahun	4125	60%
5	>59 tahun	559	8,1%
Jumlah		6.879	100%

Sumber : Monografi Desa Sumberpasir 2012

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan kelompok usia 18-58 tahun yang paling besar jumlahnya yaitu 4.125 orang dari jumlah penduduk 6.879 jiwa serta 1.966 KK. Sementara pada kelompok usia 1-12 tahun menempati posisi kedua terdiri 1.456 orang. Yang ketiga berada pada kelompok yang berumur 13-17 tahun yang terdiri dari 593 orang. Menyusul posisi keempat berada pada kelompok umur 59 tahun keatas yang terdiri dari 559 orang. Dapat disimpulkan bahwa penduduk Desa Sumberpasir rata-rata berada pada usia produktif.

## 2. Mata Pencaharian

Mata pencaharian masyarakat di Desa Sumberpasir umumnya sebagian besar adalah bermata pencaharian sebagai petani sedangkan sebagian lainnya bergerak dibidang seperti Jasa Pemerintahan/Non Pemerintahan, Jasa Lembaga Keuangan, Jasa Perdagangan dan Jasa Keterampilan. Untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai jenis pekerjaan masyarakat dapat dilihat pada tabel dibawah ini

**Tabel 6**  
**Jumlah Penduduk Menurut Jenis Mata Pencaharian Tahun 2012**

No.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
<b>1</b>	Jasa Pemerintahan/Non Pemerintahan	
	a. Pegawai Desa	12
	b. PNS	
	1.PNS	72
	2.TNI	6
	3.Guru	42
	4.Bidan	4
	5.Mantri Kesehatan/Perawat	3
	c. Pensiunan TNI/Sipil	16
	d. Petani	
1. Petani	145	
2. Buruh Tani	358	
<b>2</b>	Jasa Lembaga Keuangan	
	a. Perbankan	1
	b. Perkreditan Rakyat	2
	c. Pegadaian	-
	d. Asuransi	-
<b>3</b>	Jasa Perdagangan	
	a. Pasar Desa	-
	b. Warung	90
	c. Kios	21
	d. Toko	25
<b>4</b>	Jasa Keterampilan	
	a. Tukang Kayu	5
	b. Tukang Batu	-
	c. Tukang Jahit/Bordir	115
	d. Tukang Cukur	6
	e. Tukang Gali Sumur	2

Sumber : Monografi Desa Sumberpasir 2012

Tabel 6 diatas menunjukkan dari 1696 KK di Desa Sumberpasir mayoritas bermata pencaharian sebagai petani hal ini disebabkan karena sebagian besar penggunaan tanah yang ada di Desa Sumberpasir digunakan sebagai lahan pertanian sawah dibandingkan penggunaan lahan lainnya.

**Tabel 7**  
**Penggunaan Tanah di Desa Sumberpasir Tahun 2012**

No.	Penggunaan	Luas (Ha)
1	Permukiman	61,25
2	Persawahan	232
3	Perkebunan	4,33
4	Makam	4,249
5	Perkarangan	7,835
6	Untuk Bangunan	
	a. Perkantoran	0,030
	b. Sekolah	6,000
	c. Pertokoan	0,015
	d. Pasar	-
	e. Terminal	-
	f. Jalan	6,000
5	Sarana Olahraga	0,090
6	Perikanan Darat	-
7	Jalan	6,000
8	Sungai	1,250

Sumber : Monografi Desa Sumberpasir 2012

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa penggunaan tanah yang paling banyak digunakan adalah pada tanah pertanian sawah yaitu seluas 232 hektar dari total keseluruhan luas wilayah Desa Sumberpasir yang berjumlah

320,724 hektar. Adapun jenis-jenis pertanian yang ada dan dikerjakan oleh masyarakat Desa Sumberpasir adalah:

1. Padi
2. Kedela
3. Jagung
4. Umbi-umbian dan
5. Sayur-sayuran.

### **3. Agama**

Agama yang dianut masyarakat di Desa Sumberpasir keseluruhan masyarakatnya menganut agama islam. Kehidupan keagamaan di Desa Sumberpasir diwarnai dengan adanya berbagai aktifitas keagamaan seperti, Jamaah Yasin, Majelis ta'lim, Tiba', Taman Pendidikan Al-qur'an dan kegiatan hari-hari besar islam lainnya. Dengan adanya hal tersebut maka fasilitas pendukung masyarakat desa dalam melaksanakan kegiatan peribadatan yang ada di Desa Sumberpasir berjumlah 6 bangunan mesjid dan 27 bangunan mushallah/langgar.

### **4. Sosial Budaya**

Kehidupan sosial budaya dalam tataran masyarakat Desa Sumberpasir merupakan suatu tataran masyarakat yang berpegang teguh pada kepercayaan agama islam dan masyarakat desa Sumberpasir cenderung memiliki sifat agamis, ekspretif dan terbuka sehingga bisa dimanfaatkan sebagai pendorong budaya

transparansi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Hubungan kekerabatan dan ikatan kekeluargaan dalam lingkup Desa Sumberpasir sangat erat dimana masyarakat memiliki unsur gotong royong yang sangat erat selain itu masyarakat desa Sumberpasir mempunyai budaya paternalistik yang cenderung kuat, akan tetapi pola budaya paternalistik dapat dikembangkan sebagai kekuatan dalam pembangunan yang bersifat mobilitas massa.

#### **5. Kesehatan**

Secara umum kondisi kesehatan masyarakat desa Sumberpasir sudah terbilang cukup baik, hal ini dikarenakan tersedianya sarana dan prasarana kesehatan. Khusus di Desa Sumberpasir pada beberapa sarana dan prasarana (Berdasarkan Laporan data profil Desa Sumberpasir Tahun 2012) yaitu :

1. Posyandu : 6 unit
2. Bidan Desa : 3 orang

#### **6. Pendidikan**

Masalah pendidikan merupakan salah satu faktor sosial yang penting dalam proses pelaksanaan pembangunan karena faktor pendidikan itu sendiri dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat. Desa Sumberpasir dalam menyelenggarakan pendidikan saat ini cukup baik, hal ini ditunjukkan dengan minimnya penduduk desa Sumberpasir yang butah huruf. Untuk melengkapi kondisi sosial masyarakat yang ada di Desa Sumberpasir dapat dilihat dari tingkat pendidikannya pada tabel berikut :

Tabel 8

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2012**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	Tidak Sekolah/Tidak Tamat SD	175	4,9%
2	Tamat SD	456	12,8%
3	Tamat SMP	1254	35,2%
4	Tamat SMA	1620	45,5%
5	Tamat Sarjana/Diploma	58	1,6%
	Jumlah	3563	100%

Sumber : Monografi Desa Sumberpasir 2012

Berdasarkan tabel 8 menunjukkan bahwa penduduk yang tidak sekolah dan tidak tamat SD masing-masing berjumlah 175 orang, berpendidikan SD sebanyak 456 orang, kemudian yang berpendidikan SMP sebanyak 1254 orang, sedangkan yang berpendidikan SMA berjumlah 1620 orang dan yang melanjutkan Sarjan/Diploma berjumlah 58 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran warga masyarakat untuk berpendidikan pada masyarakat di Desa Sumberpasir mulai nampak dan sadar akan pentingnya pendidikan, walaupun pada kenyataannya masih ada penduduk yang tidak sempat mengenyam pendidikan.

Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pendidikan maka pemerintah desa beserta masyarakat desa melakukan peningkatan sarana pendidikan. Adapun saat ini Desa Sumberpasir sudah memiliki sarana pendidikan berupa sekolah dari tingkat TK sampai SMA sebagaimana tabel dibawah ini:

**Tabel 9**  
**Sarana Pendidikan**

No.	Nama Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak (TK)	5
2	Sekolah Dasar (SD)	3
3	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	2
4	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	2
5	Lembaga Pendidikan Keagamaan/ TPQ	19
6	Pondok Pesantren	2

Sumber : Monografi Desa Sumberpair 2012

## 2. Visi dan Misi Desa Sumberpasir

### a. Visi

Visi adalah sebagai gambaran tentang kondisi ideal yang diinginkan atau yang di cita-citakan oleh Pemerintah Desa masa yang akan datang, Visi juga merupakan alat bagi Pemerintah Desa dan pelaku pembangunan lainnya melihat, menilai atau memberi predikat terhadap kondisi desa yang diinginkan. adapun visi Desa Sumberpasir adalah sebagai berikut:

*“Terwujudnya masyarakat dan aparatur desa yang berkualitas untuk mendukung otonomi daerah dalam mewujudkan kesejahteraan yang lebih mandiri”*

### b. Misi

Misi adalah merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran desa yang hendak dicapai, pernyataan misi membawa desa kepada satu fokus. misi inilah yang harus diemban oleh Pemerintah Desa. untuk mewujudkan visi

desa tersebut diatas, maka Pemerintah Desa Sumberpasir menetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang efektif dan efisien, demokratis, adil dan merata.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat melalui lembaga/organisasi kemasyarakatan baik yang bergerak dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, politik dalam rangka mendorong kemandirian masyarakat.
3. Pemberdayaan kelompok ekonomi konsumtif menjadi kelompok ekonomi produktif (pengembangan ekonomi unggulan).
4. Pembangun kehidupan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera.
5. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang semakin layak, adil dan merata serta memberi perhatian utama pada kebutuhan dasar dan terpenuhinya sarana dan prasarana umum.
6. Menciptakan lapangan pekerjaan.

### **3. Keadaan Pemerintahan Desa Sumberpasir**

Dalam menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan, Pemerintah Desa Sumberpasir membawahi 4 dusun (Dusun Krajan, Dusun Gagaksinan, Dusun Botoputih dan Dusun Ngerangin), 36 Rukun tetangga (RT) dan 10 Rukun Warga (RW). Dalam Pemerintahan Desa Sumberpasir terdapat susunan organisasi Pemerintah Desa sebagai berikut:

1. Kepala Desa/ Petinggi;
2. Sekretaris Desa
3. Unsur pelaksana Sekertaris Desa atau Tata Usaha terdiri dari:

- a. Kepala Urusan Umum;
  - b. Kepala Urusan Keuangan;
4. Kebayan
  5. Kuwowo
  6. Modin
  7. Kepetengan atau Jogoboyo
  8. Kamituwo atau Kepala Dusun

Adapun susunan pemerintahan Desa Sumberpasir pada tahun 2012 berdasarkan jabatan dan latar pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini

**Tabel 10**  
**Susunan Pemerintah Desa Sumberpasir**

No.	Nama	Jabatan	Usia	Masa Jabatan	Pendidikan
1	Muhdlor	Kepala Desa	48 tahun	6 tahun	SMA
2	N. Surtiningrum	Sekertaris Desa	48 tahun	4 tahun	S1
3	Imam Rosidi	Staf. Administrasi	35 tahun	4 tahun	SMA
4	Khusnul Aminin, SE	Staf. Keuangan	41 tahun	4 tahun	S1
5	M.Qomari	Kasun Krajan	53 tahun	4 tahun	SMA
6	Solikin	Kasun Ngrangin	56 tahun	4 tahun	SMP
7	Madhan	Kasun Gagaksinan	47 tahun	4 tahun	SMP
8	Muhajirin Hussen	Kasun Botoputih	57 tahun	3 tahun	SD
9	Ngateman	Kebayan	59 tahun	4 tahun	SMP
10	Fauzan Hadi	Kuwowo	53 tahun	4 tahun	SD
11	Ali Ahmad	Modin	56 tahun	4 tahun	SMA
12	Aminul Muhtar	Kepetengan	37 tahun	6 tahun	SMP

Sumber : Monografi Desa Sumberpasir 2012

#### 4. Unsur-unsur Pemerintahan Desa Sumberpasir

##### a. Kepala Desa atau Petinggi

Kepala desa atau petinggi merupakan kepala pemerintah yang dipilih langsung oleh masyarakat desa, kepala desa mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban dalam menyelenggarakan rumah tangga dan melaksanakan pemerintahan dari pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa bab IV paragraf 2 pasal 14 menyatakan bahwa Kepala Desa mempunyai peranan sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban. Untuk menjalankan tugas tersebut, maka Kepala Desa mempunyai fungsi yaitu:

- a. Menggerakkan potensi masyarakat.
- b. Melaksanakan tugas dari pemerintah atasannya.
- c. Melaksanakan koordinasi terhadap jalannya Pemerintahan Desa.
- d. Melaksanakan tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya baik di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Selain itu tugas dan kewajiban Kepala Desa menurut Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Bab III tentang Tugas, Wewenang Dan Kewajiban, Larangan dan Hak Kepala Desa bagian ketigabelas tentang pengesahan pengangkatan pasal 30, 31 dan 32 adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Kepala Desa mempunyai wewenang sebagai berikut:
  - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
  - b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
  - c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
  - d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
  - e. Membina kehidupan masyarakat desa;
  - f. Membina perekonomian desa;
  - g. Mengkoordinasi pembangunan desa secara partisipatif;
  - h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan;
  - i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Kepala Desa memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Indonesia;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
- g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. Melaksanakan dan bertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa;
- l. Mengembangkan pendapat masyarakat desa;
- m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa dan;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

4. Memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
5. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam setahun.
6. Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
7. Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat, dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio atau media lainnya.
8. Laporan-laporan yang diberikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota dijadikan sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
9. Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

#### **b. Perangkat Desa**

Perangkat Desa merupakan salah satu unsur dari penyelenggara pemerintahan desa, perangkat desa bertugas membantu Kepala Desa melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat Desa ini terdiri dari:

1. Sekretaris

Sekretaris desa atau carik adalah unsur staf pembantu kepala desa dan memimpin Sekretariat Desa yang mempunyai tugas membantu kepala desa di bidang administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa serta memberikan pelayanan administrasi kepada Kepala Desa. Sekertaris Desa kedudukannya diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan, selain itu sekertaris desa diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugasnya sekertaris desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa, selain itu Sekertaris Desa mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksana urusan surat-menyurat kearsipan dan laporan;
- b. Pelaksana urusan keuangan;
- c. Pelaksana urusan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan’
- d. Melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan melakukan tugasnya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekertaris Desa dibantu oleh Kepala Urusan Umum dan Kepala Urusan Keuangan, dimana masing-masing Kepala Urusan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Kepala Urusan Umum, mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. Menyelenggarakan penyusunan, pengetikan atau pengadaan dan proses surat menyurat beserta pengirimnya;
  - b. Mengatur dan menata surat-surat yang dimintakan tanda tangan Kepala Desa/ Carik;

- c. Mengatur rumah tangga Sekertaris Desa, tamu-tamu, kebutuhan kantor, penyimpanan dan pemeliharaan;
  - d. Menyimpan, memelihara dan mengamankan arsip, mensistematisasikan buku-buku inventaris, dokumen-dokumen, absensi perangkat desa dan memberikan pelayanan administrative kepada semua urusan;
  - e. Mengurus pemeliharaan kendaraan dinas, kebersihan kantor dan sebagainya;
  - f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Carik dalam bidang umum;
  - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Carik;
2. Kepala Urusan Keuangan, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Mengelolah administrasi keuangan desa, mempersiapkan data guna menyusun rancangan anggaran, perubahan dan perhitungan, penerimaan dan pengeluaran keuangan desa, melaksanakan tata pembukuan secara teratur;
  - b. Melaksanakan administrasi pelaksanaan pembayaran, upah dan gaji perangkat desa;
  - c. Mengadakan penilaian pelaksanaan APBDes dan mempersiapkan secara periodik program kerja di bidang keuangan;
  - d. Membantu kelancaran pemasukan pendapatan Daerah, menginventarisir kekayaan daerah, bondo deso (luas, status, penggunaan dan lain-lain);

- e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Carik dalam bidang keuangan;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Carik

## 2. Perangkat Desa Lainnya

Perangkat Desa lainnya merupakan warga masyarakat desa setempat serta unsur pelayanan teknis (UPT). Unsur Pelayanan Teknis (UPT) merupakan unsur pelaksana lapangan sebagai pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat secara teknis di lapangan. Unsur Pelayanan Teknis (UPT) terdiri dari Kabayan, Kuwowo, Modin, dan Kepetengan atau Jogoboyo.

Adapun tugas-tugas dari Unsur Pelayanan Teknis (UPT) adalah sebagai berikut:

### a. Kabayan

Tugas dari Kabayan adalah:

1. Melaksanakan tugas kegiatan di bidang administrasi penduduk (Kartu Tanda Penduduk), administrasi pertanahan, urusan transmigrasi dan monografi desa;
2. Membantu meningkatkan urusan-urusan RT/RW dan meningkatkan pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
3. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Carik dalam bidang pemerintahan;
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Carik.

b. Kuwowo

Tugas dari Kuwowo adalah:

1. Melaksanakan tugas kegiatan dibidang pembangunan antara lain meliputi menyiapkan/ menyusun ruang data, menyusun data pembangunan, menyiapkan masalah-masalah pembangunan desa untuk dibicarakan dalam forum konsultasi dengan BPD, melaksanakan bimbingan keterampilan masyarakat di bidang pembangunan fisik desa;
2. Menyusun pelaksana pembagian air, membina kadar-kadar pengairan serta kelompok Himpunan Petani Pemakai Air (HPPI);
3. Membina kelompok-kelompok koperasi dan lumbung desa;
4. Membantu menyiapkan petunjuk dalam pelaksana pembangunan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
5. Meneliti dan mengadakan evaluasi dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pembangunan desa, serta membantu penyusunan program pembangunan desa;
6. Membantu usaha-usaha memajukan pertanian, peternakan, perikanan serta pelaksana gotong royong dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa;
7. Memberikan sarana dan pertimbangan kepada Carik dalam bidang pembangunan;
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Carik.

c. Modin

Tugas dari Modin adalah:

1. Mengadakan pencatatan pengurusan kematian serta segala sesuatu yang berhubungan dengan kematian, pendataan tentang nikah, talak dan rujuk;
2. Menyiapkan sarana dan pertimbangan dalam penyusunan kegiatan generasi muda dan olah raga;
3. Membantu mengatur pemberian bantuan pada korban bencana alam serta mengamati pelaksanaannya;
4. Mengadakan usaha-usaha untuk menghimpun dana sosial untuk penderita cacat, panti asuhan, badan-badan sosial lain serta mengkoordinir pelaksanaannya;
5. Membantu mengusahakan pengawasan/penanggulangan tindak perjudian, gelandangan dan tuna sosial;
6. Melaksanakan pembinaan di bidang pendidikan, kebudayaan, tempat-tempat bersejarah, peningkatan Keluarga Berencana (KB), kesehatan masyarakat dan kesehatan tempat umum, memelihara tempat-tempat ibadah, pembinaan badan-badan sosial dan izin usaha sosial;
7. Memberikan sarana dan pertimbangan kepada Carik dalam bidang kesejahteraan rakyat;
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Carik.

d. Kepetengan atau Jogoboyo

Tugas dari Keppetengan atau Jogoboyo adalah:

1. Melaksanakan tugas kegiatan di bidang keamanan dan ketertiban antara lain administrasi data petugas keamanan dan pos keamanan di desa;
2. Membina petugas keamanan yang ada di desa terhadap hal-hal yang menyangkut keamanan dan ketertiban serta keterampilan penanganan gangguan keamanan;
3. Membantu meningkatkan urusan-urusan keamanan dan ketertiban desa;
4. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Carik dalam bidang kesejahteraan rakyat;
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Carik.

e. Kamituwo atau Kepala Dusun

Kamituwo atau Kepala Dusun adalah unsur pelaksana dalam pemerintahan desa dengan wilayah kerja tertentu, tugas Kepala dusun yaitu untuk membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan pada bagian wilayah desa atau dusun, selain itu fungsi dari Kepala Dusun yaitu sebagai pelaksana dalam kebijakan dan keputusan Kepala Desa serta sebagai penampung aspirasi masyarakat setempat dan melakukan pembinaan terhadap Rukun Tetangga (RT) yang ada dibawahnya.

Selain fungsi tersebut Kepala Dusun juga melakukan pembinaan wilayah dan kemasyarakatan, pemuda dan olah raga, membantu Kepala Desa dalam

melaksanakan tugas operasional kewilayaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, keamanan serta ketertiban dan ketentraman.

Kepala Dusun diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas nama Bupati atas usul Kepala Desa, Pembentukan dusun ditetapkan dengan memperhatikan faktor manusia, jumlah penduduk, faktor alam, faktor letak dan faktor sosial budaya termasuk adat istiadat. Selain itu faktor-faktor objektif pembentukan dusun antara lain seperti penguasaan wilayah, keseimbangan antara organisasi dan luas wilayah serta pelayanan.

Untuk lebih memudahkan gambaran tentang susunan nama-nama Pemerintah Desa di Desa Sumberpasir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

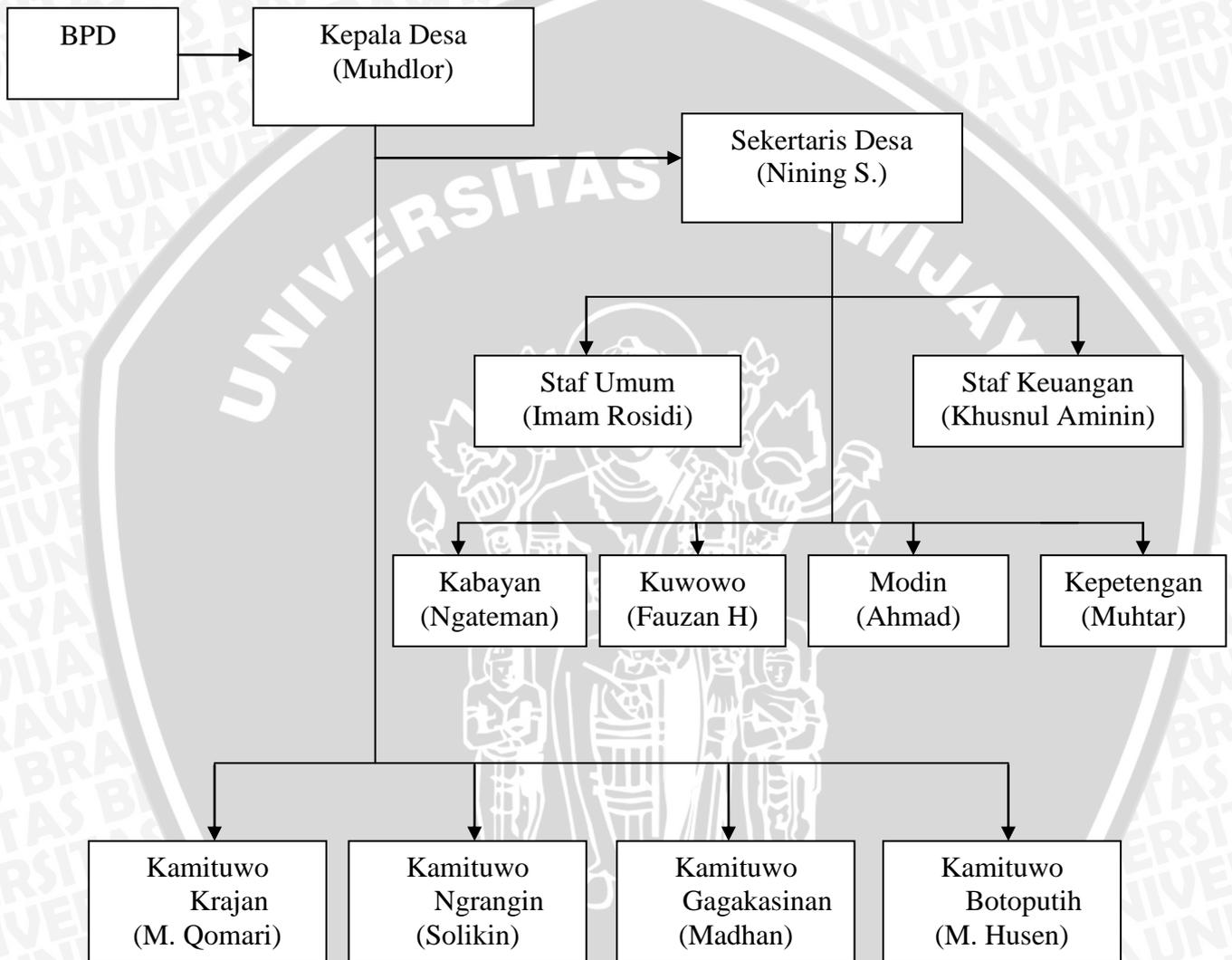
**Tabel 11**  
**Susunan Nama Perangkat Pemerintah Desa Sumberpasir**

No.	Jabatan	Nama
1	Kepala Desa	Muhdlor
2	Sekertaris Desa	Naning Surtiningrum, SE
3	Staf Umum	Imam Rosidi
4	Staf Keuangan	Khusnul Aminin, SE
5	Modin	Ali Ahmad
6	Kuwowo	Fauzan Hadi
7	Kepetengan	Aminul Muhtar
8	Kabayan	Ngateman
9	Kamituwo Krajan	Muhammad Qomari
10	Kamituwo Ngrangin	Solikin
11	Kamituwo Gagaksinan	Madhan
12	Kamituwo Botoputih	Muhajir Husen

Sumber : Monografi Desa Sumberpasir 2012

Sedangkan susunan struktur organisasi pemerintah desa adalah sebagai berikut:

### Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sumberpasir



## **B. Penyajian Data Fokus Penelitian**

### **1. Peran Pemerintah Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Desa.**

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pengaturannya berdasarkan pemikiran keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan pedesaan harus mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui pemberdayaan masyarakat desa. Dimana pemerintah desa selaku pelaksana roda pemerintahan serta penanggung jawab dari penyelenggara pemerintahan desa melakukan pembinaan, pelaksana kebijakan serta penetapan program-program dalam meningkatkan kualitas hidup dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, Peran pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa Sumberpasir adalah sebagai berikut:

#### **a. Peran Pemerintah Desa Sebagai Pelaksana Kebijakan**

Di dalam pemerintahan desa, Kepala Desa dan LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) bekerjasama dan saling membantu dalam menyusun rencana pembangunan yang berbasis pada perbaikan mutu hidup masyarakat desa. Upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka dibentuk sebuah kebijakan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhdlor selaku Kepala Desa mengatakan bahwa:

“LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) dan Pemerintah Desa saling bekerjasama dalam menyusun kebijakan pembangunan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat agar masyarakat bisa memperbaiki kehidupannya “. (wawancara pada tanggal 25 Februari 2013)

Pendapat tersebut diperkuat dengan pendapat Bapak Fauzan Hadi selaku Kaur Pembangunan yang mengatakan bahwa:

“sebelum menetapkan suatu Kebijakan kami terlebih dahulu mengadakan musyawarah yang ada ditingkat dusun kemudian nanti akan dilanjutkan dimusbangdes dengan adanya musyawarah kami akan mengetahui keinginan dari masyarakat sehingga kami bisa dengan mudah menyusun kebijakan yang sesuai dengan situasi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. salah satu kebijakan yang kami laksanakan saat ini pengembangan ekonomi keunggulan dimana kebanyakan dari masyarakat kami mempunyai keahlian dalam membordir sehingga kami menyusun suatu kebijakan yang sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat”. (wawancara pada tanggal 26 Februari 2013)

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Sumberpasir, dalam penyusunan kebijakan pembangunan pada dasarnya adalah penetapan pokok-pokok pikiran sebagai suatu upaya untuk pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat akan lebih maju, sejahtera dan mandiri maka dari itu Pemerintah desa menetapkan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kepetingan dan keinginan masyarakat desa Sumberpasir. adapun kebijakan Pembangunan Jangka Menengah desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang tahun 2009-2013 yang dapat dirumuskan dalam rangka pemberdayaan masyarakat adalah :

1. Mengaktifkan dan mengembangkan kelembagaan desa.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat melalui lembaga/organisasi kemasyarakatan baik yang bergerak di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik dalam rangka mendorong kemandirian masyarakat.
3. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi konsumtif menjadi kelompok ekonomi produktif (pengembangan ekonomi unggulan)

4. Memberdayakan kelompok usaha kecil dengan meningkatkan kemampuan kewirausahaan
5. Pengembangan potensi unggulan desa menuju arah Desa Wisata

#### **b. Peran Pemerintah Desa Sebagai Pelaksana Program-program**

Program-program pemberdayaan merupakan salah satu upaya pemerintah desa dalam penanggulangan kemiskinan, adanya pendekatan pemberdayaan masyarakat maka akan menciptakan program-program yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sehingga tercipta kehidupan masyarakat desa yang damai, aman sejahtera serta makmur dalam segala segi, baik segi perekonomian masyarakat serta ketersediaan fasilitas umum yang di perlukan oleh masyarakat desa dalam menunjang kehidupan sehari-harinya.

Pemerintah Desa Sumberpasir sebelum membuat Program-program pembangunan masyarakat Desa diawali dengan musyawarah di tingkat dusun yang bertujuan untuk membahas seluruh usulan kegiatan dari tingkat RT/RW dalam satu dusun, Kemudian dilanjutkan ke musyawarah Desa yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh Agama, RT / RW, LPMD, Pemerintah Desa beserta BPD dalam rangka penggalan gagasan. Dari penggalan gagasan dapat diketahui permasalahan yang ada di Desa dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat sehingga aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung. Hal tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Rozi selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) yang mengatakan bahwa:

“Sebelum melaksanakan program-program pembangunan kami terlebih dahulu melakukan musyawarah ditingkat dusun dengan mengundang

perwakilan tokoh masyarakat, RT dan RW, selanjutnya hasil musyawarah tersebut kami sampaikan kepada pemerintah desa untuk dibahas di Musrenbangdes “. (wawancara pada tanggal 27 Februari 2013)

Sebagai wakil dari masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) berperan aktif membantu pemerintah Desa dalam menggerakkan program-program pemberdayaan dalam hal ini LPMD bertugas sebagai penanggung jawab dan koordinator dalam pembuatan rencana kegiatan program-program pembangunan yang telah disepakati dan disusun untuk dilaksanakan.

Dari wawancara dengan bapak Muhdor selaku Kepala Desa Sumberpasir mengatakan bahwa:

“Dalam pembuatan program-program pemberdayaan yang ada di desa Sumberpasir kami bekerjasama dengan LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa), dengan adanya kerjasama tersebut kami bisa merumuskan program Pembangunan Desa, dalam hal ini kami menyusun program-program pembangunan yang sifatnya mendesak dan harus dilakukan dengan segera sesuai dengan keinginan-keinginan masyarakat.” (wawancara pada tanggal 25 Februari 2013)

Berikut program-program pemberdayaan masyarakat Desa Sumberpasir pada periode 2009-2013 adalah sebagai berikut:

1. Pengaktifan kelembagaan UPK
2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, dengan kegiatan:
  - a. Pelaksanaan Gotong Royong
  - b. Perlombaan Desa
  - c. Musrenbang desa
  - d. Pembangunan Fisik
3. Peningkatan ekonomi produktif, dengan kegiatan:

- a. Pelatihan Pande Besi
- b. Pelatihan Bordir

### c. Peran Pemerintah Sebagai Pembina

Dalam meningkatkan kemajuan dan perkembangan pedesaan, maka kepala desa mempunyai tugas dalam membina masyarakat. Pembinaan merupakan salah satu unsur dalam proses pemberdayaan masyarakat, dengan adanya pembinaan diharapkan masyarakat desa Sumberpasir tahu dan mengerti yang harus dikerjakan sehingga akan menimbulkan keinginan untuk ikut aktif dalam setiap program pemberdayaan masyarakat. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Muhdlor selaku Kepala Desa mengatakan:

“Pembinaan yang dilakukan pemerintah desa Sumberpasir mencakup beberapa bidang, dalam proses pembinaan kami harapkan masyarakat desa Sumberpasir ikut berpartisipasi ”.(wawancara pada tanggal 26 Februari 2013)

Pemerintah Desa Sumberpasir mempunyai tujuan untuk merubah sikap masyarakat menjadi lebih baik melalui pembinaan kehidupan masyarakat. dalam hal ini Pemerintah Desa Sumberpasir melalui kegiatan-kegiatan formal maupun informal untuk mengajak dan mendorong masyarakat untuk berdiskusi disetiap kegiatan-kegiatan agar mereka mempunyai kesadaran dan kemauan untuk berubah menjadi lebih baik. melalui pembinaan masyarakat akan mempunyai semangat untuk membangun sehingga akan lebih berdaya. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Fauzan Hadi selaku Kaur Pembangunan yang mengatakan bahwa:

“Dalam membina kehidupan masyarakat desa Sumberpasir kami terlebih dahulu melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan mengajak masyarakat untuk berdialog, selain itu dalam pembinaan diberbagai

bidang salah satunya dibidang agama kami melakukan pendekatan keagamaan dengan cara mengadakan kegiatan pengajian setiap minggu”.(wawancara pada tanggal 27 Februari 2013)

Aktivitas pembinaan kehidupan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Desa khususnya Kepala Desa Sumberpasir secara garis besar mencakup berbagai bidang yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

### **1. Pembinaan masyarakat dalam Bidang Ekonomi**

Mengingat keadaan desa sumberpasir yang perekonomiannya didominasi pada sektor pertanian, maka Pemerintah Desa Sumberpasir bekerjasama dengan dinas pertanian dalam memberikan penyuluhan tentang sistem pengelolaan pola tanam padi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhdlor selaku Kepala Desa Sumberpasir yang mengatakan bahwa:

“ Kami bekerjasama dengan dinas pertanian untuk memberikan penyuluhan kepada warga tentang pola tanam, pemilihan bibit, penggunaan teknologi yang modern serta perbaikan sistem irigasi.” (wawancara pada tanggal 25 Februari 2013)

Pendapat tersebut diperkuat dengan Bapak Huri salah satu warga Desa Sumberpasir yang mengatakan bahwa:

“Dengan adanya penyuluhan dari pemerintah desa dan dinas pertanian, secara tidak langsung akan menambah pengetahuan saya tentang pola tanam yang baik serta pemilihan bibit padi yang baik pada saat musim rendengan maupun ketiga.” (wawancara pada tanggal 25 Februari 2013)

Selain adanya penyuluhan Dinas Pertanian juga memberikan bantuan bibit dan pupuk murah kepada petani melalui Gapoktan. selain itu petani yang ada didesa Sumberpasir diberikan kemudahan dalam hal permodalan melalui dana perkeriditan rakyat yang dikelola oleh UPK Amanah yang ada didesa Sumberpasir sehingga petani bisa dengan mudah memperoleh modal untuk

mengembangkan usahanya dan cicilan dalam pembelian pupuk murah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mastuki selaku petani Desa

Sumberpasir yang mengatakan bahwa:

“ alhamdulillah mbak, dengan adanya bantuan bibit serta pupuk murah dari dinas pertanian, saya bisa mengerjakan sawah tanpa perlu repot-repot memikirkan biaya pembelian bibit sekarang saja harga bibit inpari 10 kgnya mencapai harga Rp.85.000 lumayan mbak bisa menghemat biaya pembelian bibit (wawancara pada tanggal 26 Februari 2013)

## 2. Pembinaan masyarakat dalam Bidang Kesehatan

Dalam meningkatkan kesehatan masyarakat desa Sumberpasir, Pemerintah Desa mengadakan kegiatan posyandu disetiap dusun, kegiatan posyandu tersebut terdiri dari kegiatan posyandu lansia, kegiatan posyandu balita dan kegiatan posyandu ibu hamil. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhdlor selaku Kepala desa yang mengatakan:

“kegiatan posyandu yang ada didesa Sumberpasir dilakukan setiap sebulan sekali, dari kegiatan posyandu tersebut kami harapkan masyarakat desa antusias dalam memeriksakan kesehatan mereka serta kesehatan anak-anak mereka”. (wawancara pada tanggal 27 Februari 2013)

Begitu perhatiannya pemerintah desa Sumberpasir dalam bidang kesehatan terbukti dengan diadakannya kegiatan posyandu balita dan ibu hamil setiap 1 (satu) kali dalam sebulan di 6 posyandu yang ada di tiap dusun. posyandu balita kegiatannya berupa pemberian imunisasi, pemberian vitamin A pada balita, penimbangan balita dan pemberian makanan tambahan bagi anak-anak usia dini, sedangkan posyandu bagi ibu hamil kegiatannya seperti penyuluhan kepada ibu baik ibu-ibu menyusui maupun nifas, pemberian vitamin penambah darah bagi kesehatan ibu hamil serta pemberian susu gratis pada ibu hamil guna

meningkatkan gizi pada ibu hamil. sedangkan posyandu lansia diadakan setiap 2 (dua) bulan sekali dengan mendatangkan dokter dari puskesmas kegiatannya seperti penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan serta pemeriksaan kesehatan seperti cek darah dll. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sum selaku pengurus PKK mengatakan:

“Agar kesehatan ibu dan anak tetap terjaga masih dalam kandungan, pemberian gizi ibu hamil dan nutrisi pada anak sangat perlu diperhatikan sejak anak masih dalam kandungan, hal ini dikarenakan agar mengurangi angka kematian ibu dan anak, serta menjaga anak lahir cacat dan mengalami gangguan”. (wawancara pada tanggal 28 Februari 2013)

Pendapat tersebut diatas diperkuat dengan pendapat Ibu Siti salah satu warga Desa Sumberpasir yang mengatakan:

“ Saya sangat senang mbak dengan adanya posyandu disetiap dusun saya tidak perlu jauh-jauh memeriksa anak saya di puskesmas, selama kegiatan posyandu berlangsung anak saya mendapat makanan tambahan seperti kacang ijo, biskuit, telur puyuh serta buah-buahan untuk meningkatkan gizi dan kesehatan anak saya ”. (wawancara pada tanggal 28 Februari 2013)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan posyandu yang ada didesa Sumberpasir mempunyai banyak manfaat bagi kaum ibu-ibu, lansia wanita serta anak-anak balita, selain mendapatkan informasi tentang kesehatan mereka juga bisa mendapatkan pengobatan gratis.

### **3. Pembinaan masyarakat dalam Bidang Keagamaan**

Agar kehidupan beragama di kalangan masyarakat desa terhindar dari perbuatan asusila seperti berjudi, minum-minuman keras dan perbuatan-perbuatan yang melanggar norma dan kaidah, Pemerintah Desa melakukan pembinaan kepada masyarakat desa Sumberpasir melalui kegiatan-kegiatan rutin seperti jamaah tahlil, jamaah khataman, jamaah tiba’, dan jamaah yasinan. dengan adanya

kegiatan tersebut pemerintah desa akan dengan muda untuk membina serta mengkoordinir kegiatan keagamaan. Berikut pendapat Bapak Muklas salah satu warga yang mengikuti jamaah tahlil mengatakan:

“Dengan adanya jamaah tahlil yang dilakukan setiap seminggu sekali akan membentuk kepedulian masyarakat untuk memupuk semangat tali silaturahmi dengan sesama warga, dalam kegiatan jamaah tahlil tersebut diselingi dengan arisan yang biayanya Rp. 1000 jika arisan tersebut tidak diambil maka uang arisan tersebut dimasukkan dalam kas RT”. (wawancara pada tanggal 04 Maret 2013)

Penjelasan tersebut diatas diperkuat dengan pendapat dari ibu Mukhifah salah satu warga yang mengikuti jamaah pengajian mengatakan :

“ Kegiatan pengajian kaum ibi-ibu biasanya dilakukan setiap 1 bulan sekali tepatnya Jumat pahing, kegiatan pengajian tersebut dilakukan dipanti asuhan Siti Khotidjah yang mendatangnya kyai dari luar daerah”. (wawancara pada tanggal 205 Maret 2013)

Demi menunjang pelaksanaan kegiatan keagamaan, pemerintah desa Sumberpasir memberikan bantuan dana untuk perbaikan tempat-tempat ibadah seperti: renovasi mushollah yang ada di dusun Krajan, renovasi mushollah yang ada di dusun Ngerangin, renovasi masjid Darussalam yang ada di dusun Gagakasinan, renovasi masjid yang ada di dusun Botohputih serta renovasi masjid jami’ yang ada didusun Krajan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Muhdlor selaku Kepala Desa Sumberpasir mengatakan:

“Dalam menunjang kenyamanan beribadah masyarakat desa Sumberpasir, kami selaku pemerintah desa memberikan bantuan dalam merenovasi atau membangun sarana ibadah disetiap dusun, dengan bantuan tersebut kami harapkan masyarakat bisa merasa nyaman sehingga kegiatan keagamaan bisa berjalan dengan baik”. ( wawancara pada tanggal 27 Februari 2013)

Pendapat tersebut diatas diperkuat dengan pendapat dari Ibu Nining selaku Sekertaris Desa mengatakan:

“Kegiatan perenovasian mushollah yang ada di desa Sumberpasir, Pemerintah desa memberikan bantuan dana rata-rata Rp. 1.000.000,00 tiap tahun, dana tersebut berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD)”. (wawancara pada tanggal 28 Februari 2013)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan kegiatan pembinaan kehidupan masyarakat melalui pendekatan keagamaan yang ada di desa Sumberpasir tetap berjalan dengan baik hal ini terbukti dengan terpeliharannya kegiatan keagamaan yang bersifat rutin seperti jamaah khataman, jamaah yasinan, dan jamaah pengajian dll. dengan adanya kegiatan keagamaan tersebut masyarakat bisa mendapatkan siraman rohani serta bisa mempererat hubungan talisilahturahmi antar warga desa. Selain itu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan keagamaan pemerintah desa Sumberpasir memberikan bantuan dana untuk perenovasian tempat-tempat ibadah.

#### **4. Pembinaan masyarakat dalam Bidang Kepemudaan**

Kegiatan pembinaan kepemudaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sumberpasir melalui Sosialisasi tentang bahaya narkoba, dimana kegiatan sosialisasi tersebut bertujuan untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat Desa Sumberpasir akan bahaya narkoba yang dapat merusak kelangsungan hidup bangsa, khususnya generasi muda. Penggunaan Narkoba dalam pergaulan tidak mengenal usia, profesi, dan status sosial pengguna narkoba, dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan masyarakat desa Sumberpasir dapat mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhdlor selaku Kepala Desa yang mengatakan:

“Sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa dengan pihak BNN terkait bahaya narkoba. dalam sosialisasi tersebut kami memberikan penjelasan tentang jenis-jenis narkoba yang harus di waspadai, termasuk dampak

buruk dari penyalahgunaannya, serta aspek hukum dari tindak pidana narkoba”. (wawancara pada tanggal 06 Maret 2013)

Pendapat tersebut di perkuat dengan pendapat Bapak Yudi selaku Anggota LPMD yang mengatakan:

“Sosialisasi Bahaya Narkoba yang dilakukan pemerintah desa dengan pihak BNN menarik masyarakat desa khususnya kaum pemuda untuk turut serta dalam memberantas penyalagunaan narkoba yang ada dilingkungan desa Sumberpasir”. (wawancara pada tanggal 07 Maret 2013)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menggambarkan bahwa Pemerintah Desa Sumberpasir telah memberikan pembinaan dibidang kepemudaan dengan cara memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat desa khusunya kaum pemuda . dalam kegiatan tersebut Pemerintah Desa bekerjasama dengan pihak BNN Kabupaten Malang, dengan adanya kegiatan sosialisasi tersebut diharapkan generasi pemuda di Desa Sumberpasir bisa terbebas dari bahaya narkoba.

##### **5. Pembinaan masyarakat dalam Bidang Pendidikan**

Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini maka pemerintah desa melakukan peningkatan sarana pendidikan melalui pendirian beberapa PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) ditiap dusun salah satunya PAUD yang Al-Hikmah yang ada di dusun Krajan. sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Muhdlor selaku Kepala Desa Sumberpasir mengatakan:

“Dalam meningkatkan pendidikan yang berkualitas, maka pemerintah desa mendirikan sarana pendidikan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) disetiap dusun, sampai saat ini PAUD yang ada di desa Sumberpasir murni dikelola oleh warga desa Sumberpasir”. (wawancara pada tanggal 27 Februari 2013)

Pendapat tersebut diperkuat dengan penjelasan Ibu Umi salah satu warga Sumberpasir mengatakan :

“ Alhamdulillah mbak, dengan adanya PAUD Al-Hikmah yang ada di dusun Krajan saya tidak perlu jauh-jauh menyekolahkan anak saya ditempat lain, apalagi kalau menyekolahkan ke Play Group yang ada di kota biayanya terlalu mahal, selain itu jauh dari rumah saya ”. (wawancara pada tanggal 07 Maret 2013)

Selain itu untuk mensukseskan program belajar 9 tahun pemerintah desa memberikan kemudahan kepada masyarakat miskin atau masyarakat yang berpenghasilan rendah dalam proses pengurusan surat-surat keterangan tidak mampu agar masyarakat tersebut bisa lebih semangat dalam menyekolahkan anaknya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhdlor selaku Kepala

Desa mengatakan:

“Dalam mendukung program wajib belajar 9 tahun, pemerintah desa memberikan kemudahan kepada masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan beasiswa (subsidi dari pemerintah) dengan cara memberikan kemudahan dalam hal pengurusan surat keterangan tidak mampu”. (wawancara pada tanggal 08 Maret 2013)

Pendapat tersebut diperkuat dengan penjelasan Ibu Nining selaku Sekertaris Desa yang mengatakan:

“ Untuk memudahkan masyarakat desa Sumberpasir yang tidak mampu, kami memberikan kemudahan dalam pengurusan surat keterangan tidak mampu, dalam penguruan tersebut kami tidak memungut biaya, lain lagi dengan masyarakat yang tergolong menengah keatas kami pungut biaya sebesar Rp. 5000,00”. (wawancara pada tanggal 08 Maret 2013)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembinaan dibidang pendidikan yang dilakukan Pemerintah Desa Sumberpasir yaitu melalui peningkatan sarana pendidikan seperti Paud serta kemudahan dalam

proses pengurusan surat keterangan tidak mampu untuk warga yang tidak mampu untuk mendapatkan beasiswa.

## 6. Pembinaan masyarakat dalam Bidang Keamanan

Untuk menciptakan lingkungan desa yang aman, damai, tentram dan tertib di desa Sumberpasir, Pemerintah Desa memberikan pembinaan dan pengarahan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan siskamling setiap hari. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhdlor selaku Kepala Desa mengatakan:

“Saya memberikan arahan kepada masyarakat desa melalui RT atau RW yang ada di setiap dusun untuk mengaktifkan kegiatan poskamling setiap hari agar lingkungan desa Sumberpasir menjadi aman dan damai”. (wawancara pada tanggal 08 Maret 2013)

Pendapat tersebut diatas diperkuat dengan pendapat dari Bapak Qomari selaku RW dusun Krajan yang mengatakan:

“Memang benar kepala desa memerintahkan RT maupun RW yang ada di setiap dusun untuk melakukan kegiatan siskamling setiap hari secara bergiliran dimana setiap KK (Kepala Keluarga) mendapat giliran 1 (satu) kali dalam seminggu, apabila ada salah satu warga yang tidak bisa hadir maka mereka akan menggati dihari berikutnya”. (wawancara pada tanggal 11 Maret 2013)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa peran serta masyarakat serta adanya arahan dan pembinaan dari pemerintah desa dalam kegiatan siskamling yang ada di desa Sumberpasir telah berjalan dengan baik, kegiatan Siskamling yang dilakukan secara bergiliran akan menciptakan lingkungan yang aman, kondusif dan stabil bagi warga Desa Sumberpasir.

## 2. Upaya Pemerintah Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Desa

Pemerintah Desa Sumberpasir beserta LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) mempunyai beberapa upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mengembangkan peran serta masyarakat dan fungsi lembaga-lembaga desa dengan menetapkan beberapa program-program pemberdayaan sebagai berikut:

### a. Pengaktifan Kelembagaan UPK (Unit Pengelola Keuangan)

Dalam menumbuh kembangkan kesadaran warga desa tentang pentingnya usaha-usaha pembangunan sebagai wujud dari perbaikan kondisi sosial, maka usaha dari pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa yaitu dengan membentuk dan mengoptimalkan fungsi dan peran Unit Pengelola Keuangan dan Usaha (UPKu) sebagai Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. dalam hal ini Pemerintah Desa Sumberpasir mengaktifkan kelembagaan UPKu “Amanah” yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa sekaligus berupaya memberantas kemiskinan masyarakat Desa Sumberpasir.

Berikut hasil wawancara dari Bapak Muhdlor selaku Kepala Desa Sumberpasir:

“Dalam meningkatkan perekonomian masyarakat kami memberikan pinjaman modal dengan bunga yang rendah atau 1,5 persen melalui UPK Amanah, dimana setiap warga yang diberi pinjaman akan mencicil pembayarannya melalui UPK yang ada di desa”.(wawancara pada tanggal 26 Februari 2013)

Dengan aktifnya lembaga perekonomian yang ada di desa, masyarakat tidak perlu repot-repot dalam melakukan pinjaman modal ketempat lain, pemberian pinjaman modal dengan bunga yang rendah akan mempermudah masyarakat desa Sumberpasir dalam membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya.

seperti yang di ungkapkan Bapak Sholi salah satu warga yang mendapatkan pinjaman modal mengatakan:

“saya sangat bersyukur mendapatkan pinjaman modal dari UPKu Amanah, dengan adanya peminjaman modal dengan bunga yang rendah, saya bisa mengembangkan usaha bengkel saya”. (wawancara pada tanggal 04 Maret 2013)

Adanya simpan pinjam yang ada di Desa Sumberpasir sangat membantu warga dalam mengembangkan usahanya untuk berwiraswasta. untuk mendapatkan pinjaman modal dari UPKu Amanah, warga desa harus memenuhi syarat-syarat tertentu. adapun persyaratannya antara lain: Penduduk desa Sumberpasir, KTP dan KK (kartu keluarga) pemohon serta masyarakat desa yang mempunyai tujuan untuk usaha. adapun ketentuan pinjaman dari UPK antara lain:

#### Ketentuan Pinjaman

Peminjam Baru : Perorangan maksimal Rp. 5.000.000,-

Kelompok maksimal Rp. 10.000.000,-

Peminjam Ulang :

- Lancar dapat diberi pinjaman 125% dari pinjaman semula.
- Pernah nunggak / tunggakan 2 pencairan maksimal 75% dari pinjaman
- 3 Bulan pencairan maksimal 50% dari pinjaman
- 4 Bulan / lebih maka tidak dilayani

#### **b. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan**

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, dengan kegiatan sebagai berikut:

## 1. Gotong Royong

Dalam rangka mewujudkan kerukunan, menarik kesadaran masyarakat serta mempererat kebersamaan warga, maka Pemerintah Desa khususnya Kepala Desa Sumberpasir berperan aktif dalam membina dan mengkoordinir kegiatan-kegiatan pembangunan seperti kegiatan Gotong royong perbaikan rumah gakin, gotong royong dalam pembuatan rumah ibadah (Mushollah), Gotong royong dalam pembuatan kantor desa, kerja bakti perbaikan saluran air (drainase), kerja bakti pembersian sungai serta kerja bakti pembersian lingkungan kantor desa. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Muhdlor selaku Kepala Desa yang mengatakan:

“Kegiatan gotong royong maupun kerja bakti yang dilakukan bertujuan untuk menarik kesadaran masyarakat tentang arti kebersamaan dan kesadaran diri bahwa manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain.” (wawancara pada tanggal 14 Maret 2013)

Hal senada juga diungkapkan Bapak Rudho selaku Ketua RT 09 dusun Krajan yang mengatakan bahwa:

” Hampir setiap kegiatan-kegiatan yang ada di Desa Sumberpasir selalu dikerjakan secara bersama-sama, salah satu contohnya saat kerja bakti membersihkan saluran air dan sungai, akan tetapi apabila ada salah satu warga yang berhalangan hadir maka warga tersebut dihimbau untuk memberikan sumbangan berupa makanan dan minuman”. (wawancara pada tanggal 13 Maret 2013)

Jadi dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan gotong royong dan kerja bakti yang ada di Desa Sumberpasir bertujuan untuk menarik kesadaran masyarakat desa. sebelum melakukan kegiatan gotong royong maupun kerja bakti pemerintah desa terlebih dahulu mengumpulkan Kepala dusun, RT, RW, BPD beserta LPMD dari kegiatan tersebut kepala desa menunjuk Ketua RT untuk mengkoordinir

kegiatan tersebut. dengan adanya kegiatan kerja bakti akan menyatukan warga yang jarang bertemu atau jarang bersosialisasi untuk ikut serta dalam menciptakan lingkungan desa yang bersih dan sehat.

## 2. Perlombaan Desa

Berdasarkan Wawancara dengan Bapak muhdlor selaku Kepala Desa mengatakan:

“ Memang benar kami pernah mengikuti lomba desa yang diadakan oleh BKM Kabupaten Malang. meskipun kami tidak bisa masuk dalam 4 (empat) besar, saya berserta masyarakat desa tidak merasa kecewa, untuk kedepannya saya harapkan kan masyarakat Desa Sumberpasir termotivasi untuk mengembangkan dan memajukan Desa Sumberpasir”. (wawancara pada tanggal 13 Maret 2013)

Penyelenggaraan lomba desa yang diadakan BKM Kabupaten Malang dilaksanakan pada bulan April sampai Mei tahun 2010, dalam kegiatan lomba desa BKM Kab. Malang mempunyai tujuan untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat berupa: Penguatan lembaga kemasyarakatan, peningkatan motivasi masyarakat dan swadaya melalui Kegiatan gotong royong.

Adapun unsur Unsur yang dinilai meliputi aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, keamanan, Partisipasi masyarakat, pemerintahan desa/kelurahan, kelembagaan dan PKK. dalam kegiatan tersebut pemerintah desa Sumberpasir memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk ikut turut serta dalam memperjuangkan desa sumberpasir dalam kegiatan lomba desa, meskipun masuk dalam 5 besar dalam perlombaan desa sekabupaten Malang, masyarakat tidak merasa kecewa.

### 3. Musrenbang Desa

Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, pemerintah desa Sumberpasir menetapkan program-program Pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes), dalam hal ini pemerintah desa bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan untuk menyepakati rencana kegiatan untuk tahun anggaran yang nantinya akan direncanakan, dengan mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM Desa) yang sudah disusun. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhdlor selaku Kepala Desa Sumberpasir mengatakan bahwa:

“Adanya musyawarah perencanaan pembangunan desa, maka pemerintah desa bisa menentukan program pembangunan yang sesuai dengan keadaan masyarakat desa, dengan memanggil kepala dusun, ketua LPMD, BPD, tokoh-tokoh masyarakat, serta tokoh agama ,kemudian mempresentasikan kepada undangan tentang tujuan dan sasaran program pembangunan masyarakat kemudian setelah itu direalisasikan ke lapangan”. (wawancara pada tanggal 28 Februari 2013)

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang ada di Desa Sumberpasir berjalan dengan baik hal ini ditunjukkan dengan antusiasnya anggota masyarakat yang terlibat dalam pengambilan keputusan yang telah disepakati bersama meskipun masih ada masyarakat yang tidak berperan dalam menyampaikan pendapat-pendapatnya.

### 4. Pembangunan Fisik

Program pemberdayaan masyarakat yang ada di desa Sumberpasir sebagian berasal dari pemerintah pusat yang melalui PNPM, sebagian lagi berasal

dari pemerintah desa yang berasal dari alokasi dana desa (ADD) dan sebagian lagi berasal dari swadaya masyarakat desa.

Program pemberdayaan yang berupa pembangunan fisik meliputi tersedianya sarana dan prasarana fasilitas umum untuk menunjang segala kebutuhan masyarakat seperti perbaikan jalan, irigasi, perbaikan jembatan dll.

Dalam pembangunan fisik pemerintah desa bekerjasama dengan ketua LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) dan Kaur Pembangunan untuk mensukseskan pelaksanaan pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Fauzan Hadi selaku Kaur Pembangunan yang mengatakan bahwa:

” Dalam mensukseskan program pembangunan yang melibatkan peran seta masyarakat kami mengadakan musyawarah terlebih dahulu ditingkat dusun, dari musyawarah tersebut saya bisa mengetahui keinginan-keinginan pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat baik itu pembangunan fisik maupun non fisik”. (wawancara pada tanggal 07 Maret 2013)

Berikut hasil dari program pembangunan fisik tahun 2009-2013:

Pembangunan dibidang fisik yang dananya berasal dari PNPM meliputi:

1. Damping jalan di dusun Ngrangin RT 16 RW 05
2. Damping jalan di dusun Krajan RT 09 RW 03
3. Damping jalan di dusun Botohputih RT 32 RW 09
4. Rabat makadam jalan di dusun Gagakasinan RT 28 RW 08
5. Plengsengan sungai yang ada di dusun Botohputih
6. Plengsengan sungai yang ada di dusun Krajan
7. Perbaikan jembatan di dusun Ngrangin
8. Perbaikan saluran irigasi pertanian di setiap dusun

#### 9. Pembangunan DAM di dusun Ngrangin

Sementara hasil pembangunan fisik yang berasal dari swadaya masyarakat desa Sumberpasir antar lain:

1. Bedah rumah didusun Krajan RT 09
2. Bedah rumah di dusun Botohputih RT 33
3. Bedah rumah didusun Gagakasinan RT 28
4. Bedah rumah di dusun Ngerangin RT 14, RT 16 dan RT 17
5. Renovasi masjid Jami' Al-Ibrohim di dusun Krajan RT 09 RW 05
6. Renovasi mushollah di dusun Krajan RT 06 RW 02
7. Renovasi mushollah di dusun Ngerangin RT 18 RW 09
8. Penambahan lokal (kelas) PAUD Darussalam di dusun Gagakasinan
9. Penambahan lokal (kelas) TK Muslimat di dusun Krajan

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pembangunan yang ada di Desa Sumberpasir berjalan dengan baik hal ini terbukti dengan adanya peningkatan kebutuhan dasar masyarakat desa Sumberpasir seperti sarana dan prasaran (jalan desa, jembatan, drainase dll) dalam menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat serta tersedianya anggaran pembiayaan baik dari swadaya masyarakat maupun dana dari PNPM dari Pemerintah Pusat serta dana dari Pemerintah Desa yang berasal dari dana alokasi desa (ADD).

#### c. Peningkatan Ekonomi Produktif

Kepala Desa sebagai pemegang jabatan tertinggi di tingkat Desa harus memainkan peranan secara maksimal, agar program yang direncanakan dapat

membuahkan hasil yang baik. dalam upaya untuk meningkatkan usaha ekonomi yang produktif bagi masyarakat desa, Pemerintah Desa Sumberpasir mengalami banyak kendala seperti keterbatasan akses masyarakat dalam pendanaan serta masih rendahnya kapasitas SDM . Seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Muhdlor selaku Kepala Desa Sumberpasir yang mengatakan bahwa:

“Dalam meningkatkan usaha ekonomi masyarakat desa Sumberpasir, kami banyak mengalami kendala seperti pendanaan serta kualitas sumber daya masyarakatnya, maka dari itu kami berupaya meminimalisir hambatan-hambatan yang ada di dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat dengan pemberian pelatihan-pelatihan kepada masyarakat serta bantuan permodalan”. (wawancara pada tanggal 04 Maret 2013)

Menghadapi permasalahan yang terkait dengan keterbatasan akses masyarakat dalam pendanaan serta masih rendahnya kapasitas SDM maka pemerintah desa bekerjasama dengan dinas-dinas terkait seperti dinas diperindag dalam pemberian pelatihan-pelatihan kepada masyarakat desa seperti pelatihan bordir serta pelatihan pembuatan pande besi Berdasarkan hasil penelitian, bentuk-bentuk pelatihan yang diberikan Pemerintah Desa Sumberpasir adalah sebagai berikut:

### **1. Pelatihan Pande Besi**

Keberadaan pembuat pande besi yang ada di Desa Sumberpasir sampai saat ini tetap eksis dan berkembang hal ini terbukti dengan peningkatan jumlah pengerajin pande besi yang semula hanya 2 pengerajin sekarang menjadi 12 pengerajin. produksi yang dihasilkan dalam pembuatan pande besi berupa sabit, pisau, buding, kapak, linggis, cangkul, gathul serta alat pertanian lainnya. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Fauzan Hadi selaku Kaur Pembangunan yang mengatakan :

“Usaha pande besi yang ada di desa Sumberpasir semakin meningkat, hal ini terbukti dari tahun 2009 yang semula pengerajinnya ada 2 orang sekarang menjadi meningkat menjadi 12 orang, untuk menjaga keberlangsungan usaha pande besi yang ada di desa Sumberpasir kami bekerjasama dengan dinas pertanian dalam memberikan pelatihan-pelatihan, bantuan modal serta promosi guna menunjang penjualan produk.”. (wawancara pada tanggal 06 Maret 2013)

Pendapat tersebut diperkuat dengan penjelasan Bapak Mulyono selaku pengrajin Pande Besi yang mengatakan:

“Saya sangat bersyukur, Pemerintah Desa beserta dinas-dinas terkait telah memberikan pelatihan tentang pembuatan pande besi yang baik, sehingga saya bisa berinovasi untuk pembuatan cincin pisau dan gagang pisau dengan baik serta bisa meningkatkan kualitas serta model-model yang bisa meningkatkan harga jual panden besi saya selain itu pemerintah desa juga memberikan bantuan alat-alat seperti pemotong, mesin genset, mesin poles.” (wawancara pada tanggal 07 Maret 2013)

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam mendorong usaha masyarakat melalui pemberian pelatihan-pelatihan dan bantuan modal serta alat-alat pembuatan pande besi bisa dikatakan cukup efektif, karena bisa menjaga keberlangsungan usaha pande besi yang ada di Desa Sumberpasir .

## **2. Pelatihan Bordir**

Dalam keterampilan membordir pemerintah desa bekerjasama dengan dinas diperindag Kabupaten Malang. dengan adanya pelatihan tersebut diharapkan masyarakat desa Sumberpasir khususnya kaum ibu-ibu bisa mendapat penghasilan sendiri. Menurut Ibu Nining selaku Sekertaris Desa Sumberpasir mengatakan:

“Kami mendatangkan dinas Diperindag Kabupaten Malang untuk memberikan pelatihan membordir dalam berbagai busana wanita, mukena, kebaya dan jilbab. dengan adanya kegiatan membordir

diharapkan masyarakat bisa lebih kreatif dan bisa lebih berinovasi”.  
(wawancara pada tanggal 27 Februari 2013)

Selain mengadakan pelatihan membordir busana wanita, mukena, kebaya, dan jilbab, dinas Diperindag juga memberikan pelatihan dalam pemotongan baju, kebaya, mukena serta pembelajaran tentang manajemen pemasaran untuk lebih mengembangkan hasil produksi keluar daerah Malang. seperti diungkapkan oleh Bapak Muhdlor selaku Kepala Desa mengatakan:

“Kegiatan-kegiatan dalam pelatihan bordir dan menyulam biasanya diadakan tiap tahun sekali, dalam tiap tahun pelatihannya berbeda-beda, kemari saja pelatihannya tentang manajemen pemasarannya, sehingga perajin-perajin bordir yang ada di desa Sumberpasir bisa dengan mudah memasarkan hasil produksinya baik melalui pameran-pameran atau bazar”. (wawancara pada tanggal 27 Februari 2013)

Dengan adanya kegiatan membordir yang ada di desa Sumberpasir diharapkan bisa meningkatkan sumber daya manusia (SDM) masyarakat desa Sumberpasir khususnya kaum ibu-ibu. hal tersebut diungkapkan oleh Ibu Indah selaku pengusaha bordir yang ada di Desa Sumberpasir mengatakan bahwa:

“Kegiatan pelatihan bordir biasanya dilakukan di kantor desa Sumberpasir. masyarakat sangat antusias dalam mengikuti pelatihan tersebut terutama bagi kaum ibu-ibu, hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya pengerajin bordir yang ada di desa Sumberpasir. saya harapkan dengan adanya pelatihan tersebut masyarakat desa sumberpasir khususnya kaum ibu-ibu bisa mendapatkan penghasilan tambahan”.  
(wawancara pada tanggal 28 Februari 2013)

Pendapat tersebut diperkuat dengan penjelasan dari Ibu Yuni salah satu warga desa yang pernah mengikuti keterampilan membordir mengatakan:

“ saya merasa senang mengikuti pelatihan keterampilan membordir maupun menyulam, Sebelum saya mengikuti pelatihan saya hanya ibu rumah tangga biasa yang mengurus anak. Tetapi sejak mengikuti ketrampilan membordir dan menyulam saya bisa mendapatkan penghasilan sendiri.” (wawancara pada tanggal 27 Februari 2013)

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pelatihan membordir masyarakat desa Sumberpasir khususnya kaum ibu-ibu bisa lebih kreatif dalam mendesain serta bisa mendapatkan penghasilan sendiri sehingga bisa membantu pendapatan suami .

### **3. Tahap Pemberdayaan Masyarakat**

Untuk mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan maka pemerintah desa Sumberpasir melakukan suatu tahapan kegiatan pemberdayaan yang dimulai dari pemilihan lokasi sampai menuju masyarakat yang mandiri. adapun tahap pemberdayaan yang ada di desa Sumberpasir yaitu:

#### **a. Tahap Perencanaan**

Dalam tahap perencanaan dimana pemerintah desa Sumberpasir sebelum menentukan program-program pemberdayaan terlebih dahulu membuat perencanaan yang strategis dengan mengidentifikasi kebutuhan dan kemauan masyarakat dengan melibatkan LPMD dan ketua RT dan RW. Dalam hal ini kaur pembangunan bertugas sebagai penyeleksi lokasi yang bisa dijadikan lokasi pemberdayaan sedangkan LPMD bertugas sebagai koordinator dan penanggung jawab rencana program pemberdayaan sedangkan ketua RT dan RW sebagai penyampai informasi kepada masyarakat akan perencanaan program pemberdayaan. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Fauzan Hadi selaku Kaur Pembangunan yang mengatakan bahwa:

“Disini saya bertugas sebagai penyeleksi lokasi wilayah yang sekiranya wilayah tersebut bisa dijadikan tujuan dari pemberdayaan dalam hal ini

saya dibantu LPMD beserta ketua RT/RW (wawancara pada tanggal 12 Maret 2013)

Pendapat tersebut diperkuat dengan Bapak Fahrurozi selaku Ketua LPMD yang mengatakan bahwa

“Dalam penyeleksi lokasi yang akan dijadikan program pemberdayaan seperti program peningkatan ekonomi produktif kami memilih lokasi didusun Botoh Putih mengingat disana masyarakatnya kebanyakan memiliki kemampuan membordir sehingga kami akan mengadakan pelatihan-pelatihan yang membordir yang bisa meningkatkan pendapatan tambahan masyarakat selain itu kami juga memilih lokasi di dusun Ngerangin mengingat disana masih banyaknya masyarakat yang usia produktif tidak memperoleh pekerjaan sehingga kami akan mengadakan pelatihan kewirausahaan ”(wawancara pada tanggal 12 Maret 2013).

Dari hasil wawancara, apabila dikaitkan dengan tahapan-tahapan kegiatan pemberdayaan yang dikemukakan oleh (Suharto, 2010:125) maka tahapan tersebut memenuhi tahap 1. seleksi lokasi yaitu dilakukan untuk menentukan tempat atau wilayah pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang diinginkan. Pemilihan lokasi dilakukan sesuai dengan kriteria yang disepakati oleh lembaga, pihak-pihak terkait dan Masyarakat. dalam hal ini Pemerintah Desa Sumberpasir memilih salah lokasi didusun Ngerangin dan dusun Botoh Putih mengingat pemilihan lokasi ini didasarkan adanya masyarakat yang berusia produktif belum mendapatkan pekerjaan tetap sehingga diperlukannya suatu pelatihan kewirausahaan serta banyaknya masyarakat yang memiliki keahlian dalam membordir sehingga program pemberdayaan seperti peningkatan ekonomi produktif akan berjalan sesuai dengan rencana.

#### **b. Tahap Sosialisasi**

Dalam mensukseskan program-program pemberdayaan, salah satunya program peningkatan ekonomi produktif, Pemerintah Desa terlebih dahulu

memanggil perwakilan masyarakat seperti Ketua RT maupun RW yang mewakili masyarakat di tiap lingkungan RT/RW, Ketua LPMD serta BPD yang menjadi perwakilan dari suatu organisasi yang ada di masyarakat beserta tokoh-tokoh masyarakat. yang mana perwakilan masyarakat tersebut mempunyai peran dalam hal penyampaian informasi kepada masyarakat tentang program-program pemberdayaan yang akan dilaksanakan. Berikut wawancara dengan bapak Muhdlor selaku Kepala desa yang mengatakan bahwa:

“sebelum melaksanakan program pemberdayaan kami terlebih dahulu mengadakan rapat, yang mana rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan masyarakat seperti ketua RT/RW, Ketua LPMD, BPD, beserta tokoh-tokoh masyarakat ” (wawancara pada tanggal 13 Maret 2013).  
Pernyataan tersebut diperkuat dengan pendapat Ibu Nining selaku

Sekretaris Desa yang mengatakan bahwa:

“alhamdulillah kegiatan rapat desa banyak dihadiri perwakilan masyarakat dengan kegiatan rapat yang dihadiri perwakilan masyarakat desa akan membantu dan mempermudah pemerintah desa untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai program-program pemberdayaan sehingga kegiatan sosialisasi tersebut akan membangun kesepakatan yang ingin dicapai” (wawancara pada tanggal 12 Maret 2012).

Dari berbagi hasil wawancara, apabila dikaitkan dengan tahapan-tahapan kegiatan pemberdayaan yang dikemukakan oleh (Suharto, 2010:125) maka tahapan tersebut memenuhi tahap 3. sosialisasi pemberdayaan masyarakat yaitu upaya komunikasi kegiatan untuk menciptakan dialog dengan masyarakat. Dengan adanya sosialisasi Pemerintah Desa akan dengan mudah memberikan pemahaman kepada masyarakat desa tentang rencana dan tujuan dari program-program pemberdayaan masyarakat tersebut, sehingga pelaksanaan program pemberdayaan dapat menjadi prioritas untuk segera dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang sudah ditentukan.

Selanjutnya jika dikaitkan dengan tahapan tingkat keberdayaan masyarakat menurut Sulistiyani (2004:83-84) menyatakan bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahapan tersebut dibagi dalam 4 tahapan tingkat keberdayaan masyarakat yaitu: tahapan afektif, tahapan kognitif, tahapan psikomotorik dan tahapan konatif. berdasarkan hasil wawancara diatas maka dengan adanya sosialisasi masyarakat cukup sadar dan peduli thdp kegiatan pemberdayaan hal ini terbukti dengan banyaknya perwakilan masyarakat yang hadir dalam kegiatan rapat desa yang membahas kegiatan pemberdayaan.

### c. Tahap Pelaksanaan

Dari hasil sosialisasi yang dilakukan Pemerintah dengan Masyarakat maka pelaksanaan kegiatan pemberdayaan seperti pelaksanaan dalam pembangunan sarana prasarana masyarakat ikut terlibat dalam melaksanakan pekerjaan dengan ikut berkontribusi baik itu tenaga maupun dana. berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhdlor selaku Kepala Desa mengatakan bahwa:

“dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan seperti jalan , kami melibatkan masyarakat untuk terlibat langsung baik itu melalui tenaga maupun bantuan dana sehingga dengan keterlibatan masyarakat maka program pemberdayaan dalam kegiatan pembangunan sarana prasana akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan keinginan masyarakat”(wawancara pada tanggal 13 Maret 2013).

dari hasil wawancara diatas, Jika dikaitkan dengan teori Tim Delivery (2004) tahap pelaksanaan ini termasuk dalam tahap proses pemberdayaan masyarakat. dalam hal ini masyarakat desa Sumberpasir secara bersama-sama melakukan kegiatan yang sudah direncanakan sejak awal hal ini terbukti dengan

hasil dari pelaksanaan pembangunan seperti rehabilitasi tempat ibadah, pembangunan kantor desa serta rehabilitasi tempat pendidikan.

#### **4. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Memberdayakan Masyarakat Desa**

Terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi Pemerintah Desa Sumberpasir dalam memberdayakan masyarakat desa Sumberpasir yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

##### **a. Faktor Pendukung**

Faktor pendukung Peran Pemerintah Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Desa adalah sebagai berikut:

##### **1. Kerjasama Pemerintah Desa, Masyarakat dan Swasta dalam Memberdayakan Masyarakat**

Kerjasama yang dilakukan Dalam Pemerintah Desa Sumberpasir dengan pihak swasta yaitu dengan memberikan kemudahan dalam bentuk perizinan serta keamanan lingkungan, Sedangkan dari pihak swasta, kerjasama akan mendorong peran swasta untuk memberikan lingkungan kondusif desa sebagai desa tujuan investasi selain itu juga akan menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengganguran masyarakat desa Sumberpasir. Berdasarkan wawancara dengan

Bapak Muhdlor Selaku Kepala Desa Sumberpasir mengatakan:

“Kami memberikan kemudahan dalam bentuk perijinan dan keamanan bagi pendirian beberapa pabrik yang ada di desa Sumberpasir, kami juga mewajibkan pihak pabrik untuk mempekerjakan penduduk asli desa Sumberpasir selain untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa

Sumberpasir, pendirian pabrik juga akan menambah pekerjaan bagi warga desa”. (wawancara pada tanggal 12 Maret 2013)

Pendapat tersebut diperkuat dengan pendapat Ibu Titin selaku Sekretaris

Pabrik Surya Beton yang mengatakan bahwa:

“kami sangat berterimakasih kepada Pemerintah Desa Sumberpasir yang telah memberikan kemudahan perijinan pendirian pabrik sehingga kami bisa merekrut warga desa untuk bekerja dipabrik kami, selain itu kami juga memberikan bantuan materi untuk kepentingan pembangunan yang ada didesa salah satunya bantuan batu, pasir dan mesin pengecor yang digunakan untuk membangun kantor desa Sumberpasir (wawancara pada tanggal 13 Maret 2013)

Dalam hubungan kerjasama antara Pemerintah Desa Sumberpasir dan masyarakat maka pemerintah berperan dalam menyusun kebijakan yang memihak kepada kepentingan masyarakat desa, Sedangkan bagi masyarakat sendiri kerjasama menjadi peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan kesempatan berusaha, dan kesempatan memperoleh peluang untuk bekerja. dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah desa dengan pihak swasta maupun masyarakat maka akan meningkatkan perekonomian desa Pendapat tersebut didukung dengan pendapat Bapak Majid Selaku Warga yang bekerja di Pabrik Surya Beton yang mengatakan:

“Dengan adanya pabrik yang ada di Desa Sumberpasir secara tidak langsung akan menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa Sumberpasir selain itu juga akan menambah manfaat bagi ibu-ibu yang rumahnya berdekatan dengan pabrik untuk membuka usaha warung makan”. (wawancara pada tanggal 12 Maret 2013)

Selain kemitraan dalam bidang industri pemerintah desa Sumberpasir juga melakukan kemitraan dengan dinas-dinas terkait dalam upaya meningkatkan ekonomi produktif masyarakat desa, dalam hal ini kerjasama yang dilakukan

dengan dinas-dinas terkait seperti pelatihan keterampilan dan permodalan. Berdasarkan Wawancara dengan Ibu Nining selaku Sekertaris Desa mengatakan bahwa:

“Kerjasama yang dilakukan pemerintah desa dengan dinas-dinas terkait seperti pemberian pelatihan kerajinan bordir kepada masyarakat dalam hal ini pihak swasta memberikan alat-alat seperti mesin bordir sedangkan pemerintah desa memberi kewenangan pembuatan peraturan serta menciptakan iklim usaha yang kondusif dan melakukan pembinaan dan pengembangan berupa bimbingan dan bantuan dalam memasarkan produk. (wawancara pada tanggal 14 Maret 2013)

Dari beberapa wawancara dapat disimpulkan bahwa adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah Desa, pihak swasta serta masyarakat dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dimana tugas dari pemerintah desa Sumberpasir yaitu menciptakan iklim usaha yang kondusif serta pembuat kebijakan yang memihak masyarakat desa sedangkan dipihak masyarakat, masyarakat akan memperoleh kesempatan pekerjaan dan berwirausaha sedangkan dipihak swasta akan memperoleh keuntungan dalam hal perijinan serta lingkungan yang kondusif .

## **2. Anggaran Dana**

Anggaran Dana menjadi salah satu faktor yang dapat mensukseskan pembangunan, dengan adanya anggaran yang sesuai dengan target maka pembangunan baik sarana prasana akan berjalan dengan baik. .berikut hasil wawancara dengan Bapak Fauzan Hadi selaku kaur Pembangunan yang mengatakan bahwa:

“dengan adanya anggaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan seperti perbaikan jalan, pembuatan jembatan dll maka pembangunan cepat terealisasikan akan tetapi jika anggaran yang berasal dari pemerintah pusat tidak sesuai atau kurang maka pembangunan akan

menjadi terhambat dan akan memakan waktu lama”. (wawancara pada tanggal 20 Maret 2013)

Pendapat tersebut diperkuat dengan pendapat Bapak Muhdlor selaku Kepala Desa yang mengatakan bahwa:

“Pembangunan-pembangunan dibidang fisik seperti jalan, jembatan dll yang ada didesa Sumberpasir terbilang lancar hal ini dikarenakan anggaran dana yang turun dari pemerintah pusat sesuai dengan proposal yang diajukan selain itu adanya bantuan-bantuan dana dari masyarakat selain itu pada tahun 2011 kemarin kami mendapatkan dana hibah sebesar RP. 125.000.000,00 dana tersebut kami masukkan ke ADD yang kemudian nanti akan di gunakan dalam pembangunan sarana prasarana yang ada di desa seperti jalan, drainase dll (wawancara pada tanggal 21 Maret 2013)

#### **b. Faktor Penghambat**

Faktor penghambat Peran Pemerintah Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Desa adalah sebagai berikut:

##### **1. Partisipasi Masyarakat Desa**

Partisipasi merupakan satu elemen penting dalam pemberdayaan masyarakat. dimana masyarakat merupakan komponen utama yang harus dilibatkan dalam setiap proses pemberdayaan. Oleh karena itu untuk kelancaran proses pemberdayaan maka masyarakat selaku dari obyek dan subyek dari pemberdayaan masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam berbagai bentuk seperti kesediaan masyarakat untuk menghadiri rapat-rapat yang dilaksanakan di desa, memberi ide atau gagasan, menyumbang tenaga maupun berupa uang atau barang. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhdlor selaku Kepala Desa Sumberpasir mengatakan bahwa:

“Masyarakat desa Sumberpasir sangat antusias dalam menghadiri rapat-rapat atau musyawarah yang diselenggarakan oleh Pemerintah desa akan tetapi masih ada saja masyarakat yang masih acuh dan pasrah bahkan belum berani mengajukan usulannya sehingga usulan-usulan pembangunan banyak didominasi dari pendapat orang-orang yang tetap”. (wawancara pada tanggal 21 Maret 2013)

Jadi dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat desa Sumberpasir tergolong kurang hal ini terbukti masih ada masyarakat desa Sumberpasir yang tidak peduli, lebih sibuk bekerja, pasrah, merasa canggung serta tidak berani dalam menyampaikan pendapatnya atau mengajukan usulannya secara langsung sehingga menyebabkan proses pemberdayaan masyarakat menjadi terhambat maka dari itu Pemerintah Desa berharap masyarakat ikut turut aktif dari mulai proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

## 2. Budaya Malas

Dalam melaksanakan tugasnya pemerintah desa mengalami salah satu hambatan salah satunya yaitu budaya malas yang ada di dalam diri masyarakat desa. dalam hal ini Pemerintah Desa telah berupaya memberdayakan masyarakat melalui pemberian pelatihan-pelatihan salah satunya pelatihan membordir akan tetapi dalam pelatihan tersebut masih ada saja masyarakat yang belum bisa mempraktekan hasil latihannya dengan baik. berdasarkan wawancara dengan bapak Muhdlor selaku Kepala Desa mengatakan bahwa:

“Kami telah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Pemberian pelatihan-pelatihan salah satunya pelatihan membordir, akan tetapi masyarakat masih saja belum mempraktekan hasil pelatihan tersebut dengan baik hal ini dikarenakan kesibukan mereka mengurus anak”. (wawancara pada tanggal 18 Maret 2013)

Pendapat tersebut diperkuat dengan Ibu Maslakha salah satu anggota LPMD yang mengatakan:

“Saya sudah memberikan pelatihan dan memberikan pinjaman mesin bordir kepada warga akan tetapi masih ada warga yang belum bisa mempraktekan pelatihan yang diberikan Pemerintah Desa”. (wawancara pada tanggal 19 Maret 2013)

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa sudah berupaya dalam memberdayakan masyarakat desa Sumberpasir dengan memberikan pelatihan keterampilan membordir akan tetapi masih ada masyarakat yang belum mempraktekan pelatihan tersebut dengan baik hal ini dikarenakan kesibukan mereka baik dalam mengurus anak ataupun membantu suami di sawah.

### 3. Ketersediaan Fasilitas

Dalam melaksanakan tugasnya, Pemerintah Desa membutuhkan fasilitas dalam menjalankan fungsinya, dengan adanya fasilitas yang tersedia maka akan menunjang kelancaran suatu kegiatan yang akan dilaksanakan, dimana salah satu faktornya yaitu tersedianya kantor desa dalam menunjang terselenggaranya pemerintahan desa dan sebagai tempat dalam menjalankan tugas dalam pengelolaan berbagai kegiatan.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat dipengaruhi oleh adanya fasilitas yang dapat menunjang dalam kelancaran suatu kegiatan seperti dalam rapat desa maupun kegiatan penyuluhan pertanian akan berjalan lancar jika tersedianya peralatan tulis menulis misalnya papan tulis, LCD, Proyektor, Materi Penyuluhan, dan ketersediaan tempat duduk yang digunakan dalam rapat dan penyuluhan..

Berdasarkan wawancara dengan Bapak H.Mat selaku Tokoh Masyarakat desa Sumberpasir yang mengatakan bahwa:

“Fasilitas yang disediakan Pemerintah Desa Sumberpasir selama memberikan penyuluhan sangat memberikan pengaruh terhadap jalanya penyuluhan tersebut hal ini dikarena fasilitas sangat dibutuhkan untuk

menunjang terselenggaranya kegiatan desa dengan baik, contohnya bulan Februari kemarin waktu banyaknya petani yang mengalami gagal panen karena musin rendengan, Pemerintah Desa yang bekerjasama dengan dinas pertanian Kabupaten Malang mengadakan penyuluhan pertanian, dalam hal ini sebagian masyarakat kurang tertarik dan mengerti tentang penyuluhan yang diberikan hal ini dikarenakan penyampaian seperti orang berpidato dan terkesan monoton akan tetapi jika penyampaian tersebut dilakukan dengan menggunakan fasilitas seperti Proyektor, LCD, serta materi penyuluhan yang berbentuk hard copy maka masyarakat secara tidak langsung akan merasa tertarik dan pahan tentang materi yang diberikan sehingga masyarakat desa Sumberpasir akan dengan mudah untuk mempraktekannya”. (wawancara pada tanggal 20 Maret 2013)

Hal ini diperkuat dengan pendapat Bapak Fauzan Hadi selaku Kuar

Pembangunan yang mengatakan bahwa:

“dalam kegiatan penyuluhan yang diadakan bulan Februari kemarin, memang kami mengalami sedikit masalah seperti kekurangan tempat duduk, tidak adanya Proyektor serta LCD sehingga sebagian masyarakat yang mengikuti tidak begitu paham dan mengerti tentang materi yang disampaikan oleh penyuluh karena penjelasannya tanpa menggunakan papan tulis dan LCD. hal ini menjadi faktor kendala dalam mensukseskan program pemberdayaan masyarakat yang lain.” (wawancara pada tanggal 20 Maret 2013)

Jadi dapat disimpulkan bahwa tersedianya fasilitas dapat mempengaruhi peran serta masyarakat dalam mencapai suatu pembangunan, dengan semakin lengkapnya fasilitas yang diberikan Pemerintah Desa Sumberpasir dalam kegiatan rapat desa maupun penyuluhan pertanian seperti LCD, Papan Tulis, Proyektor, Materi Penyuluhan serta ketersediaanya tempat duduk yang memadai akan membuat peran serta masyarakat semakin meningkat hal ini berbeda jika fasilitas yang tersedia kurang maka akan menyebabkan peran serta masyarakat menjadi turun.

### C. Analisis Data Fokus Penelitian

#### 1. Peran Pemerintah Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Desa

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 pasal 14 ayat 1 menyatakan bahwa Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan landasan pemikiran dalam UU nomor 32 tahun 2004 mengenai Pemerintahan Desa yaitu *Keanekaragaman, Partisipasi, Otonomi asli, Demokratisasi, Pemberdayaan masyarakat*.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Sumberpasir selaku pelaksana roda pemerintahan serta penanggung jawab dari penyelenggara pemerintahan desa dalam memberikan pengarahannya pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa salah satunya dengan cara pemberdayaan masyarakat desa. Adapun Peran dari Pemerintah Desa Sumberpasir dalam memberdayakan masyarakat sebagai berikut:

##### a. Peran Pemerintah Desa Sebagai Pelaksana Kebijakan

Di dalam Pemerintahan Desa, Kepala Desa dan LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) bekerjasama dan saling membantu dalam menyusun rencana pembangunan yang berbasis pada perbaikan mutu hidup masyarakat desa. upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka penetapan pokok-pokok pikiran sebagai suatu upaya untuk pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat akan lebih maju, sejahtera dan mandiri.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Sumberpasir, kerjasama yang dilakukan Pemerintah Desa Sumberpasir dengan LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) berupa penyusunan rencana pembangunan yang menghasilkan sebuah kebijakan. adapun kebijakan Pembangunan Jangka Menengah desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang tahun 2009-2013 yang dapat dirumuskan dalam rangka pemberdayaan masyarakat adalah :

1. Mengaktifkan dan mengembangkan kelembagaan desa.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat melalui lembaga/organisasi kemasyarakatan baik yang bergerak di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik dalam rangka mendorong kemandirian masyarakat.
3. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi konsumtif menjadi kelompok ekonomi produktif (pengembangan ekonomi unggulan)
4. Memberdayakan kelompok usaha kecil dengan meningkatkan kemampuan kewirausahaan
5. Pengembangan potensi unggulan desa menuju arah Desa Wisata

Jadi dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa dan LPMD yang ada di Desa Sumberpasir mempunyai kerjasama yang baik, hal ini terbukti dengan hasilnya kebijakan tentang pemberdayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sumberpasir terutama masyarakat yang tidak mampu dan tidak berdaya.

#### **b. Peran Pemerintah Desa Sebagai Pelaksana Program-Program**

Program-program pemberdayaan merupakan salah satu upaya pemerintah desa dalam penanggulangan kemiskinan, adanya pendekatan pemberdayaan

masyarakat maka akan menciptakan program-program yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sehingga tercipta kehidupan masyarakat desa yang damai, aman sejahtera serta makmur dalam segala segi, baik segi perekonomian masyarakat serta ketersediaan fasilitas umum yang di perlukan oleh masyarakat desa dalam menunjang kehidupan sehari-harinya.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, Pemerintah Desa Sumberpasir Sebelum membuat Program-program pembangunan diawali dengan musyawarah di tingkat dusun yang bertujuan untuk membahas seluruh usulan kegiatan dari tingkat RT/RW dalam satu dusun, Kemudian dilanjutkan ke musyawarah Desa yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh Agama, RT / RW, LPMD, BPD serta Pemerintah Desa.

Jika dikaitkan dengan prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat menurut Drijver dan Sajise (dalam Sutrisno, 2005:18) ada lima macam, yaitu:

1. Pendekatan dari bawah (*bottom up approach*): pada kondisi ini pengelolaan dan para *stakeholder* setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.
2. Partisipasi (*participation*): dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan.
3. Konsep keberlanjutan: merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapat diterima secara sosial dan ekonomi.

4. Keterpaduan: yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal, regional dan nasional.
5. Keuntungan sosial dan ekonomi: merupakan bagian dari program pengelolaan.

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan, peran pemerintah Desa Sumberpasir dalam melaksanakan program-program sesuai dengan prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat menurut Drijver dan Sajise pada poin pertama yaitu menekankan pendekatan dari bawah (*bottom up approach*). dengan adanya pendekatan dari bawah maka Pemerintah Desa Sumberpasir bisa membuka kesempatan kepada masyarakat desa Sumberpasir untuk terlibat dalam menggali gagasan sehingga program-program tersebut bisa dikendalikan sendiri oleh masyarakat dan pemerintah desa hanya berfungsi sebagai pengontrol pelaksanaan program-program serta ikut mengevaluasi hasil kegiatan yang ada dilapangan.

Berikut program-program pembangunan masyarakat Desa Sumberpasir pada periode 2009-2013 adalah sebagai berikut:

1. Pengaktifan Kelembagaan UPK
2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, dengan kegiatan:
  - a. Pelaksanaan kerja bakti
  - a. Musrenbang desa
  - b. Perlombaan Desa
  - c. Pembangunan Fisik

3. Peningkatan ekonomi produktif, dengan kegiatan:

- a. Pelatihan pembuatan pande besi
- b. Pelatihan keterampilan bordir

Dari hasil penelitian mengenai program-program pembangunan selama periode tahun 2009 sampai 2013 yang ada di Desa Sumberpasir, apabila dikaitkan dengan program-program pembangunan yang baik menurut Tjokroamidjojo (1974:195-196) adalah:

1. Tujuan yang dirumuskan cukup jelas.
2. Penentuan peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut.
3. Suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten dan atau proyek-proyek yang saling berkaitan untuk mencapai program seefektif mungkin.
4. Pengukuran dengan ongkos-ongkos yang diperkirakan dan keuntungan-keuntungan yang diharapkan akan dihasilkan program tersebut.
5. Hubungan dengan kegiatan-kegiatan lain dalam usaha pembangunan dan program pembangunan lainnya. Suatu program pembangunan tidak berdiri.
6. Berbagai upaya dibidang manajemen, termasuk penyediaan tenaga, pembiayaan, dan lain-lain untuk melaksanakan program tersebut

Dikaitan dengan hasil pengamatan dan wawancara, maka Pemerintah Desa Sumberpasir telah melaksanakan program-program pemberdayaan melalui penggalan gagasan dari musyawarah ditingkat dusun yang selanjutnya diteruskan ditingkat musyawarah ditingkat desa hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Tjokroamidjojo pada poin pertama yaitu tujuan yang dirumuskan cukup jelas

sehingga dapat diketahui permasalahan yang ada di desa dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat sehingga aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung.

### c. Peran Pemerintah Desa Sebagai Pembina

Pemerintah Desa khususnya Kepala Desa Sumberpasir mempunyai peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya melalui pembinaan, dengan adanya pembinaan diharapkan masyarakat desa Sumberpasir mempunyai keinginan untuk ikut turut serta dalam setiap kegiatan program pemberdayaan masyarakat.

Menurut *United Nations* (1956:83-92 dalam Tampubolon, 2006) tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah membangun rasa percaya diri masyarakat dan rasa percaya diri merupakan modal utama masyarakat untuk berswadaya. berdasarkan pendapat tersebut maka tujuan dari pemerintah desa sumberpasir dalam meningkatkan keberdayaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dicapai dengan pembinaan diberbagai bidang, dengan adanya pembinaan diharapkan masyarakat bisa menjadi mandiri dan mampu menyokong dirinya agar tidak terjatuh ke dalam posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan .

Berdasarkan hasil Penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pembinaan kehidupan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Desa khususnya Kepala Desa Sumberpasir secara garis besar mencakup berbagai bidang yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

## 1. Pembinaan dalam Bidang Ekonomi

Dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, pemerintah desa Sumberpasir bekerjasama dengan dinas pertanian dalam memberikan penyuluhan tentang sistem pola tanam padi, pemilihan bibit, penggunaan teknologi modern seperti mesin perontok padi serta perbaikan irigasi. sebelum diadakan penyuluhan-penyuluhan dari dinas pertanian masyarakat desa Sumberpasir sering mengalami masalah dalam memberantas hama serta pola tanam.

Berdasarkan hasil data dilapangan dapat disimpulkan bahwa penyuluhan yang diberikan dinas pertanian sangat bermanfaat bagi para petani desa Sumberpasir selain dapat menambah pengetahuan tentang pola tanam yang baik serta pemilihan bibit padi yang baik pada saat musim rendengan maupun ketigo, petani desa sumberpasir juga diberikan bantuan murah melalui Gapoktan, dalam hal ini petani yang ada didesa Sumberpasir diberi kemudahan dalam hal permodalan melalui dana perkriditan rakyat yang dikelola oleh UPK Amanah yang ada didesa Sumberpasir sehingga petani bisa dengan mudah memperoleh modal dan cicilan dalam pembelian pupuk maupun obat-obat pertanian .

## 2. Pembinaan dalam Bidang Kesehatan

Dalam rangka pembinaan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat desa Sumberpasir, Pemerintah Desa mengadakan kegiatan posyandu disetiap dusun, kegiatan posyandu tersebut terdiri dari kegiatan posyandu lansia, kegiatan posyandu balita dan kegiatan posyandu ibu hamil.

Begitu perhatian pemerintah desa Sumberpasir dalam bidang kesehatan terbukti dengan diadakannya kegiatan posyandu balita yang kegiatannya berupa

pemberian imunisasi, pemberian vitamin A pada balita, penimbangan balita dan pemberian makanan tambahan bagi anak-anak usia dini, sedangkan posyandu bagi ibu hamil kegiatannya seperti penyuluhan kepada ibu baik ibu-ibu menyusui maupun nifas ,pemberian vitamin penambah darah bagi kesehatan ibu hamil serta pemberian susu gratis pada ibu hamil guna meningkatkan gizi pada ibu hamil. sedangkan posyandu lansia kegiatannya seperti penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan serta pemeriksaan kesehatan seperti cek darah dll dengan mendatangkan dokter dari puskesmas.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan kesimpulan bahwa kegiatan posyandu yang ada didesa Sumberpasir berjalan dengan baik, hal ini terbukti adanya kegiatan posyandu balita dan ibu hamil yang dilakukan setiap 1 bulan sekali di 6 posyandu ditiap dusun sedangkan untuk kegiatan posyandu lansia diadakan 2 bulan sekali hal ini dikarena posyandu lansia hanya berjumlah 1 tepatnya di dusun Gagakasinan. Kegiatan posyandu tersebut mempunyai banyak manfaat bagi kaum ibu-ibu, lansia wanita serta anak-anak balita, selain mendapatkan informasi tentang kesehatan mereka juga bisa mendapatkan pengobatan gratis.

### **3. Pembinaan dalam Bidang Keagamaan**

Dalam rangka meningkatkan kehidupan beragama serta terhindar dari perbuatan asusila seperti berjudi, minum-minuman keras dan perbuatan-perbuatan yang melanggar norma dan kaidah dikalangan pemuda maka Pemerintah Desa Sumberpasir bersama LPMD melakukan pembinaan kepada masyarakat desa

Sumberpasir melalui kegiatan-kegiatan rutin seperti jamaah tahlil, jamaah khataman, jamaah tiba', jamaah yasinan.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa dengan adanya kegiatan keagamaan yang dilakukan setiap seminggu sekali masyarakat desa Sumberpasir bisa mendapatkan siraman rohani serta bisa mempererat hubungan tali silaturahmi antar warga desa, selain itu juga pemerintah desa akan dengan muda untuk membina serta mengkoordinir kegiatan keagamaan. untuk menunjang kenyamanan dan kelancaran dalam beribadah masyarakat desa Sumberpasir maka Pemerintah Desa Sumberpasir memberikan bantuan-bantuan baik berupa dana atau tenaga untuk memperbaiki tempat-tempat ibadah seperti: renovasi mushollah yang ada di dusun Krajan, renovasi mushollah yang ada di dusun Ngeringin, renovasi masjid Darussalam yang ada di dusun Gagakasinan, renovasi masjid yang ada di dusun Botohputih serta renovasi masjid jami' yang ada didusun Krajan.

#### **4. Pembinaan dalam Bidang Kepemudaan**

Kegitan pembinaan kepemudaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sumberpasir melalui Sosialisasi tentang bahaya narkoba, dimana kegiatan sosialisasi tersebut Pemerintah Desa Sumberpasir bekerjasama dengan pihak BNN Kabupaten Malang, dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat Desa Sumberpasir akan bahaya narkoba yang dapat merusak kelangsungan hidup bangsa, khususnya generasi muda.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa pemerintah desa Sumberpasir telah melakukan upaya dalam membina masyarakat khususnya

kaum pemuda dengan memberikan sosialisasi tentang bahaya narkoba setiap 2 tahun sekali. dengan adanya sosialisasi tersebut masyarakat desa Sumberpasir bisa lebih berhati-hati, mencegah serta bisa memberantas penyalagunaan narkoba yang ada di lingkungan desa Sumberpasir.

### **5. Pembinaan dalam Bidang Pendidikan**

Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini maka pemerintah desa melakukan peningkatan sarana pendidikan melalui pendirian beberapa PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) di tiap dusun salah satunya PAUD Al-Hikmah yang ada di dusun Krajan. dengan adanya PAUD yang ada di tiap dusun maka akan memberikan kemudahan bagi masyarakat desa Sumberpasir untuk menyekolahkan anaknya yang masih balita sehingga masyarakat desa tidak perlu jauh-jauh menyekolahkan anaknya diluar desa Sumberpasir.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Sumberpasir melakukan pembinaan dibidang pendidikan dengan peningkatan sarana pendidikan salah satunya penambahan lokal (Kelas) PAUD Al-Hikmah yang ada di dusun Krajan selain itu Pemerintah Desa Sumberpasir dalam mensukseskan program belajar 9 tahun memberikan kemudahan kepada masyarakat miskin atau masyarakat yang berpenghasilan rendah dalam proses pengurusan surat-surat keterangan tidak mampu agar masyarakat tersebut bisa lebih semangat dalam menyekolahkan anaknya. akan tetapi jika masyarakat tersebut tergolong menengah keatas pemerintah desa memunggut biaya sebesar Rp. 5.000.

## **6. Pembinaan dalam Bidang Keamanan**

Untuk menciptakan lingkungan desa yang aman, damai, kondusif, stabil, tentram dan tertib di desa Sumberpasir, Pemerintah Desa memberikan pembinaan dan pengarahan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan siskamling setiap hari. dalam kegiatan siskamling tersebut Kepala Desa Sumberpasir menunjuk Kepala Dusun untuk mengkoordinir kegiatan siskamling.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Sumberpasir dalam melakukan pembinaan masyarakat dalam bidang keamanan terbukti dengan diadakannya kegiatan siskamling setiap hari. dimana setiap KK (Kepala Keluarga) mendapat giliran 1 (satu) kali dalam seminggu, apabila ada salah satu warga yang tidak bisa hadir maka mereka akan mengganti dihari berikutnya. sebelum diadakannya kegiatan siskamling kondisi keamanan desa sumberpasir diwarnai dengan banyaknya kejahatan salah satunya dengan kejadian pencurian kendaraan sepeda motor warga serta penjambratan yang pernah terjadi di dusun Krajan. maka dari itu pemerintah desa Sumberpasir mengadakan kegiatan siskamling secara bergiliran sehingga akan menciptakan lingkungan yang aman, kondusif dan stabil bagi warga Desa Sumberpasir.

## **2. Upaya Pemerintah Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Desa**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan responden yang dilakukan sebelumnya, Pemerintah Desa Sumberpasir beserta LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mengembangkan peran serta

masyarakat dan fungsi lembaga-lembaga desa dengan menetapkan program-program pemberdayaan sebagai berikut:

**a. Pengaktifan Kelembagaan UPK**

Usaha yang dilakukan Pemerintah Desa Sumberpasir dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa yaitu dengan membentuk dan mengoptimalkan fungsi dan peran dari Unit Pengelola Keuangan dan Usaha (UPKu) sebagai Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yang ada di desa Sumberpasir. dalam hal ini Pemerintah Desa Sumberpasir mengaktifkan kelembagaan UPKu “Amanah” yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa sekaligus berupaya memberantas kemiskinan masyarakat Desa Sumberpasir.

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan, Pemerintah desa Sumberpasir memberikan pinjaman modal dengan bunga yang rendah atau 1,5 persen melalui UPK Amanah, dimana setiap warga yang diberi pinjaman akan mencicil pembayarannya melalui UPK yang ada di desa. dengan aktifnya lembaga UPK Amanah yang ada di desa Sumberpasir masyarakat desa Sumberpasir tidak perlu repot-repot meminjam modal ketempat lain.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pemberian pinjaman modal dari UPKu Amanah dengan bunga yang rendah akan memudahkan masyarakat desa Sumberpasir dalam melakukan pinjaman modal untuk berwirausaha sebelum aktifnya lembaga UPK Amanah kebanyakan dari masyarakat desa melakukan peminjaman kereternir atau bank lain dengan bunga yang lebih tinggi dari UPK Amanah sehingga akan merugikan masyarakat desa yang ingin berwirausaha. untuk mendapatkan pinjaman modal dari UPKu Amanah, warga desa harus

memenuhi syarat-syarat tertentu. adapun persyaratannya antara lain: Penduduk desa Sumberpasir, KTP dan KK (kartu keluarga) pemohon serta masyarakat desa yang mempunyai tujuan untuk usaha.

### **b. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan**

Faktor penting dalam proses pembangunan tergantung pada besar kecilnya peran serta masyarakat, dalam hal ini pembangunan desa sangat memerlukan keterlibatan atau peran serta masyarakat, dalam hal ini pemerintah desa Sumberpasir dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, dengan kegiatan sebagai berikut:

#### **1. Pelaksanaan Kerja Bakti**

Dalam membina dan mengkoordinir kegiatan-kegiatan pembangunan Pemerintah Desa khususnya Kepala Desa Sumberpasir berperan aktif dalam setiap kegiatan seperti gotong royong perbaikan rumah gakin, gotong royong dalam pembuatan rumah ibadah (Mushollah), gotong royong dalam pembuatan kantor desa, kerja bakti perbaikan saluran air (drainase), kerja bakti pembersian sungai serta kerja bakti pembersian lingkungan kantor desa dalam rangka mewujudkan kerukunan, menarik kesadaran masyarakat serta mempererat kebersamaan warga.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan gotong royong dan kerja bakti yang ada di Desa Sumberpasir dilakukan setiap satu bulan sekali tepatnya hari minggu. sebelum melakukan kegiatan kerja bakti pemerintah desa terlebih dahulu mengumpulkan Kepala dusun, RT, RW, BPD beserta LPMD dari kegiatan tersebut kepala desa menunjuk Kepala Dusun untuk mengkoordinir untuk kegiatan tersebut. dengan adanya kegiatan kerja bakti akan menyatukan

warga yang jarang bertemu atau jarang bersosialisasi untuk ikut serta dalam menciptakan lingkungan desa yang bersih dan sehat.

## **2. Perlombaan Desa**

Dengan mengikuti lomba desa yang diadakan oleh BKM Kabupaten Malang, menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Sumberpasir mempunyai tujuan untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat berupa: Penguatan lembaga kemasyarakatan, peningkatan motivasi masyarakat dan swadaya melalui Kegiatan gotong royong. Adapun unsur Unsur yang dinilai meliputi aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, keamanan, Partisipasi masyarakat, pemerintahan desa/kelurahan, kelembagaan dan PKK.

Berdasarkan hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan lomba desa yang diadakan BKM Kabupaten Malang, Pemerintah Desa Sumberpasir terlebih dahulu memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk ikut turut serta dalam memperjuangkan desa sumberpasir dalam kegiatan lomba desa, meskipun desa Sumberpasir hanya masuk dalam 5 besar dalam perlombaan desa sekabupaten Malang, masyarakat tidak merasa kecewa.

## **3. Musrenbang Desa**

Pemerintah Desa Sumberpasir menetapkan program-program Pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes), dalam hal ini pemerintah desa bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan seperti kepala dusun, ketua LPMD, BPD, tokoh-tokoh masyarakat, serta tokoh agama untuk menyepakati rencana kegiatan untuk

tahun anggaran yang nantinya akan direncanakan, dengan mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM Desa) yang sudah disusun.

Menurut Parsons,*et.al.* 1994 (dalam Suharto, 1997:210-224), pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. sedangkan peran serta masyarakat desa Sumberpasir dalam setiap pembangunan terlihat dari terlaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang melibatkan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan. dalam hal ini masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan usulan perencanaan program pembangunan yang ada di desa

#### **4. Pembangunan Fisik**

Program-program pemberdayaan masyarakat yang ada di desa Sumberpasir sumber pembiayaannya sebagian berasal dari pemerintah pusat yang melalui PNPM, sebagian lagi berasal dari pemerintah desa yang berasal dari alokasi dana desa (ADD) dan sebagian lagi berasal dari swadaya masyarakat desa.

Program pemberdayaan yang berupa pembangunan fisik meliputi perbaikan jalan, irigasi, perbaikan jembatan dll. Dalam pembangunan fisik pemerintah desa Sumberpasir bekerjasama dengan ketua LPMD (Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat Desa), BPD dan Kaur Pembangunan untuk mensukseskan pelaksanaan pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat.

Jika dikaitkan dengan teori yang ada, maka pembangunan fisik yang ada di Desa Sumberpasir sesuai dengan pencapaian tujuan pembangunan desa yang dikemukakan oleh R. Bintoro (2003:25) yaitu pembangunan yang dilaksanakan di Wilayah Pemerintahan yang terendah, yaitu Desa dan Kelurahan, ciri utama pembangunan Desa yang terpenting adalah keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan di Desa itu atau Kelurahan baik melaksanakan langsung dalam bentuk swadaya mandiri atau gotong royong. Sasaran utamanya adalah menjadikan Desa-desa diseluruh Indonesia memiliki tingkat perkembangan Desa dengan klasifikasi Desa swasembada yaitu Desa yang maju, dan berkembang dimana masyarakat memiliki taraf hidup dan kesejahteraan yang terus meningkat. Di dalam pembangunan dibidang fisik Pemerintah Desa Sumberpasir telah melibatkan masyarakat desa dalam setiap tahap pembangunan yang diinginkan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa sehingga pembangunan yang dilakukan masyarakat desa dapat berupa dana swadaya maupun tenaga kerja dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di Desa Sumberpasir.

Berikut hasil dari program pembangunan fisik tahun 2009-2013 :

Pembangunan dibidang fisik yang dananya berasal dari PNPM meliputi:

1. Damping jalan di dusun Ngrangin RT 16 RW 05
2. Damping jalan di dusun Krajan RT 09 RW 03
3. Damping jalan di dusun Botohputih RT 32 RW 09

4. Rabat makadam jalan di dusun Gagakasinan RT 28 RW 08
5. Plengsengan sungai yang ada di dusun Botohputih
6. Plengsengan sungai yang ada di dusun Krajan
7. Perbaikan jembatan di dusun Ngrangin
8. Perbaikan saluran irigasi pertanian di setiap dusun
9. Pembangunan DAM di dusun Ngrangin

Sementara hasil pembangunan fisik yang berasal dari swadaya masyarakat desa Sumberpasir antar lain:

1. Bedah rumah di dusun Krajan RT 09
2. Bedah rumah di dusun Botohputih RT 33
3. Bedah rumah di dusun Gagakasinan RT 28
4. Bedah rumah di dusun Ngrangin RT 14, RT 16 dan RT 17
5. Renovasi masjid Jami' Al-Ibrohim di dusun Krajan RT 09 RW 05
6. Renovasi mushollah di dusun Krajan RT 06 RW 02
7. Renovasi mushollah di dusun Ngrangin RT 18 RW 09
8. Penambahan lokal (kelas) PAUD Darussalam di dusun Gagakasinan
9. Penambahan lokal (kelas) TK Muslimat di dusun Krajan

Dengan adanya hasil pembangunan fisik baik yang berasal dari dana PNPM, ADD (Alokasi Dana Desa) maupun dana swadaya masyarakat menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat desa Sumberpasir sangat berperan dalam mensukseskan pembangunan desa tanpa adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan maka pembangunan yang ada di desa Sumberpasir menjadi terhambat.

### c. Peningkatan Ekonomi Produktif

Upaya untuk meningkatkan usaha ekonomi yang produktif bagi masyarakat desa, Pemerintah Desa Sumberpasir mengalami banyak kendala seperti keterbatasan akses masyarakat dalam pendanaan serta masih rendahnya kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia) . dalam menghadapi permasalahan yang terkait dengan keterbatasan akses masyarakat dalam pendanaan serta masih rendahnya kapasitas SDM maka pemerintah desa bekerjasama dengan dinas-dinas terkait dalam pemberian pelatihan-pelatihan kepada masyarakat desa seperti pelatihan bordir serta pelatihan pembuatan pade besi.

Dikaitkan dengan beberapa teori yang ada, maka upaya Pemerintah Desa Sumberpasir dalam memberdayakan masyarakat desa. untuk lebih jelasnya dapat dilihat dibawah ini. upaya memberdayakan masyarakat menurut Kartasasmita (1995:19) adalah :

1. Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Disini titik tolaknya bahwa manusia dan masyarakat memiliki potensi (daya) yang dapat dikembangkan, sehingga pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memberikan motivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
2. Memperkuat potensi yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan sarana dan prasarana baik fisik (irigasi, jalan dan listrik) maupun sosial (sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses masyarakat

lapisan bawah. Terbukanya akses pada berbagai peluang akan membuat rakyat makin berdaya, seperti tersedianya lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di pedesaan.

3. Melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah atau makin terpinggirkan menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam pemberdayaan masyarakat. Melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Sumberpasir, upaya dalam memberdayakan masyarakat desa dengan peningkatan ekonomi produktif yang kegiatannya memberikan pelatihan-pelatihan sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Kartasmita pada poin yang ke dua yaitu melalui pemberian pelatihan-pelatihan keterampilan dengan adanya pelatihan maka masyarakat desa Sumberpasir bisa lebih berinovasi dan kreatif sehingga masyarakat desa Sumberpasir akan semakin berdaya dan mengembangkan usahanya. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk-bentuk pelatihan yang diberikan Pemerintah Desa Sumberpasir adalah sebagai berikut:

#### **1. Pelatihan Pande Besi**

Keberadaan pembuat pande besi yang ada di Desa Sumberpasir sampai saat ini tetap eksis dan berkembang hal ini terbukti dengan peningkatan jumlah pengusaha pande besi yang semula hanya 2 pengrajin sekarang menjadi 12

pengrajin. produksi yang dihasilkan dalam pembuatan pande besi yang ada di Desa Sumberpasir berupa sabit, pisau, buding, kapak, linggis, cangkul, gathul serta alat pertanian lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa melalui pemberian pelatihan salah satunya dengan pelatihan pembuatan Pande besi yang bekerjasama dengan dinas industri dan pertanian dalam memberikan pelatihan tentang pembuatan cincin pisau dan gagang pisau dengan baik serta bisa meningkatkan kualitas serta model-model yang bisa meningkatkan harga jual panden masyarakat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa upaya dalam peningkatan ekonomi produktif dengan kegiatan pemberian pelatihan dan peningkatan model-model desain pembuatan Pande besi yang ada di Desa Sumberpasir berjalan dengan baik hal ini tunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah pengrajin pada tahun 2009 berjumlah 2 orang dan pada tahun 2012 jumlah pengrajin menjadi 12 orang selain itu Pemerintah Desa Sumberpasir memberikan kemudahan kepada pengerajin Pande Besi dengan memasarkan hasil produksinya melalui UPK Amanah serta bazar-bazar maupun pameran ditingkat Kabupaten.

## **2. Pelatihan Bordir**

Dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di desa Sumberpasir maka Pemerintah Desa Sumberpasir bekerjasama dengan dinas diperindag Kabupaten Malang dengan memberikan pelatihan-pelatihan membordir. sebelum adanya pelatihan membordir, masyarakat desa sumberpasir

hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga bahkan ada yang bekerja sebagai buruh tani dengan adanya pelatihan tersebut diharapkan masyarakat desa Sumberpasir khususnya kaum ibu-ibu bisa lebih kreative serta bisa mendapat penghasilan sendiri.

Dalam pelatihan tersebut kegiatannya berupa Pelatihan membordir busana wanita, mukena, kebaya, dan jilbab. Dinas Diperindag juga memberikan bantuan mesin jahit sebanyak 100 unit dan benang untuk keperluan membordir masyarakat desa Sumberpasir selain itu dinas Diperindag juga memberikan pelatihan dalam pemotongan baju, kebaya, mukena serta pembelajaran tentang manajemen pemasaran untuk lebih mengembangkan hasil produksi keluar daerah Malang.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pelatihan membordir yang ada di desa Sumberpasir semakin meningkatkan sumber daya masyarakat desa. hal ini terbukti dengan semakin banyaknya pengerajin bordir yang ada di desa Sumberpasir semakin tahun semakin meningkat dengan jumlah 115 pengerajin Dengan adanya kegiatan membordir yang ada didesa Sumberpasir diharapkan bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat desa Sumberpasir khusunya kaum ibu-ibu selain itu pemerintah desa juga memberikan kemudahan kepada pengerajin bordir dalam menampung hasil kerajinannya untuk dipasarkan melalui Koperasi Sakina atau bazar-bazar.

### **3. Tahap-Tahap Pemberdayaan**

Adapun tahap-tahap pemberdayaan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan yang ada di desa Sumberpasir yaitu sebagai berikut:

### a. Tahap Perencanaan

Hasil penelitian dilapangan menyebutkan bahwa pemerintah desa Sumberpasir sebelum menentukan program-program pemberdayaan terlebih dahulu membuat perencanaan yang strategis dengan melihat kebutuhan dan kemauan masyarakat serta mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dengan melibatkan LPMD dan ketua RT dan RW.

Dalam hal ini, pemerintah desa melakukan penyeleksi lokasi yang bisa dijadikan lokasi pemberdayaan dengan melihat peluang dan kekuatan suatu wilayah yang ada di desa tsb, salah satunya contohnya yaitu Dalam penyeleksi lokasi yang akan dijadikan program pemberdayaan seperti program peningkatan ekonomi produktif pemerintah desa memilih lokasi dusun Botoh Putih mengingat disana masyarakatnya kebanyakan memiliki kemampuan membordir sehingga kami akan mengadakan pelatihan-pelatihan yang membordir yang bisa meningkatkan pendapatan tambahan masyarakat

Dari penjelasan diatas apabila dikaitkan dengan tahapan-tahapan kegiatan pemberdayaan yang dikemukakan oleh (Suharto, 2010:125) maka tahapan tersebut memenuhi tahap 1. seleksi lokasi yaitu dilakukan untuk menentukan tempat atau wilayah pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang diinginkan. dalam hal ini Pemerintah Desa Sumberpasir memilih salah lokasi dusun Ngerangin dan dusun Botoh Putih mengingat pemilihan lokasi ini didasarkan adanya masyarakat yang berusia produktif belum mendapatkan pekerjaan tetap sehingga diperlukannya suatu pelatihan kewirausahaan serta banyaknya masyarakat yang memiliki keahlian dalam membordir sehingga program

pemberdayaan seperti peningkatan ekonomi produktif akan berjalan sesuai dengan rencana.

#### **b. Tahap Sosialisasi**

Setelah melakukan perencanaan program pemberdayaan masyarakat maka Pemerintah Desa terlebih dahulu memanggil perwakilan masyarakat seperti Ketua RT maupun RW yang mewakili masyarakat di tiap lingkungan RT/RW, Ketua LPMD serta BPD yang menjadi perwakilan dari suatu organisasi yang ada di masyarakat beserta tokoh-tokoh masyarakat. yang mana perwakilan masyarakat tersebut mempunyai peran dalam hal penyampaian informasi kepada masyarakat tentang program-program pemberdayaan yang akan dilaksanakan.

Dari berbagai hasil wawancara, apabila dikaitkan dengan tahapan-tahapan kegiatan pemberdayaan yang dikemukakan oleh (Suharto, 2010:125) maka tahapan tersebut memenuhi tahap 3. sosialisasi pemberdayaan masyarakat yaitu upaya komunikasi kegiatan untuk menciptakan dialog dengan masyarakat. Dengan adanya sosialisasi Pemerintah Desa akan dengan mudah memberikan pemahaman kepada masyarakat desa tentang rencana dan tujuan dari program-program pemberdayaan masyarakat tersebut, sehingga pelaksanaan program pemberdayaan dapat menjadi prioritas untuk segera dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang sudah ditentukan.

Selanjutnya jika dikaitkan dengan tahapan tingkat keberdayaan masyarakat menurut Sulistiyani (2004:83-84) menyatakan bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahapan tersebut dibagi dalam 4 tahapan tingkat keberdayaan masyarakat yaitu: tahapan afektif,

tahapan kognitif, tahapan psikomotorik dan tahapan konatif. berdasarkan hasil wawancara diatas maka dengan adanya sosialisasi masyarakat cukup sadar dan peduli thdp kegiatan pemberdayaan hal ini terbukti dengan banyaknya perwakilan masyarakat yang hadir dalam kegiatan rapat desa yang membahas kegiatan pemberdayaan.

#### **d. Tahap Pelaksanaan**

Dalam tahap pelaksanaan, pemerintah desa melakukan pembangunan sarana prasarana masyarakat ikut terlibat dalam melaksanakan pekerjaan dengan ikut berkontribusi baik itu tenaga maupun dana. Jika dikaitkan dengan teori Tim Delivery (2004) tahap pelaksanaan ini termasuk dalam tahap proses pemberdayaan masyarakat. dalam hal ini masyarakat desa Sumberpasir secara bersama-sama melakukan kegiatan yang sudah direncanakan sejak awal hal ini terbukti dengan hasil dari pelaksanaan pembangunan seperti rehabilitasi tempat ibadah, pembangunan kantor desa serta rehabilitasi tempat pendidikan.

#### **4. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Memberdayakan Masyarakat Desa**

Terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi Pemerintah Desa Sumberpasir dalam memberdayakan masyarakat desa Sumberpasir yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

##### **a. Faktor Pendukung**

Faktor pendukung Peran Pemerintah Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Desa adalah sebagai berikut:

## **1. Kerjasama Pemerintah Desa, Masyarakat dan Swasta dalam Memberdayakan Masyarakat**

Kerjasama yang dilakukan Dalam Pemerintah Desa Sumberpasir dengan pihak swasta yaitu dengan memberikan kemudahan dalam bentuk perizinan serta keamanan lingkungan, Sedangkan dari pihak swasta, kerjasama akan mendorong peran swasta untuk memberikan lingkungan kondusif desa sebagai desa tujuan investasi selain itu juga akan menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengganguran masyarakat desa Sumberpasir.

Dari berbagai hasil penelitian mengenai faktor pendukung dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang telah diuraikan diatas, apabila dikaitkan dengan peran aktor dalam pemberdayaan yaitu: pemerintah, swasta dan masyarakat sehingga terbentuk model kemitraan yang dikemukakan oleh (Sulistiyani, 2004). adalah Pemerintah berperan dalam penetapan kebijakan dalam hal ini Pemerintah desa Sumberpasir menyusun kebijakan yang memihak kepada kepentingan masyarakat desa dan mewajibkan pihak pabrik untuk mempekerjakan penduduk asli desa Sumberpasir. sedangkan peran pihak swasta sebagai pemberi lapangan kerja serta dana melalui pajak pendirian pabrik , Sedangkan Peran Masyarakat sebagai partisipan, pelaku utama/ subjek dalam hal ini masyarakat desa Sumberpasir mendapatkan kesempatan berusaha, dan kesempatan memperoleh peluang untuk bekerja.

Dari beberapa wawancara dapat disimpulkan bahwa adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah Desa, pihak swasta serta masyarakat dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dimana tugas dari pemerintah desa

Sumberpasis yaitu menciptakan iklim usaha yang kondusif serta pembuat kebijakan yang memihak masyarakat desa Sumberpasis sedangkan dipihak masyarakat, masyarakat akan memperoleh kesempatan pekerjaan dan berwirausaha sedangkan dipihak swasta akan memperoleh keuntungan dalam hal perijinan serta lingkungan yang kondusif.

## 2. Anggaran dana

Jadi dapat disimpulkan bahwa anggaran dana merupakan salah satu faktor pendukung dalam mensukseskan kelancaran dalam pembangunan yang ada di Desa Sumberpasis . dengan adanya anggaran dana yang sesuai dengan target maka pembangunan yang ada di Desa Sumberpasis cepat terealisasi. salah satunya pembangunan drainase yang ada didusun Ngerangin RT 15 RW 04 yang mana sumber dananya berasal dari APBN sebesar Rp. 2.100.00,00 dan sebagian dana berasal dari swadaya masyarakat yang berjumlah Rp. 900.00,00 dengan adanya dana tersebut maka pembangunan sarana drainase yang ada didusun Ngerangin cepat terealisasikan dan sesuai dengan terget penyelesaian.

Sedangkan dana hiba yang berasal dari Pemerintah Provinsi digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa seperti jalan, jembatan serta digunakan untuk mengembangkan infrastruktur kelembagaan pendukung seperti pengembangan Unit Pengelola Keuangan dan Usaha (UPKu atau UPK) sehingga dengan adanya pengembangan UPK maka masyarakat desa bisa lebih berdaya ,berkreasi dan berinovasi dalam mendayagunakan potensi ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup di desa serta dapat mengembangkan kemandirian dan kemampuan berusaha diberbagai bidang usaha di desa.

Jadi dapat disimpulkan bahwa anggaran dana yang ada di desa Sumberpasir menjadi faktor pendukung dalam mensukseskan program-program pembangunan tanpa adanya anggaran dana yang sesuai maka program-program pembangunan tidak dapat berjalan dengan baik .

## **b. Faktor Penghambat**

Faktor penghambat Peran Pemerintah Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Desa adalah sebagai berikut:

### **1. Partisipasi Masyarakat Desa**

Partisipasi merupakan satu elemen penting dalam pemberdayaan masyarakat. dimana masyarakat merupakan komponen utama yang harus dilibatkan dalam setiap proses pemberdayaan. Oleh karena itu untuk kelancaran proses pemberdayaan maka masyarakat selaku dari obyek dan subyek dari pemberdayaan masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam berbagai bentuk seperti kesediaan masyarakat untuk menghadiri rapat-rapat yang dilaksanakan di desa, memberikan ide-ide atau gagasan, menyumbang tenaga maupun berupa uang atau barang. salah satu contohnya yaitu pada saat musyawarah desa masyarakat .

Jadi dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat desa Sumberpasir tergolong kurang hal ini terbukti masih ada masyarakat desa Sumberpasir yang tidak peduli, lebih sibuk bekerja, pasrah, merasa canggung serta tidak berani dalam menyampaikan pendapatnya atau mengajukan usulannya secara langsung sehingga menyebabkan proses pemberdayaan masyarakat menjadi terhambat

maka dari itu Pemerintah Desa Sumberpasir berharap masyarakat ikut turut aktif dari mulai proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

## **2. Budaya Malas**

Salah satu hambatan yang dapat mempengaruhi tugas pemerintah desa sumberpasir dalam memberdayakan masyarakat yaitu budaya malas yang ada dalam diri masyarakat desa Sumberpasir. Pemerintah Desa Sumberpasir telah berupaya memberdayakan masyarakat melalui pemberian pelatihan-pelatihan salah satunya pelatihan membordir. dalam pelatihan tersebut masyarakat dibekali pengetahuan tentang cara mendesain, memadukan benang, manajemen pemasaran produksi serta pemotongan busana akan tetapi hasil dari pelatihan tersebut masih ada saja masyarakat yang belum bisa mempraktekan latihannya dengan alasan kesibukan mereka baik dalam mengurus anak ataupun membantu suami di sawah.

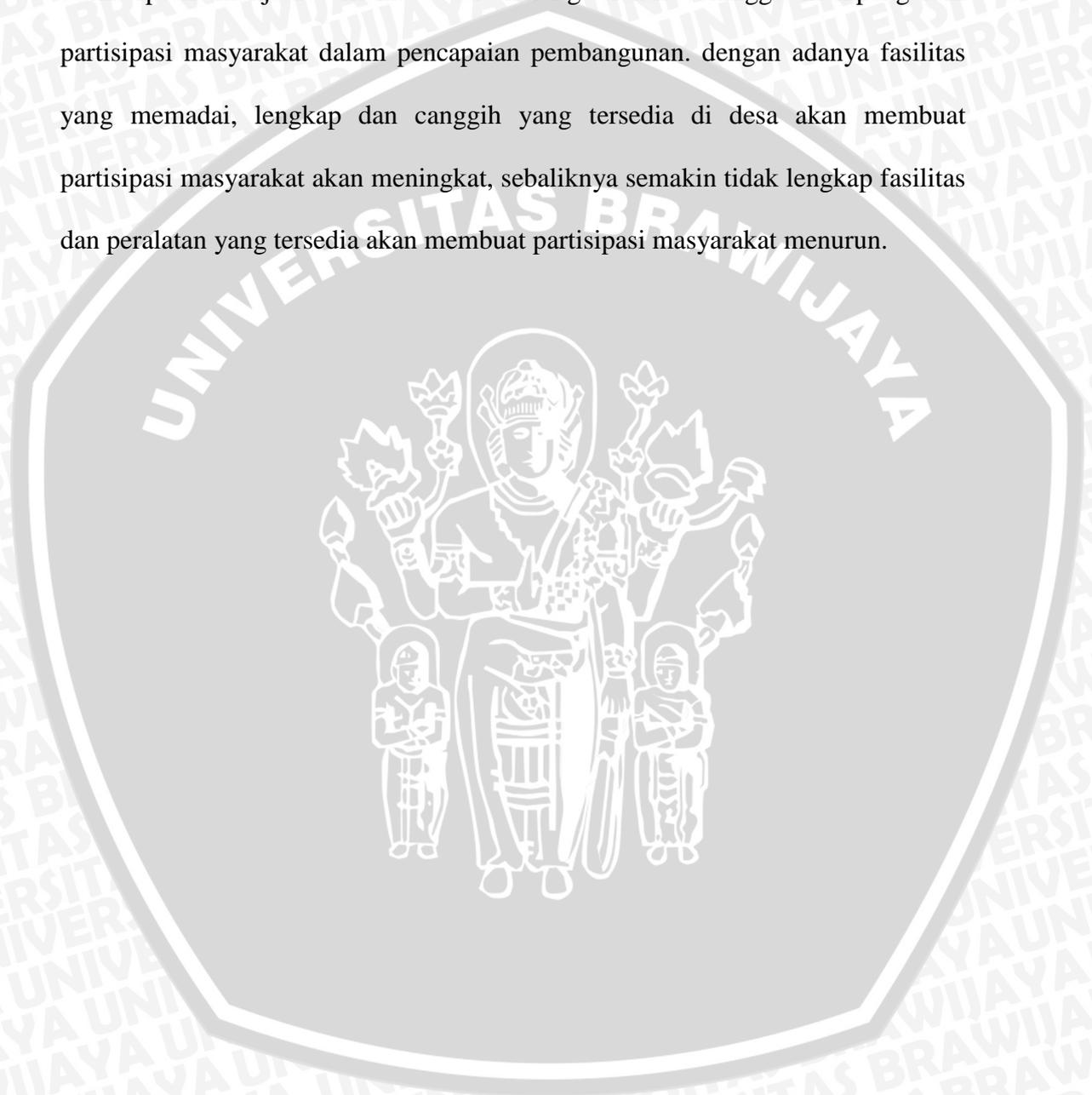
Jadi dapat disimpulkan bahwa budaya malas masyarakat desa sumberpasir menjadi salah satu faktor penghambat pemerintah desa dalam melakukan pemberdayaan

## **3. Ketersediaan Fasilitas**

Dalam menunjang kelancaran dari kegiatan pemberdayaan yang dilakukan pemerintah desa sumberpasir tidak lepas dari adanya fasilitas yang mendukung. fasilitas yang dimaksud yaitu berupa peralatan tulis menulis misalnya papan tulis, LCD, Proyektor, Materi Penyuluhan, dan ketersediaan tempat duduk yang digunakan dalam rapat dan penyuluhan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, tidak adanya fasilitas yang mendukung dalam kegiatan rapat desa maupun penyuluhan pertanian seperti

LCD, Papan Tulis, Proyektor, Materi Penyuluhan serta ketersediaanya tempat duduk yang memadai membuat kegiatan pemberdayaan yang ada di Desa Sumberpasir menjadi terhambat dan kurang efektif sehingga mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pencapaian pembangunan. dengan adanya fasilitas yang memadai, lengkap dan canggih yang tersedia di desa akan membuat partisipasi masyarakat akan meningkat, sebaliknya semakin tidak lengkap fasilitas dan peralatan yang tersedia akan membuat partisipasi masyarakat menurun.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dilakukan penelitian yang dilakukan penulis dengan judul Peran Pemerintah Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Desa, dengan studi di Desa Sumberpasir, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Sumberpasir telah menjalankan perannya dengan baik, yang dibuktikan dengan adanya seleksi desa mandiri...hal ini dapat dilihat melalui, *Pertama* sebagai pelaksana program-program yang menghasilkan beberapa program-program pemberdayaan masyarakat yang telah ditetapkan, antara lain yaitu: Pengaktifan kelembagaan UPK (Unit Pengelola Keuangan) “Amanah”, Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, Peningkatan ekonomi produktif. *Kedua* sebagai pelaksana kebijakan, *Ketiga* sebagai pembina kehidupan masyarakat yang mencakup berbagai bidang seperti bidang ekonomi, bidang pelayanan kesehatan, bidang keagamaan, bidang pendidikan, bidang keamanan serta bidang kepemudaan.
2. Upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Sumberpasir dalam memberdayakan masyarakat melalui program-program yang direncanakan selama tahun 2009-2013 yaitu:

1. Pengaktifan Kelembagaan Unit Pengelola Keuangan (UPK), dengan aktifnya lembaga keuangan desa maka masyarakat desa Sumberpasir akan dengan mudah memperoleh pinjaman modal untuk berwirausaha sehingga masyarakat desa tidak perlu repot-repot meminjam modal ditempat lain.
2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, dengan kegiatan:
  - a. Pelaksanaan kerja bakti, hal ini dapat dilihat dari adanya pelaksanaan kegiatan kerja bakti yang dilakukan setiap sebulan sekali.
  - b. Musrenbang desa, adanya Musrenbangdes maka pemerintah desa bisa menentukan program pembangunan yang sesuai dengan keadaan dan keinginan masyarakat.
  - c. Perlombaan Desa, dengan adanya perlombaan desa maka akan meningkatkan kesadaran warga untuk lebih swadaya dalam membangun desanya.
  - d. Pembangunan Fisik, pembangunan yang ada di Desa Sumberpasir berjalan dengan baik hal ini terbukti dengan adanya peningkatan kebutuhan dasar masyarakat desa Sumberpasir seperti sarana dan prasaran (jalan desa, jembatan, drainase dll) dalam menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat
3. Peningkatan ekonomi produktif, dengan kegiatan:

- a. Pelatihan Pembuatan Pande Besi, dengan adanya pemberian pelatihan-pelatihan dan bantuan modal maka bisa menjaga keberlangsungan usaha pande besi yang ada di Desa Sumberpasir .
- b. Pelatihan Keterampilan Membordir, adanya pelatihan membordir masyarakat desa Sumberpasir khususnya kaum ibu-ibu bisa lebih kreatif dalam mendesain serta bisa mendapatkan penghasilan sendiri sehingga bisa membantu pendapatan suami

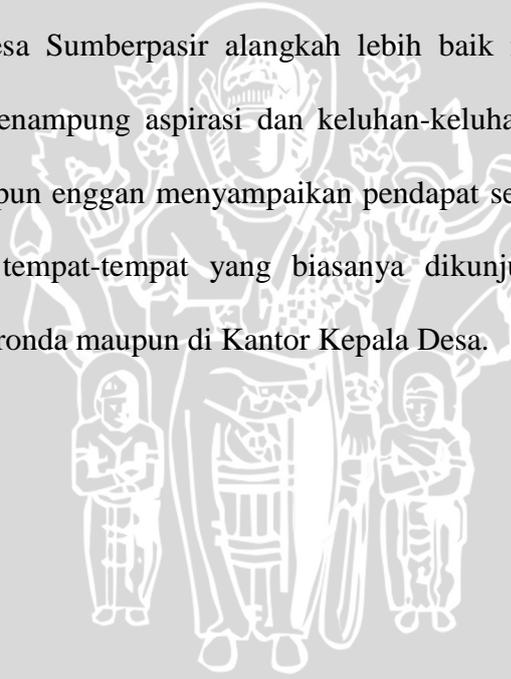
Melalui program-program tersebut pemerintah desa Sumberpasir bisa memberdayakan masyarakatnya dengan baik dalam menunjang kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa

3. Pemerintah Desa Sumberpasir mempunyai kerjasama yang baik antara pihak swasta dan masyarakat serta mempunyai anggaran dana yang baik dalam mendukung kelancaran pembangunan yang ada di Desa Sumberpasir. Sedangkan dalam faktor penghambat yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Sumberpasir yaitu partisipasi masyarakat, budaya malas yang ada dalam diri masyarakat desa Sumberpasir serta kurangnya fasilitas dalam menunjang kelancaran kegiatan yang ada di desa hal ini menyebabkan program-program pemberdayaan menjadi terhambat

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, peneliti mempunyai beberapa saran yang terkait dengan masalah yang diteliti yaitu:

1. Lebih meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menentukan dan mengevaluasi program pemberdayaan masyarakat.
2. Peran Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat harus lebih dioptimalkan dengan berkesinambungan, agar program pemberdayaan masyarakat yang ada di desa sumberpasisr semakin berkembang melalui program-program pemberdayaan baik itu melalui peningkatan pelatihan keterampilan bordir maupun peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan sehingga masyarakat desa lebih berdaya .
3. Pemerintah Desa Sumberpasisr alangkah lebih baik menyediakan kotak saran untuk menampung aspirasi dan keluhan-keluhan masyarakat yang canggung maupun enggan menyampaikan pendapat secara langsung yang diletakkan di tempat-tempat yang biasanya dikunjungi warga seperti posyandu, pos ronda maupun di Kantor Kepala Desa.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjdo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Atmosudirdjo, Prajudi. 1982. *Administrasi dan Manajemen Umum*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bartle, Phill, 2002. *Participatory Method of Measuring Empowerment*. Modul Pelatihan Pemberdayaan.
- Beratha, I Nyoman, 1982. *Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bintoro, R. 2003. *Interaksi Desa, Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bryant, Coralie, dan White, Louise G. 1982. *Managing Development in the Third*. Boulder, Colorado :Westview Press:
- Friedman, John. 1992. *Empoworment : The politics of alternative development*. Cambridge: Blackwell
- Hulme, David & M. Turner, 1990. *Sociology of Development: Theories, Policies and Practices*. Hertfordshire: Harvester Whearsheaf
- Irawan dan M.Suparmoko, 2002.*Ekonomi Pembangunan Desa*. Jakarta: Duta Aksara.
- Kansil, C.S.T. 1984. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kartasasmita, Ginandjar. 1997. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Koentjaraningrat. 1990. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Moleong, 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Moelong Lexy. 2005. *Metodeologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Nazir, Moh. 2005. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
1999. *Metode Penelitian*. Bandung: Ghalia Indonesia
- Ndraha, Taliziduhu. 2002. *Metodologi Penelitian Pembangunan Desa*. Jakarta: Duta Aksara.

1984. *Marfologi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bina Aksara.
- Paul, Samuel, 1987. *Community Participation in Development Projects-The World Bank Experience*. Washington DC: The World Bank.
- A.M.W ,Pranaka dan Onni S. Prijono , 1996. *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan Dan Pelaksanaan*. Jakarta: CSIS.
- Sedarmayanti, Hj, 2004, *Good governance = Kepemerintahan yang baik baigian dua*. Bandung : Mandar Maju .
- Siagian, Sondang P. 2007. *Administrasi Pembangunan. Konsep, Dimensi Dan Strateginya*. Jakarta: Gunung Agung.
1994. *Patologi Birokrasi Analisis, Identifikasi dan Tercapainya*. Jakarta: Ghitalia Indonesia.
1985. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Singarimbun dan Effendi. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Soekanto, Soerjono, 2007 *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung : PT. Refika Aditama.
1997. *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*. Bandung : Lembaga Studi Pembangunan STKS (LSPSTKS).
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sukmaniar, 2007. *Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Program Pengembangan Kecamatan (Ppk) Pasca Tsunami Di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar* . Thesis, Program Pascasarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah Dan Kota Universitas Diponegoro Semarang.
- Sulistiyani, Ambar Teguh, 2004. *Kemitraan dan Modul-modul Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Suprpto, Riyadi. 2000. *Administrasi Pembangunan*. Malang. UM Press..
- Sutrisno, D, 2005. “*Pemberdayaan Masyarakat dan Upaya Peningkatannya dalam Pengelolaan Jaringan Irigasi Mendut Kabupaten Semarang*.” Tugas Akhir tidak diterbitkan, Prorgam Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Semarang.

Tim Lappera. 2003. *Politik Pemberdayaan Jalan Mewujudkan Otonomi Desa*. Yogyakarta :Penerbit Lappera Pustaka Utama.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1985. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: CV. Haji Masagung.

1974.*Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES

Tampubolon, Mangatas. 2006. *Pendidikan Pola Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Sesuai Tuntutan Daerah*.[http://www.depdiknas.go.id/Jurnal/32/pendidikan\\_pola\\_pemberdayaan\\_mas.htm](http://www.depdiknas.go.id/Jurnal/32/pendidikan_pola_pemberdayaan_mas.htm). akses 13 Maret 2013

Wahab, Solichin Abdul, dkk., 2002. *Masa Depan Otonomi Daerah*. Malang: Percetakan SIC.

Widjaja, AW.2003. *Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan UU No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada .

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Mentri Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Desa

#### **Website**

[www.malangkab.go.id](http://www.malangkab.go.id)

[www.bapemas.jatimprov.go.id](http://www.bapemas.jatimprov.go.id)



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

Jalan. MT. Haryono 163, Malang 65145, Jawa Timur, Indonesia

Telp. +62-341-553737, 568914, 558226 Fax. +62-341-558227

E-mail: fia@ub.ac.id

Website: http://fia.ub.ac.id

Program Studi: • Sarjana: - Ilmu Administrasi Publik - Administrasi Pemerintahan - Perencanaan Pembangunan - Ilmu Perpustakaan - Ilmu Administrasi Bisnis - Perpajakan  
- Bisnis Internasional - Hospitality dan Pariwisata • Magister: - Ilmu Administrasi Publik - Ilmu Administrasi Bisnis • Doktor Ilmu Administrasi

Nomor : 1663 / UN.10.3/2013

Lampiran : -

Hal : Riset/Survey

Kepada : Yth. Kepala Desa Sumberpasir  
Di Tempat

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Ita Ulumiyah

Alamat : Jl. Remujung 31 Jatimulyo ,Lowok waru, Kota Malang. (kost)  
Desa. Wonosari 01/02, Gondang wetan, Pasuruan

NIM : 0910310071

Jurusan : Administrasi Publik

Tema : Peran Pemerintah Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Desa  
Terhadap Pelaksanaan Pembangunan (Studi pada Studi pada Kantor Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)

Lamanya : 1 bulan

Peserta : 1 (satu) orang.

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 13 Februari 2013

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Administrasi Publik

Dr. M.R. Khairul Muluk, S.Sos, M.Si  
NIP. 19710510 199803 1 004





PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
KECAMATAN PAKIS  
**KANTOR DESA SUMBERPASIR**

Jl. Raya Sumberpasir No. 104 Sumberpasir - 65154

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 470 /423/421.629.003/ /II /2013

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhdlor

Jabatan : Kepala Desa Sumberpasir

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Ita Ulumiyah

Nim : 0910310071

Jurusan/Program : Administrasi Publik/ S1

Institusi : Universitas Brawijaya Malang

Menerangkan bahwa nama tersebut diatas telah melakukan penelitian, dengan judul "Peran Pemerintah Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Desa" di Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang mulai tanggal 24 Februari 2013 sampai dengan 24 Maret 2013.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumberpasir, 27 Maret 2013

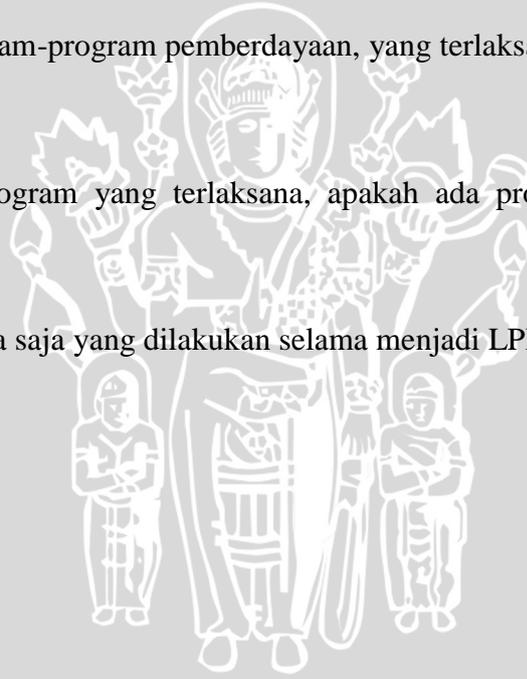


### Interview Guide

Peneliti : Ita Ulumiyah  
Tujuan : Penelitian Skripsi  
Sasaran : Kantor Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang  
Materi : Peran Pemerintah Desa Sumberpasir dalam Memberdayakan Masyarakat

1. Apa saja peran dari Pemerintah Desa Sumberpasir dalam Memberdayakan Masyarakat?
2. Apa saja Program-program Pemberdayaan yang ada di Desa Sumberpasir selama periode 2008-2013?
3. Apa saja Kebijakan yang ada di Desa Sumberpasir?
4. Apakah kebijakan dan program-program yang ditetapkan Pemerintah Desa Sumberpasir sesuai dengan keinginan masyarakat?
5. Apakah program-program yang ada di Desa Sumberpasir berjalan dengan baik?
6. Upaya apa saja yang dilakukan Pemerintah Desa Sumberpasir dalam memberdayakan masyarakat?
7. Pelatihan-pelatihan apa saja yang dilakukan?
8. Bagaimana Peran serta masyarakat terhadap program-program pemberdayaan?
9. Hambatan apa saja yang dihadapi Pemerinatah Desa dalam memberdayakan masyarakat?

10. Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dari program-program pemberdayaan?
11. Apakah ada kerjasama antara pemerintah desa, swasta dan masyarakat dalam memberdayakan masyarakat? kalau ada, bentuk kerjasama apa yang dilakukan?
12. Manfaat apa saja yang diperoleh masyarakat dengan adanya program-program pemberdayaan?
13. Apa saja tugas dari LPMD (lembaga pemberdayaan masyarakat desa)?
14. Dari adanya program-program pemberdayaan, yang terlaksana sampai saat ini apa saja?
15. Dari beberapa program yang terlaksana, apakah ada program yang harus dibiayai?
16. Pendampingan apa saja yang dilakukan selama menjadi LPMD?



**CURRICULUM VITAE**

**Nama Lengkap** : Ita Ulumiyah

**Tempat, tanggal lahir** : Pasuruan, 30 Agustus 1991

**Alamat Asal** : Wonosari 01/02 Gondang Wetan - Pasuruan

**Alamat Malang** : Jl. Remujung No. 31 Malang

**Ponsel** : 085755566716

**Alamat Email** : mia\_chocolate09@yahoo.co.id

**Jenis Kelamin** : Perempuan

**Agama** : Islam

**Status Perkawinan** : Islam

**Pekerjaan Pekerjaan** : Mahasiswa

**Pendidikan** :

1. SDN Wonosari 01 Pasuruan -Lulus Tahun 2003
2. SMP Islam Al- Ma'arif Singosari - Lulus Tahun 2006
3. MAN 1 Malang - Lulus Tahun 2009
4. Universitas Brawijaya Malang, tercatat sebagai mahasiswa aktif sampai sekarang

### Dokumentasi Hasil Penelitian dari Tahun 2009-2012



*Kantor Desa Sumberpasir*



*Perenovasian Mushollah di Dusun Ngragin*



*Perbaikan Drainase di Dusun Ngrangin*



*Perbaikan Jembatan di Dusun Botohputih*



*Pemakadaman jalan di Dusun Gagakasinan*



*Pelatihan Bordir Yang Ada Didesa Sumberpasir*



*Penerimaan Bantuan Mesin Bordir*



*madel-model hasil kerajinan bordir di desa Sumberpasir*





*Salah Satu Contoh Pengerajin Pande Besi yang ada di Desa Sumberpasir*



*Pemavingan yang Ada di Dusun Botohputih*



*Perbaikan Rumah Gakin*